



2025

LAPORAN KEUANGAN OPD

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025.

Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bali, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. [REDACTED]

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR.....	i
D A F T A R I S I.....	ii
D A F T A R L A M P I R A N.....	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	2
LAPORAN OPERASIONAL	3
NERACA	4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	8
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	8
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi	9
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD	10
BAB II INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD.....	12
2.1 EKONOMI MAKRO.....	12
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN	25
2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	32
2.4 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAN KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 2024	33
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD.....	40
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	40
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	40
3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD	42
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	44
4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.....	44
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD	48
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD	48
4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	48
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	89
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	89
5.1.1 PENDAPATAN.....	89
5.1.2 BELANJA DAERAH	92
5.1.3. Surplus / Defisit LRA.....	100
5.2. NERACA	101

5.2.1 ASET.....	101
5.2.2 KEWAJIBAN.....	107
5.2.3 EKUITAS.....	109
5.3 LAPORAN OPERASIONAL	110
5.2.1 PENDAPATAN	110
5.2.2 BEBAN.....	112
5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	116
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	117

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025.
- Lampiran 2 : - SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025.
- SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2025.
- Lampiran 3 : - Berita Acara Rekonsiliasi Desember 2025.
- Lampiran 4 : Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025.
- Lampiran 5 : Laporan Mutasi Barang Persediaan / Barang Pakai Habis Periode Januari s/d Desember 2025.
- Lampiran 6 : - Rekap Aset Tetap Tahun Anggaran 2025.
- Rekap Aset Lainnya Tahun 2025.
- Berita Acara Kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025
- Rincian Barang ke Neraca Hasil SIMDA BMD.
- Laporan Penyusutan Aset Tetap s/d 31 Desember 2025.
- Lampiran I : - Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang
- SK Penghapusan Piutang Secara Bersyarat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025
- Lampiran II : Daftar Kewajiban
- Lampiran III : Persediaan Barang dan Laporan Mutasi Persediaan Barang TA 2025
- Lampiran IV : Ringkasan Belanja Dengan Pendekatan Kas
- Lampiran V : Rekap Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025
- Lampiran VI : Beban Dibayar Dimuka
- Lampiran VII : Pendapatan Hibah
- Lampiran VIII : Kas Dana BOSP
- Lampiran IX : Realisasi Belanja Hibah
- Lampiran X : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
- Lampiran XI : Daftar Aset Yang Pengerjaannya Tahun Jamak



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERANGKAT DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. [REDACTED]

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Uraian	REF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	3.162.272.000	2.845.771.794	89,99	3.157.652.692
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	3.162.272.000	2.845.771.794	89,99	3.157.652.692
Retribusi Daerah	5.1.1.1.1	3.162.272.000	2.845.771.794	89,99	3.157.582.660
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	70.032
BELANJA DAERAH	5.1.2	36.095.008.934,20	31.271.062.999	86,64	29.848.908.083
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	32.647.153.934,20	28.001.179.877	85,77	28.321.473.173
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	25.619.548.375,20	21.541.726.609	84,08	18.966.480.223
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	6.677.605.559	6.109.453.268	91,49	8.949.992.950
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	350.000.000	350.000.000	100,00	405.000.000
BELANJA MODAL	5.1.2.2	3.447.855.000	3.269.883.122	94,84	1.527.434.910
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.1	1.192.855.000	1.143.577.589	95,87	1.527.434.910
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.2	2.255.000.000	2.126.305.533	94,29	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0
SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(32.932.736.934,20)	(28.425.291.205)	86,31	(26.691.255.391)

Bali, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. [REDACTED]

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	5.3.1.	2.850.028.643,12	3.213.405.164,45	(363.376.521,33)	(11,31)
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.3.1.1.	2.850.028.643,12	3.213.405.164,45	(363.376.521,33)	(11,31)
Retribusi Daerah-LO	5.3.1.1.1	2.850.028.643,12	3.213.335.132,45	(363.306.489,33)	(11,31)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.3.1.1.2	0,00	70.032	(70.032)	(100,00)
JUMLAH PENDAPATAN		2.850.028.643,12	3.213.405.164,45	(363.376.521,33)	(11,31)
BEBAN	5.3.2	30.291.938.350	30.737.361.702	(445.423.352,00)	(1,45)
BEBAN OPERASI	5.3.2.1	30.291.938.350	30.737.361.702	(445.423.352,00)	(1,45)
Beban Pegawai	5.3.2.1.1	21.759.219.902	18.845.492.114	2.913.727.788	15,46
Beban Barang dan Jasa	5.3.2.1.2	6.170.369.356	8.533.926.032	(2.363.556.676)	(27,70)
Beban Hibah	5.3.2.1.3	350.000.000	405.000.000	(55.000.000)	(13,58)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.2.1.4	2.012.349.092	2.952.943.556	(940.594.464,00)	(31,85)
Jumlah Beban Operasi		30.291.938.350	30.737.361.702	(445.423.352,00)	(1,45)
Jumlah Beban		30.291.938.350,00	30.737.361.702	(445.423.352,00)	(1,45)
SURPLUS DEFISIT - LO	5.2.3.	(27.441.909.706,88)	(27.523.956.537,55)	82.046.830,67	(0,30)

Bali, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. [REDACTED]

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	5.2.1.	43.546.550.305,59	42.354.754.450,59
ASET LANCAR	5.2.1.1.	168.902.675,00	234.640.850,00
Kas dan Setara Kas	5.2.1.1.1	0,00	0,00
Persediaan	5.2.1.1.3	168.902.675,00	234.640.850,00
ASET TETAP	5.2.1.2	42.734.926.358,59	41.751.461.900,59
Tanah	5.2.1.2.1	5.479.783.250,00	5.479.783.250,00
Peralatan dan Mesin	5.2.1.2.2	17.946.699.154,51	22.349.724.779,51
Gedung dan Bangunan	5.2.1.2.3	24.658.329.149,08	22.950.748.326,08
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.1.2.4	42.078.311.164,69	39.324.062.164,69
Akumulasi Penyusutan	5.2.1.2.7	(47.428.196.359,69)	(48.352.856.619,69)
ASET LAINNYA	5.2.1.3	642.721.272,00	368.651.700,00
Aset Tidak Berwujud	5.2.1.3.1	261.551.700,00	261.551.700,00
Aset Lain-lain	5.2.1.3.2	6.451.953.324,00	465.708.915,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.2.1.3.3	(6.070.763.752,00)	(358.608.915,00)
JUMLAH ASET		43.546.550.305,59	42.354.754.450,59
KEWAJIBAN	5.2.2	1.062.340.709,74	853.926.352,86
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.1	1.062.340.709,74	853.926.352,86
Pendapatan Diterima Dimuka	5.2.2.1.1	113.944.112,74	118.200.961,86
Utang Belanja	5.2.2.1.2	948.396.597,00	735.725.391,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.062.340.709,74	853.926.352,86
EKUITAS	5.2.3	42.484.209.595,85	41.500.828.097,73
Ekuitas	5.2.3	42.484.209.595,85	41.500.828.097,73
JUMLAH EKUITAS		42.484.209.595,85	41.500.828.097,73
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		43.546.550.305,59	42.354.754.450,59

Bali, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Ekuitas Awal	5.4.1	41.500.828.097,73	41.516.484.191,14
Surplus (Defisit-LO)	5.4.4	(27.441.909.706,88)	(27.523.956.537,55)
RK-PPKD	5.4.2	28.425.291.205,00	26.677.645.391,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
- Lain-lain		0,00	830.655.053,14
Ekuitas Akhir		42.484.209.595,85	41.500.828.097,73

Bali, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali.



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. [REDACTED]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan Audited OPD tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 2.845.771.794,00 atau mencapai 89,99% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.162.272.000,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 31.271.062.999,00 atau 86,63% dari anggarannya sebesar Rp 36.095.008.934,20.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk pembayaran belanja Pegawai sebesar Rp 21.541.726.609,00 atau 84,08% dari anggaran sebesar Rp 25.619.548.375,20; Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp 6.109.453.268,00 atau 91,49% dari anggarannya sebesar Rp 6.677.605.559,00; dan Belanja Hibah sebesar Rp 350.000.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp 350.000.000,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk pembayaran belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.143.577.589,00 atau 95,86% dari anggarannya sebesar Rp 1.192.855.000,00; dan untuk pembayaran belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 2.126.305.533,00 dari anggarannya sebesar 94,29% dari anggarannya sebesar Rp 2.255.000.000,00.

Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2025 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

No.	Program	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	
		Keuangan	Fisik		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	80,05	99,68		
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil	83,24	100,00		
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	99,48	100,00		
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	97,17	100,00		
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	91,77	100,00		
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	86,37	99,80		

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Surplus (Defisit) Operasional maupun Non Operasional dalam Tahun 2025. Realisasi Pendapatan LO (Kegiatan Operasional) Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.850.028.643,12. Realisasi Beban Tahun 2025 sebesar Rp30.291.938.350,00. Sehingga realisasi Defisit Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp27.441.909.706,88.

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp43.546.550.305,59 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp168.902.675,00 atau mencapai 0,39% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp42.734.926.358,59 atau mencapai 98,14% dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp642.721.272,00 atau mencapai 1,48% dari seluruh aset.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.062.340.709,74 dan jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp42.484.209.595,85.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas serta menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2025. Ekuitas awal Tahun 2025 adalah sebesar Rp41.500.828.097,73. Perubahan ekuitas dalam Tahun 2025 adalah sebesar Rp983.381.498,12 sehingga ekuitas akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp42.484.209.595,85.



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Unaudited tahun 2025 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- j) Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

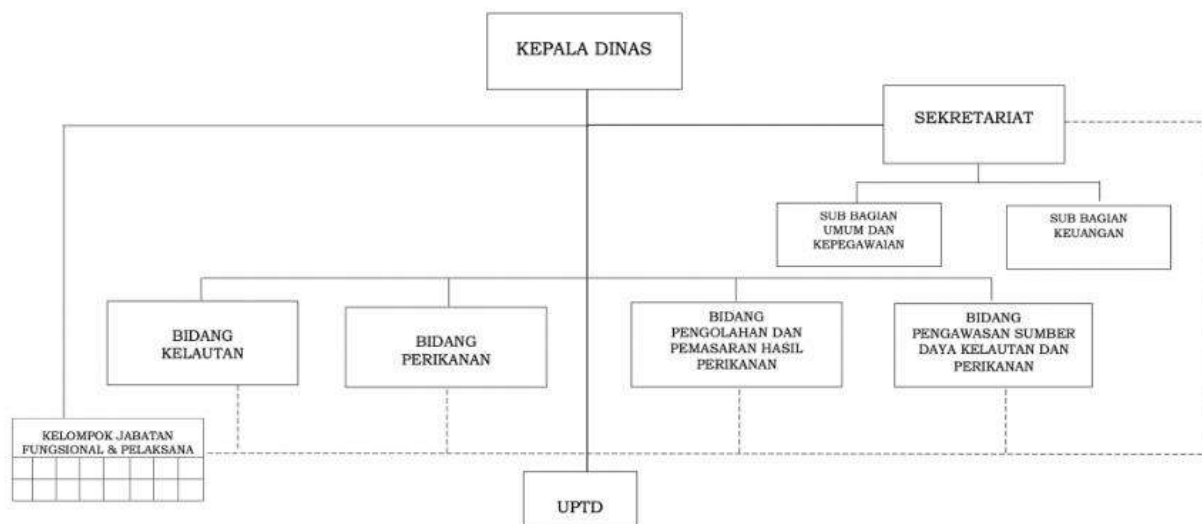
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional (LO)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, kondisi ekonomi makro di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan sektor pariwisata. Meskipun tingkat kunjungan belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2024 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,00%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,79%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,361.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.63.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,48%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,69%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp298,44 triliun;

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat mencapai 4,00%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun 2023-2024
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,57	4,25	4,00	Turun 0,25
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	205,68	193,78	184,43	Turun 9,35
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,54	9,36	9,03	Turun 0,33
4	Peringkat Provinsi	3	1	1	Naik 2

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2024 (keadaan Maret 2024) sebesar 4% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin tercatat 4,25%. Peningkatan kinerja sektor pariwisata pada tahun 2024 disinyalir berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Meskipun persentase penduduk miskin di Bali telah berada di bawah rata-rata nasional, perencanaan anggaran pada tahun mendatang tetap perlu memprioritaskan strategi yang efektif untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,625	0,553	0,499	Turun 0,054
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,586	1,528	1,461	Turun 0,067
3	Peringkat Provinsi	2	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali*

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,129	0,102	0,090	Turun 0,012
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,395	0,377	0,347	Turun 0,03
3	Peringkat Provinsi	1	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2022, 2023, dan 2024*

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- (i) Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
- (ii) Individu yang belum bekerja tetapi dalam proses mempersiapkan usaha;
- (iii) Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan; dan

- (iv) Individu yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	4,80	2,69	1,79	Turun 0,9
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	Turun 0,41
3	Peringkat Provinsi	20	3	2	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan Provinsi Bali Agustus 2022, 2023, dan 2024.*

TPT di Provinsi Bali Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,79%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan TPT Agustus tahun 2023 yang mencapai 2,69%. Meskipun mengalami penurunan, TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 77,11 persen, meningkat sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 47,60 ribu orang, sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 23,74 ribu orang. Dari total penduduk yang bekerja, proporsi pekerja penuh mencapai 74,48 persen, menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2023. Sebaliknya, proporsi pekerja tidak penuh mengalami penurunan, baik pada kategori setengah pengangguran maupun pekerja paruh waktu.

Mayoritas penduduk yang bekerja masih berasal dari sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,68 persen. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023. Sementara itu, TPT di kalangan lulusan Diploma I/II/III mengalami peningkatan pada Agustus 2024, dengan angka tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 3,40 persen.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek **Gini** atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan interpretasi sebagai berikut:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebesar 0,361 poin, sebagaimana ditampilkan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3.1 Gini Ratio Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Gini Ratio	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Provinsi	0,363	0,362	0,361	Turun 0,001
2	Tingkat Nasional	0,384	0,388	0,379	Turun 0,009
3	Peringkat Provinsi	21	21	25	Turun 4

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2022, 2023, dan 2024*

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,361. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,362 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Pada tahun 2023, BPS melakukan update angka salah satu komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup dilakukan update menyusul telah selesainya penghitungan UHH berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, IPM di Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 78,63 poin. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi standar IPM Nasional yang berada pada angka 75,02. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat IPM sebesar 78,01, terjadi peningkatan sebesar 0,62%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Jembrana	74,38	74,80	75,32	Naik 0,52
2	Tabanan	77,22	77,87	78,83	Naik 0,96
3	Badung	82,13	83,00	83,73	Naik 0,73
4	Gianyar	78,87	79,69	80,23	Naik 0,54
5	Klungkung	73,77	74,18	75,15	Naik 0,97

6	Bangli	71,47	71,99	72,51	Naik 0,52
7	Karangasem	69,48	70,09	70,91	Naik 0,82
8	Buleleng	74,48	74,87	75,35	Naik 0,48
9	Denpasar	84,39	84,68	85,11	Naik 0,43
10	Provinsi Bali	77,40	78,01	78,63	Naik 0,62
11	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	75,02	Naik 0,63
12	Peringkat Provinsi	4	5	5	Tetap

Catatan: penghitungan menggunakan Umur Harapan Hidup hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2024

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,48%. Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,23% dibandingkan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan 5,71%, Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,16	9,49	9,97
	Tabanan	14,94	15,47	16,24
	Badung	31,95	35,55	37,67
	Gianyar	17,96	18,87	19,90
	Klungkung	5,77	6,04	6,35
	Bangli	4,51	4,67	4,88
	Karangasem	10,84	11,18	11,66
	Buleleng	22,46	23,28	24,45
	Denpasar	34,07	36,00	38,00
	Provinsi Bali	150,83	159,45	168,19
	Indonesia	11.710,25	12.301,39	12.920,28
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	2,98	3,66	4,98
	Tabanan	2,93	3,56	4,94

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Badung	9,97	11,29	5,94
	Gianyar	4,04	5,06	5,47
	Klungkung	3,12	4,70	5,08
	Bangli	2,80	3,50	4,54
	Karangasem	2,58	3,10	4,33
	Buleleng	3,11	3,64	5,04
	Denpasar	5,02	5,69	5,55
	Provinsi Bali	4,84	5,71	5,48
	Indonesia	5,31	5,05	5,03
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	6	5	6
	Tabanan	7	7	7
	Badung	1	1	1
	Gianyar	3	3	3
	Klungkung	4	4	4
	Bangli	8	8	8
	Karangasem	9	9	9
	Buleleng	5	6	5
	Denpasar	2	2	2
4	Peringkat Nasional	22	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Pada triwulan IV-2024, perekonomian Bali yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp78,36 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp43,83 triliun berdasarkan harga konstan (ADHK 2010=100). Selama triwulan IV-2024, ekonomi Bali tumbuh sebesar 3,37 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan sebesar 26,47 persen.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,19 persen. Dari aspek produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, Ekspor Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 15,67 persen. Secara kumulatif, dari triwulan I hingga triwulan IV-2024, ekonomi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,48 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 masih didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan kontribusi sebesar 21,75 persen. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi sebesar 51,54 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan

harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- (i) inflasi ringan (*creeping inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun,
- (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,34%, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6.1 Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	6,44	2,54	2,69	Naik 0,15
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,63	4,31	1,93	Turun 2,38
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	Turun 1,04
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	1	2	1	

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022, 2023, dan 2024*

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,69%, lebih tinggi dari tingkat inflasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 2,54% . Dalam perhitungan tahunan, Kota Denpasar justru mencatat inflasi tertinggi sebesar 2.69%, sementara Singaraja mengalami inflasi terendah sebesar 1.93%. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh disparitas distribusi barang, pola konsumsi, serta struktur pasar di masing-masing wilayah.

Dari sisi komoditas, kontribusi inflasi lebih banyak didorong oleh sektor pangan, terutama bahan makanan yang memiliki tingkat volatilitas tinggi. Kenaikan harga beberapa komoditas utama seperti daging babi, beras, dan kopi bubuk menunjukkan adanya tekanan permintaan yang meningkat atau gangguan pada rantai pasok. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7.1 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.189.288,61	3.381.630,98	3.815.640,37
	2. Pertambangan dan Penggalian	123.082,36	130.296,98	134.832,81
	3. Industri Pengolahan	775.281,70	826.377,27	888.418,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	21.388,48	23.839,96	24.216,47
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.085,03	11.363,43	11.894,25
	6. Konstruksi	1.560.610,00	1.590.389,71	1.623.412,95
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.515.979,77	1.648.399,89	1.711.991,78
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.992.432,14	2.281.484,63	2.505.118,37
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.725.726,48	1.915.053,52	2.112.996,33
	10. Informasi dan Komunikasi	920.103,44	962.912,12	1.006.944,06
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	564.164,82	642.046,66	731.776,53
	12. Real Estate	686.321,83	711.528,20	724.717,33
	13. Jasa Perusahaan	121.414,09	131.173,23	142.718,57
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	408.829,98	407.500,36	426.835,69
	15. Jasa Pendidikan	329.302,20	326.228,55	337.600,10
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	359.633,80	375.560,11	386.767,10
	17. Jasa lainnya	227.611,00	247.491,35	259.128,71
	PDRB ADH Berlaku	14.532.255,74	15.613.276,95	16.845.009,68
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.423.615,00	5.723.710,40	6.169.684,07
	2. Pertambangan dan Penggalian	268.642,56	280.999,77	288.304,05
	3. Industri Pengolahan	1.420.241,95	1.518.608,39	1.686.305,21
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	27.812,16	31.261,63	33.476,61
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	37.610,48	39.832,49	42.378,80
	6. Konstruksi	2.416.304,08	2.501.179,21	2.591.319,38
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.133.918,14	2.319.825,21	2.440.374,29

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	8. Transportasi dan Pergudangan	361.380,95	424.495,67	470.216,05
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.051.051,59	4.739.339,60	5.530.900,57
	10. Informasi dan Komunikasi	1.437.157,09	1.480.998,95	1.544.631,17
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.012.001,46	1.158.586,29	1.337.744,33
	12. Real Estate	1.243.819,43	1.290.459,70	1.335.134,83
	13. Jasa Perusahaan	261.980,08	283.012,53	313.062,58
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.903.670,09	1.964.653,99	2.008.567,44
	15. Jasa Pendidikan	472.511,89	470.255,13	487.272,02
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	664.021,58	693.729,77	716.370,05
	17. Jasa lainnya	545.559,37	606.245,20	654.056,26
	PDRB ADH Berlaku	23.681.297,92	25.531.693,95	27.649.797,72
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.958.842,15	4.152.829,32	4.418.709,58
	2. Pertambangan dan Penggalian	173.454,78	176.424,08	175.537,09
	3. Industri Pengolahan	2.340.266,80	2.447.355,08	2.609.050,99
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	86.470,56	98.010,62	101.104,90
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	126.000,66	133.721,84	144.254,69
	6. Konstruksi	5.682.997,77	5.831.279,10	5.936.588,64
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.320.982,49	4.740.948,09	5.023.681,41
	8. Transportasi dan Pergudangan	11.477.866,06	19.131.742,25	21.360.511,21
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.034.218,24	16.877.404,33	19.318.413,47
	10. Informasi dan Komunikasi	4.133.369,68	4.216.549,63	4.474.419,94
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.753.186,88	2.043.883,80	2.441.594,87
	12. Real Estate	2.204.535,95	2.278.749,26	2.370.020,26
	13. Jasa Perusahaan	458.276,24	508.423,39	564.326,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.086.235,78	2.184.119,45	2.458.991,02
	15. Jasa Pendidikan	1.965.509,23	1.980.372,32	2.004.091,16
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	942.239,86	986.583,93	1.022.096,32
	17. Jasa lainnya	545.547,02	611.145,40	674.808,97
	PDRB ADH Berlaku	55.290.000,16	68.399.541,91	75.098.200,74
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.510.636,94	3.675.839,89	3.891.726,30
	2. Pertambangan dan Penggalian	391.638,87	400.329,48	419.974,31

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	3. Industri Pengolahan	3.435.572,11	3.702.588,93	3.987.517,87
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.302,85	35.993,58	39.498,26
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34.784,60	36.914,45	39.844,01
	6. Konstruksi	3.622.140,00	3.748.697,89	3.811.078,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.315.521,87	2.519.746,62	2.699.847,80
	8. Transportasi dan Pergudangan	239.273,09	278.927,26	312.035,20
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.511.589,61	6.809.142,28	7.853.299,40
	10. Informasi dan Komunikasi	1.934.235,55	2.022.467,54	2.185.675,15
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.306.803,62	1.470.144,23	1.616.080,27
	12. Real Estate	1.302.343,47	1.348.206,25	1.369.136,50
	13. Jasa Perusahaan	368.103,38	407.992,81	448.403,69
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.594.599,03	1.603.134,89	1.736.920,82
	15. Jasa Pendidikan	698.609,27	694.994,47	735.679,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.074.711,90	1.127.533,03	1.186.379,33
	17. Jasa lainnya	572.339,60	646.762,67	713.502,61
	PDRB ADH Berlaku	27.944.205,76	30.529.416,26	33.046.599,01
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.026.791,81	2.184.286,74	2.429.551,82
	2. Pertambangan dan Penggalian	279.591,68	295.100,51	312.759,48
	3. Industri Pengolahan	903.301,57	951.253,24	1.024.071,76
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	10.932,89	12.862,85	12.862,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.998,95	19.316,40	20.615,55
	6. Konstruksi	979.637,48	1.007.661,23	1.050.024,51
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	804.462,79	875.010,35	917.712,34
	8. Transportasi dan Pergudangan	200.723,00	255.309,30	308.267,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	923.819,00	1.208.761,79	1.455.499,58
	10. Informasi dan Komunikasi	876.961,00	913.977,88	964.968,84
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	417.685,00	474.210,75	530.410,20
	12. Real Estate	223.019,00	232.428,12	244.020,72
	13. Jasa Perusahaan	94.768,00	103.802,93	117.940,92
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	527.576,00	553.753,78	587.891,46
	15. Jasa Pendidikan	229.617,00	230.940,31	243.654,61

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	458.999,65	484.075,44	501.955,32
	17. Jasa lainnya	234.324,00	269.463,75	291.246,90
	PDRB ADH Berlaku	9.210.208,54	10.072.215,38	11.015.485,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.035.006,00	2.159.462,75	2.305.078,49
	2. Pertambangan dan Penggalian	131.510,24	139.860,70	141.074,92
	3. Industri Pengolahan	641.512,30	681.839,42	706.341,00
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.059,12	3.481,68	3.481,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.773,48	4.879,57	4.899,17
	6. Konstruksi	654.650,77	675.513,40	685.416,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	738.882,07	807.988,58	831.315,69
	8. Transportasi dan Pergudangan	79.728,61	89.153,81	97.253,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	821.596,16	964.549,92	1.138.978,65
	10. Informasi dan Komunikasi	338.265,01	354.235,97	374.687,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	222.152,25	257.966,62	298.905,38
	12. Real Estate	232.396,17	241.140,91	247.720,41
	13. Jasa Perusahaan	40.360,77	42.964,87	47.956,89
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	843.307,07	895.256,27	956.295,79
	15. Jasa Pendidikan	179.632,29	181.363,75	186.771,51
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119.671,79	124.989,83	130.919,24
	17. Jasa lainnya	251.486,23	283.561,43	308.344,91
	PDRB ADH Berlaku	7.337.990,33	7.908.309,50	8.465.602,94
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.692.140,04	4.883.332,90	5.136.046,48
	2. Pertambangan dan Penggalian	614.611,50	676.062,20	732.501,48
	3. Industri Pengolahan	740.475,76	774.052,10	812.244,50
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	17.178,66	19.350,10	19.583,50
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.691,01	24.557,10	26.065,36
	6. Konstruksi	1.270.811,10	1.318.015,90	1.388.940,76
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.005.922,35	1.082.719,70	1.083.924,05
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.789.763,23	3.070.993,40	3.239.840,33
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.427.387,30	1.739.410,30	1.963.789,48

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	10. Informasi dan Komunikasi	634.616,08	653.175,20	688.430,29
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	901.446,44	1.062.929,80	1.194.490,15
	12. Real Estate	721.175,79	754.932,90	796.748,39
	13. Jasa Perusahaan	142.518,15	152.030,40	166.652,96
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.652,50	1.365.395,50	1.470.849,27
	15. Jasa Pendidikan	464.023,50	467.122,00	505.366,70
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	420.578,37	442.879,10	472.299,19
	17. Jasa lainnya	438.499,58	487.816,80	512.555,10
	PDRB ADH Berlaku	17.669.491,36	18.974.775,40	20.210.327,99
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.713.940,52	8.004.808,88	8.445.133,84
	2. Pertambangan dan Penggalian	316.017,83	327.936,72	346.694,92
	3. Industri Pengolahan	2.202.415,92	2.364.120,60	2.671.661,09
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	60.525,06	67.514,94	72.171,29
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39.269,31	42.908,86	42.068,50
	6. Konstruksi	3.450.497,17	3.541.541,69	3.716.363,13
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.332.078,71	4.727.916,99	5.023.231,19
	8. Transportasi dan Pergudangan	389.627,59	454.042,28	508.734,02
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.209.229,73	6.198.370,94	7.069.183,70
	10. Informasi dan Komunikasi	2.141.119,70	2.198.163,88	2.266.618,36
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.657.123,69	1.931.174,90	2.257.241,86
	12. Real Estate	1.697.749,64	1.763.266,42	1.852.223,07
	13. Jasa Perusahaan	255.125,00	281.872,31	303.807,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.998.931,25	2.001.994,79	2.129.695,24
	15. Jasa Pendidikan	2.741.409,33	2.726.839,41	2.849.266,95
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	888.702,34	927.592,07	972.804,27
	17. Jasa lainnya	711.521,40	791.295,42	860.853,44
	PDRB ADH Berlaku	35.805.284,19	38.351.361,10	41.387.751,89
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.787.130,03	3.949.625,79	3.778.610,97
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.653.694,27	3.875.731,94	4.206.282,45
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	294.961,88	347.657,68	409.059,32
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	133.996,87	136.499,25	134.263,81

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	6. Konstruksi	6.520.700,87	6.689.585,29	6.820.641,59
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.468.721,49	6.041.481,81	6.453.315,98
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.453.809,78	1.773.632,76	1.918.713,85
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.432.033,63	14.328.513,00	16.682.509,16
	10. Informasi dan Komunikasi	2.765.656,56	2.844.638,21	2.975.124,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.654.675,52	4.210.391,02	5.023.714,55
	12. Real Estate	2.372.487,01	2.457.089,19	2.496.708,08
	13. Jasa Perusahaan	1.106.931,48	1.225.422,18	1.345.518,35
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.978.879,20	2.997.349,63	3.254.187,63
	15. Jasa Pendidikan	6.562.279,44	6.587.509,19	6.992.708,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.552.815,68	1.636.171,17	1.700.830,67
	17. Jasa lainnya	895.053,48	999.003,56	1.108.025,10
	PDRB ADH Berlaku	54.633.827,19	60.100.301,66	65.300.213,73
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.013.894,37	37.709.948,37	40.059.242,70
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.312.139,37	2.436.619,10	2.549.773,82
	3. Industri Pengolahan	16.143.831,20	17.106.709,37	18.637.068,95
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	553.539,86	640.751,91	717.467,90
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	421.646,34	446.944,72	458.996,26
	6. Konstruksi	26.128.699,12	26.805.931,83	27.567.304,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.550.755,72	24.591.396,32	25.933.889,82
	8. Transportasi dan Pergudangan	18.896.608,37	27.656.961,48	30.615.664,20
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44.112.103,06	54.680.183,65	63.912.735,23
	10. Informasi dan Komunikasi	15.028.830,69	15.517.170,16	16.101.487,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	11.486.409,28	13.277.201,87	15.457.622,58
	12. Real Estate	10.683.388,28	11.055.527,30	11.449.017,85
	13. Jasa Perusahaan	2.866.674,70	3.164.354,38	3.455.353,28
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.646.457,38	13.888.797,80	14.933.540,96
	15. Jasa Pendidikan	13.614.504,84	13.669.131,84	14.228.758,62
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.485.858,10	6.805.150,01	7.066.961,92
	17. Jasa lainnya	4.423.392,89	4.909.174,98	5.296.623,87
	PDRB ADH Berlaku	245.367.890,26	274.358.182,88	298.441.509,83

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (Budgetary)
- 2) Sebagai alat pengatur (Regulatory).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis Retribusi yang dapat dipungut. Jenis Retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Terdiri dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan; Kerjasama Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Lebih lanjut Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana yang bersifat umum dialokasikan dalam bentuk:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana

Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk Daerah Provinsi, bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh Daerah Provinsi. Sedangkan untuk Dana Transfer Khusus sendiri dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

b. Transfer Antar Daerah yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah yaitu bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan;
- b. Dana Darurat yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan Kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan

Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
 - b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti:
 - ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
 - ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
 - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
 - ✓ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai ISO 9001 – 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
 - ✓ Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
 - ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.
 - ✓ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya.
 - c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponenkomponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
 - d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan alokasi dari Pendapatan Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan Pendapatan Transfer khususnya dari Dana Bagi Hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi

adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Untuk itu pengelolaan belanja daerah Provinsi Bali akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi

sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan Anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Selanjutnya untuk klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing Pemerintah Daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto yang selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian pembiayaan juga bisa disebut sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perUndang-Undangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan

6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 7 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu:

Prioritas 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata

Prioritas 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

Prioritas 3: Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas 4: Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya

Prioritas 5: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Prioritas 6: Infrastruktur

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.4 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAN KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.4.1 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DALAM POSTUR APBD TA 2024

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib fungsi pendidikan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1.1 Capaian Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Urusan Bidang Pendidikan :	1.951.092.197.353,00	1.813.572.701.073,43	92,95%
	1)	Belanja Operasi:	1.519.093.347.148,00	1.473.206.264.353,70	96,98%
	a.	belanja pegawai;	1.146.289.783.066,00	1.091.604.335.536,00	95,23%
	b.	belanja barang dan jasa;	280.472.814.082,00	290.428.985.613,70	103,55%
	c.	belanja hibah	92.330.750.000,00	91.172.943.204,00	98,75%
	2)	Belanja Modal:	431.998.850.205,00	340.366.436.719,73	78,79%
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan:	23.535.121.312,00	21.992.584.152,00	93,45%
	1)	Belanja Operasi:	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
		belanja barang dan jasa	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
	2)	Belanja Modal:	370.000.000,00	0,00	0,00%
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan:	627.473.360,00	586.194.410,00	93,42%
	1)	Belanja Operasi:	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
		belanja barang dan jasa	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
	2)	Belanja Modal:	100.000.000,00	98.531.370,00	98,53%
	d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
	1)	Belanja Operasi:	66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
	a.	belanja barang dan jasa;	12.586.664.400,00	8.748.328.314,00	69,50%
	b.	belanja hibah	53.950.000.000,00	53.187.792.926,00	98,59%
	2)	Belanja Modal:	0,00	0,00	0,00%
	e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	8.513.613.680,00	8.176.279.815,00	96,04%
	1)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%
	2)	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.009.040.280,00	7.688.724.592,00	96,00%

		3)	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata	168.223.400,00	161.923.973,00	96,26%
2	Anggaran Fungsi Pendidikan			2.050.305.070.105,00	1.906.263.880.690,43	92,97%
3	Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%				26,30%	26,14%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.050.305.070.105,00 atau 26,30% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp1.906.263.880.690,43 atau 26,14% dari total realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
- b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
- c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
 - 1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
 - 2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
 - 3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
 - 4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
 - 5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
- d. Angka harapan lama sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
- e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
 - 1) Pengadaan ajang gelar karya/expo siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”
 - 2) Melakukan Kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha/industri

f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:

1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online

Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali

2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)

Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik

3) Aplikasi kelas virtual

Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

2. Belanja Wajib Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 409 ayat (4) dan (5) dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib kesehatan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1.2 Capaian Belanja Wajib Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN			ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)			(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Urusan bidang Kesehatan:		703.679.827.456,00	645.621.139.448,60	91,75%
	1)	Belanja Operasi:		641.701.325.312,00	587.658.787.821,88	91,58%
		a.	belanja pegawai;	357.485.933.695,00	326.552.360.072,00	91,35%
		b.	belanja barang dan jasa;	283.193.056.481,00	260.212.432.893,88	91,89%
		c.	belanja hibah	1.022.335.136,00	893.994.856,00	87,45%
	2)	Belanja Modal:		61.978.502.144,00	57.962.351.626,72	93,52%
	b.	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		136.576.380.352,00	123.928.287.644,00	90,74%
	1)	Belanja Transfer:		72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%

		Sharing PBI Daerah	72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
	2)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Seluruh OPD di luar Dinas Kesehatan	62.983.853.524,00	56.857.122.247,00	90,27%
	3)	Belanja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas PMD Dukcapil	332.121.540,00	316.199.902,00	95,21%
	4)	Belanja Sub Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan	268.534.060,00	259.124.615,00	96,50%
2	Anggaran Kesehatan (a+b)		840.256.207.808,00	769.549.427.092,60	91,59%
3	Total Belanja Daerah		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
4	Gaji dan Tunjangan ASN		944.767.093.038,00	915.767.773.065,00	96,93%
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		6.850.914.637.766,00	6.377.284.076.933,07	93,09%
Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%			12,26%	12,07%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib kesehatan sebesar Rp840.256.207.808,00 atau 12,26% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.850.914.637.766,00 dengan realisasi sebesar Rp769.549.427.092,60 atau 12,07% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.377.284.076.933,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan layanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemetaan/Pendataan permasalahan kesehatan:
 - 1) Penduduk yang tidak memiliki akses layanan kesehatan,
 - 2) Sebaran Tenaga Kesehatan, dan
 - 3) Ketersediaan layanan kesehatan sampai tingkat banjar (Posyandu).
- b. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memastikan UHC 100%
- c. Memfasilitasi pemenuhan tenaga kesehatan pada daerah yang masih kekurangan

- d. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
- e. Mendorong peran serta swasta untuk membuka dan meningkatkan layanan kesehatan

3. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1.3 Capaian Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
a.	Belanja Bagi Hasil	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	98,85%
b.	Belanja Bantuan Keuangan	366.931.922.273,00	355.860.433.998,00	96,98%
	Jumlah (a + b)	2.188.818.002.657,00	2.156.832.426.341,00	98,54%
3	Selisih (1 -2)	5.606.863.728.147,00	5.136.219.423.657,07	91,61%
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih 1-2)	2.242.745.491.258,80	2.054.487.769.462,83	91,61%
5	a. Belanja Modal	798.894.222.750,00	667.689.607.145,41	83,58%
	1) Tanah	4.410.000.000,00	3.464.184.000,00	78,55%
	2) Peralatan dan Mesin	185.033.598.328,00	130.063.180.613,50	70,29%
	3) Bangunan dan Gedung	443.866.230.954,00	407.489.294.374,22	91,80%
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	109.632.657.467,00	94.451.449.090,69	86,15%
	5) Aset tetap lainnya	55.101.736.001,00	31.382.599.067,00	56,95%
	6) Aset lainnya	850.000.000,00	838.900.000,00	98,69%
	b. Belanja pemeliharaan	50.718.097.422,00	39.402.749.121,78	77,69%
6	a. Belanja Hibah	174.576.360.572,00	166.916.244.753,00	95,61%
	b. Belanja Bantuan Sosial			

7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (5+6)	1.024.188.680.744,00	874.008.601.020,19	85,34%
Persentase Belanja Infrastruktur		18,27%	17,02%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.024.188.680.744,00 atau 18,27% dari total anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.606.863.728.147,00 dengan realisasi sebesar Rp874.008.601.020,19 atau 17,02% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.136.219.423.657,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dalam RAPBD TA 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2025:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	3.162.272.000	2.845.771.794	89,99	3.157.652.692
Belanja	36.095.008.934,20	31.271.062.999,00	86,64	29.848.908.083,00
Surplus/(Defisit)	(32.932.736.934,20)	(28.425.291.205,00)	86,31	(26.691.255.391,00)

Pendapatan dengan anggaran sebesar Rp3.162.272.000 terealisasi sebesar Rp2.845.771.794 atau sebesar 89,99%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.823.945.935,20 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp36.095.008.934,20 terealisasi sebesar Rp31.271.062.999,00 atau 86,64%. Realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp36.095.008.934,20 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

No.	Program	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	
		Keuangan	Fisik		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	80,05	99,68		
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil	83,24	100,00		
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	99,48	100,00		
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	97,17	100,00		
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	91,77	100,00		
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	86,37	99,80		

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan yang serapannya belanjanya dibawah 80%. Keseluruhan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Kegiatan	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
		Keuangan	Fisik	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84,10	100,00	
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77,86	100,00	Pada DPA terdapat spesifikasi barang Philips Trafo Ballast BTA 18W 220V C SC sebanyak 4 unit, dimana Pagu di DPA jauh lebih rendah dari pada

				harga di pasaran saat proses pengajuan spj, sehingga tidak bisa direalisasikan
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97,07	100,00	
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89,28	100,00	
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66,00	100,00	realisasi keuangan hanya mencapai 55,20 %, hal ini karena Harga Pagu di DPA jauh lebih tinggi dari harga di pasaran
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77,94	100,00	adanya instruksi presiden melalui Perpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran perjalanan dinas pada sub kegiatan ini di rasionalisasi
7.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94,76	100,00	
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63,69	100,00	realisasi keuangan 63,69%, hal ini disebabkan karena harga yang tertera di Pagu DPA untuk materai Rp.15.700'-/lembar, sedangkan harga beli di rekanan Rp.10.000/lembar, jadi menyebabkan efisiensi anggaran sebesar 36,31 %
9.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84,35	100,00	hal ini karena efisiensi pemakaian listrik, dan penonaktifan nomor telephone kantor yang sudah tidak digunakan awalnya terdapat 6 nomor telephone dan di nonaktifkan 5
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84,43	96,25	adanya Surat Edaran sekda Nomor 7054 tahun 2025 tentang pengendalian belanja makan minum rapat, belanja ATK, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.
11.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86,00	100,00	
12.	Sub Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	54,22	100,00	- Kegiatan perjalanan dinas 16 Orang/ Kali tidak bisa dilaksanakan karena Surat Edaran Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

				- Pada uraian belanja perjalanan dinas dalam kota terdapat 3 peserta tidak hadir sehingga realisasi hanya 9 orang
13.	Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	83,53	100,00	tidak tercapai 85% dikarenakan adanya instruksi presiden melalui Perpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan Anggaran pada sub kegiatan ini di rasionalisasi
14.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	77,64	100,00	Pada anggaran perdin asesor disediakan untuk 2 orang tetapi setelah dilakukan negosiasi kegiatan asesmen ISO 17065 dapat dilaksanakan secara blended asesmen (online dan offline) sehingga asesor yang datang hanya 1 orang.
15.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	90,73	99,70	
16.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	86,06	100,00	adanya sisa dari anggaran makan dan minum sebab adanya penyesuaian kegiatan di lapangan
17.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	86,74	100,00	menyesuaikan dengan kebutuhan dan pada anggaran belanja honorarium narasumber kegiatan hanya dibayarkan sebesar 50% karena yang menjadi narasumber adalah bapak Kepala Dinas Kelautan

3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan Perangkat Daerah merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Perangkat Daerah (SA PD) yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dan Neraca Perangkat Daerah telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara Perangkat Daerah (lampiran 2).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi

pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan

- c. Kepegawaian
- d. Pendidikan dan Pelatihan
- e. Penelitian dan Pengembangan
- f. Penghubung
- 6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
- 7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah

27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

1. UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
3. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
5. UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali
6. UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
7. UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
8. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bali terdiri dari:

1. Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
2. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)
3. PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)
4. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.

- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan:

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas

daerah.

- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka

asas bruto dapat dikecualikan.

- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil: Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan

 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil: Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
- b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
- c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

- b. Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

- d. Piutang Transfer Lainnya;

- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayaranannya oleh Pemerintah Pusat.

e. Piutang Bagi Hasil;

f. Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
- 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang

pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional

utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:

- a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya

mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

- b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

- Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
- (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan)

ditentukan:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan

masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan

penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan

diperoleh;

- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Definisi

- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
- b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
- c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
- d. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas

pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

- 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut

tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana CadanganPembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

- b. Hasil Pengelolaan Dana CadanganPenerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas

berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

4) Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

6) Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangibile asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 9) Aset Tak Berwujud Lainnya
- Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- d. Aset Lain-Lain
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
- 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

- a. Tagihan Jangka Panjang
- 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 1) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.
- e. Amortisasi
- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan

bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.18 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Provinsi.

Dalam Tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 terdiri dari:

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2025 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.162.272.000,00 terealisasi sebesar Rp2.845.771.794,00 atau 89,99%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	89,99	3.157.652.692,00
Jumlah	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	89,99	3.157.652.692,00

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini adalah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	89,99	3.157.582.660,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	70.032,00
Jumlah	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	89,99	3.157.652.692,00

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp311.880.898,00) atau (9,88%), sementara Lain-lain PAD yang Sah memiliki persentase sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp70.032,00) dibandingkan tahun 2024 karena pada TA 2025 tidak terdapat PAD lain selain Retribusi Daerah seperti pendapatan denda di tahun sebelumnya.

5.1.1.1.1 Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Usaha	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	89,99	3.157.582.660,00
Jumlah	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	89,99	3.157.582.660,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah TA 2025 yang seluruhnya berasal dari Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp311.810.866,00) atau (9,87%), Lebih rendahnya capaian realisasi Retribusi Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 pencapaian yang kurang memenuhi target pada pos Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali karena beberapa faktor eksternal.

5.1.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha

Berikut ini adalah Retribusi Jasa Usaha yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	43.272.000,00	65.651.500,00	151,72	28.049.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.594.000.000,00	1.777.215.000,00	68,51	2.397.010.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	125.000.000,00	148.224.000,00	118,58	110.367.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	400.000.000,00	854.681.294,00	213,67	622.156.660,00
Jumlah	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	89,99	3.157.582.660,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp311.810.866,00) atau (9,87%). Tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 151,72% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp37.602.500,00 pada TA 2025.
- 2) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 68,51% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penjualan Tiket Kawasan Konservasi Nusa Penida di bawah UPTD Kawasan Koservasi Provinsi Bali kurang mencapai target pendapatan karena beberapa faktor eksternal, khususnya perubahan cuaca ekstrim

di tengah dan selama akhir tahun 2025. Hal ini menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan domestik maupun internasional. Munculnya berbagai destinasi wisata baru dalam tren rekreasi—baik aktivitas alternatif di Pulau Bali maupun meningkatnya popularitas destinasi di provinsi lain seperti Banyuwangi, Lombok, dan Nusa Tenggara—mendorong persaingan yang turut memengaruhi minat wisatawan terhadap aktivitas *snorkeling* dan kegiatan wisata lainnya di Nusa Penida. Akibat kejolak yang tidak terduga selama tahun 2025 membuat penjualan tiket Kawasan Konservasi menurun, sehingga belum mencapai target yang diharapkan.

- 3) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 118,58% pada TA 2025.
- 4) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 213,67% pada TA 2025. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali ditunjuk sebagai salah satu Laboratorium *Official Control* oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga pelaksanaan *surveillance sample* untuk logam berat, histamin dan E.coli diarahkan ke UPTD PPMHP dan menambah pendapatan retribusi pos ini secara signifikan dibandingkan TA sebelumnya.

5.1.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini adalah Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	70.032,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	70.032,00

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp70.032,00) atau (100,00%). Di tahun sebelumnya, Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 tersebut berupa Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha yaitu denda keterlambatan pembayaran Retribusi Sewa Kantin. Sementara itu di TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada lagi pendapatan serupa maka realisasinya nihil.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Berikut ini adalah BELANJA DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	32.647.153.934,20	28.001.179.877,00	85,77	28.321.473.173,00
BELANJA MODAL	3.447.855.000,00	3.269.883.122,00	94,84	1.527.434.910,00
Jumlah	36.095.008.934,20	31.271.062.999,00	86,64	29.848.908.083,00

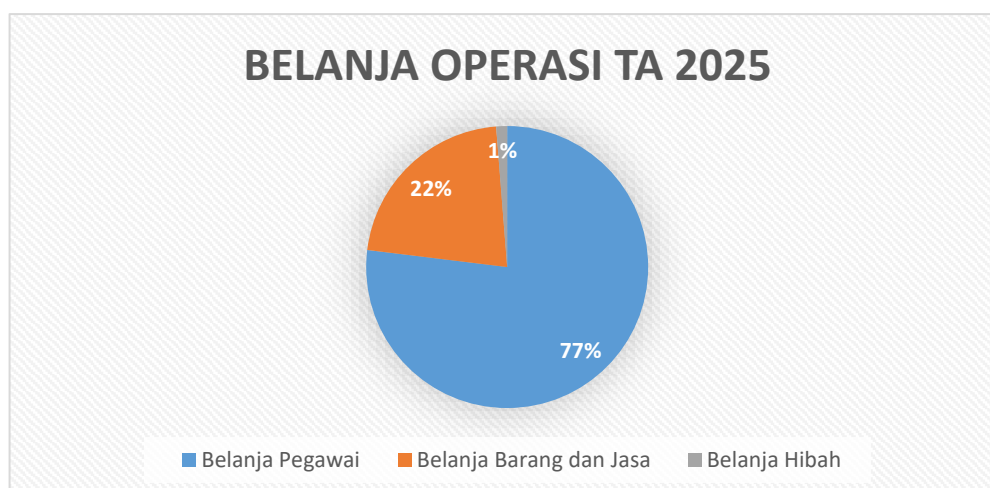
Tabel tersebut menunjukkan BELANJA DAERAH TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.422.154.916,00 atau 4,76%, khususnya BELANJA MODAL dengan kenaikan signifikan sebesar Rp1.742.448.212,00 pada TA 2025 karena adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan pada perangkat daerah.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Berikut ini adalah BELANJA OPERASI yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	25.619.548.375,20	21.541.726.609,00	84,08	18.966.480.223,00
Belanja Barang dan Jasa	6.677.605.559,00	6.109.453.268,00	91,49	8.949.992.950,00
Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	405.000.000,00
Jumlah	32.647.153.934,20	28.001.179.877,00	85,77	28.321.473.173,00

Target anggaran setelah perubahan TA 2025 sebesar Rp32.647.153.934,20 terealisasi sebesar Rp28.001.179.877,00 atau 85,77 %. Tabel di atas menunjukkan BELANJA OPERASI TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp320.293.296,00) atau (1,13%). Penurunan ini dipicu oleh realisasi Belanja Pegawai yang pencapaiannya berkurang di TA 2025.



5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.500.503.604,20	10.136.529.294,00	81,09	7.999.460.323,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.119.044.771,00	11.405.197.315,00	86,94	10.882.119.900,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	84.900.000,00
Jumlah	25.619.548.375,20	21.541.726.609,00	84,08	18.966.480.223,00

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan TA 2025 sebesar Rp25.619.548.375,20 terealisasi sebesar Rp21.541.726.609,00 atau 84,08%. Meskipun presentase realisasinya belum mencapai 100%, Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.575.246.386,00 atau 13,58%, berikut penjelasannya:

- 1) Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN di tahun 2025 lebih rendah daripada anggaran 2025 namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Belum tercapainya 100% realisasi di tahun 2025 disebabkan karena terdapat Jabatan Struktural dan Fungsional yang kosong sejak awal tahun seperti Kepala Bidang Kelautan, Kepala Bidang Perikanan, dan juga dua posisi Eselon 4. Pelantikan untuk mengisi jabatan-jabatan ini baru dilaksanakan pada bulan Juni 2025, sehingga pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang telah dianggarkan untuk jabatan-jabatan tersebut tidak dapat terealisasi selama beberapa bulan kekosongan jabatan.
- 2) Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN di tahun 2025 untuk Belanja Honorarium juga kurang

maksimal karena adanya pegawai yang merangkap dalam SK Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah (BMD), namun sesuai ketentuan pembayaran belanja honorarium tidak boleh berganda untuk satu orang. Sehingga untuk yang bersangkutan, salah satu Honorarium tidak dicairkan.

- 3) Kenaikan capaian realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp2.575.246.386,00 dikarenakan adanya pengangkatan PPPK yang dilakukan secara bertahap pada bulan Juni. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terdiri dari komponen gaji pokok dan TPP PNS dan PPPK sehingga pengangkatan tersebut mempengaruhi besaran gaji yang dibayarkan. Selain itu, peningkatan juga disebabkan karena penerapan tarif TER yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga memengaruhi realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN untuk Gaji Pokok dan TPP pegawai, baik Gaji Pokok dan TPP Induk maupun Gaji THR + TPP THR dan Gaji Ketigabelas + TPP Ketigabelas.
- 4) Kenaikan capaian realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024 juga karena terdapat pembayaran TPP PPPK yang diangkat pada tahun 2024, dimana pembayarannya dimulai bulan Mei dari TPP April sehingga mempengaruhi akun Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK, dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.
- 5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp84.900.000,00) pada TA 2025 disebabkan karena adanya perubahan jenis belanja. Pos belanja ini yang semula terdiri dari Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Honorarium, dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD dipindahkan menjadi bagian belanja barang dan jasa.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	2.432.074.800,00	2.209.971.364,00	90,87	2.970.040.700,00
Belanja Jasa	3.238.849.839,00	3.029.337.929,00	93,53	3.222.728.582,00
Belanja Pemeliharaan	619.155.920,00	530.242.675,00	85,64	2.219.285.523,00
Belanja Perjalanan Dinas	333.525.000,00	289.799.650,00	86,89	537.938.145,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.000.000,00	50.101.650,00	92,78	0,00
Jumlah	6.677.605.559,00	6.109.453.268,00	91,49	8.949.992.950,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.840.539.682,00) atau (31,74%), berikut penjelasannya:

- 1) Capaian realisasi Belanja Barang di TA 2025 lebih rendah dari TA 2024 karena penurunan Belanja Pakai Habis yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025. Beberapa pos belanja seperti Belanja Bahan-Bahan Lainnya, Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran, Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain yang direalisasikan pada TA 2024 tidak dianggarkan kembali pada TA 2025.
- 2) Capaian realisasi Belanja Pemeliharaan di TA 2025 lebih rendah dari TA 2024 dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.689.042.848,00) disebabkan karena tidak dianggarkannya kembali sejumlah pos Belanja Pemeliharaan seperti Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan misalnya berupa Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Perikanan di UPTD, sehingga tidak terealisasi.
- 3) Capaian realisasi Belanja Perjalanan Dinas di TA 2025 lebih rendah dari TA 2024 disebabkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan arahan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% sehingga besaran anggaran perjalanan dinas dikurangi. Ini juga mempengaruhi realisasinya yang berupa Perjalanan Dinas Biasa lebih rendah dibandingkan TA 2024.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	405.000.000,00
Jumlah	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	405.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp55.000.000,00) atau (13,58%), hal ini karena pada TA 2025 Belanja Hibah yang dianggarkan pun berkurang. Meski demikian, dari jumlah yang dianggarkan, realisasinya mencapai 100%. Belanja Hibah tersebut berupa Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Belanja Hibah direalisasikan berupa Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yaitu ditujukan kepada sejumlah kelompok nelayan. Hibah uang tersebut diserahkan kepada:

- Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Bali di Kabupaten Badung sejumlah Rp300.000.000,00 dengan berdasarkan SK Gubernur Nomor 116/03-R/HK/2025 tanggal 29 April 2025 dan Nomor NPHD 164.U/03-R/2025 tanggal 23 Mei 2025.
- Kelompok Nelayan Banyu Mas di Kabupaten Jembrana sejumlah Rp50.000.000,00 dengan berdasarkan SK Gubernur Nomor 193/03-R/HK/2025 tanggal 3 Oktober 2025 dan Nomor NPHD 330.U/03-R/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah BELANJA MODAL yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.192.855.000,00	1.143.577.589,00	95,87	1.527.434.910,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.255.000.000,00	2.126.305.533,00	94,29	0,00
Jumlah	3.447.855.000,00	3.269.883.122,00	94,84	1.527.434.910,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA MODAL TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.742.448.212,00 atau 114,08%. Peningkatan signifikan disebabkan adanya anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak terdapat di tahun sebelumnya. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut berupa belanja konstruksi gedung tempat kerja di kantor induk perangkat daerah.



5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	179.250.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.400.000,00	2.136.750,00	48,56	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	525.429.300,00	509.180.000,00	96,91	677.965.900,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	125.993.900,00	124.400.000,00	98,73	182.200.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	84.660.000,00	71.060.839,00	83,94	0,00
Belanja Modal Komputer	452.371.800,00	436.800.000,00	96,56	455.319.010,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	32.700.000,00
Jumlah	1.192.855.000,00	1.143.577.589,00	95,87	1.527.434.910,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp383.857.321,00) atau (25,13%), berikut penjelasannya:

- 1) Penurunan ini terjadi karena beberapa pos seperti Belanja Modal Alat Besar dan Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi yang direalisasikan pada TA 2024 tidak dianggarkan kembali pada TA 2025. Sementara terdapat pula Belanja Modal yang baru dianggarkan pada TA 2025 seperti Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur serta Belanja Modal Alat Laboratorium.
- 2) Realisasi kedua pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang baru dianggarkan pada TA 2025 tersebut persentasenya capaiannya belum optimal karena pagu yang terdapat di DPA lebih tinggi dari harga pasaran Alat Laboratorium dan Alat Ukur yang dibelanjakan melalui *e-catalog*.
- 3) Berikut realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.143.577.589,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Pipet Controler sebesar Rp. 8,199,999.00 sesuai BAST Nomor: B.26.000.3/693/UPTD.PPMHP/DISKELKAN tanggal 16 September 2025
 - Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Pipet Controler sebesar Rp. 8,200,000.00 sesuai BAST Nomor: B.26.000.3/693/UPTD.PPMHP/DISKELKAN tanggal 16 September 2025
 - Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Micropipette sebesar Rp. 4,155,840.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3/692/UPTD.PPMHP/DISKELKAN tanggal 16 September 2025
 - Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Split 1 PK sebesar Rp. 64,800,000.00 sesuai BAST Nomor: 0040/II/CIP/2025 tanggal 11 Pebruari 2025
 - Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Split 1,5 PK sebesar Rp. 8,600,000.00 sesuai BAST Nomor: 0040/II/CIP/2025 tanggal 11 Pebruari 2025
 - Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Split 2 PK sebesar Rp. 10,500,000.00 sesuai BAST Nomor: 0040/II/CIP/2025 11 tanggal Pebruari 2025
 - Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Aquascape (Aquarium) sebesar Rp. 38,800,000.00 sesuai

BAST Nomor : B.26.000.3/344/Sekret/ Diskelkan tanggal 31 Januari 2025

- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa CCTV sebesar Rp. 37,400,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3/345/Sekret/ Diskelkan tanggal 31 Januari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Gordylin sebesar Rp. 29,880,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3/207/Sekret/ Diskelkan tanggal 20 Januari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa LCD Proyektor sebesar Rp. 17,000,000.00 sesuai BAST Nomor: 0039.1/II/CIP/2025 tanggal 11 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa TV sebesar Rp. 69,400,000.00 sesuai BAST Nomor : 0039/II/CIP/2025 tanggal 11 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa TV sebesar Rp. 11,400,000.00 sesuai BAST Nomor : 0042.1/II/CIP/2025 tanggal 11 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Sofa sebesar Rp. 73,750,000.00 sesuai BAST Nomor : 025/III/BBT/25 tanggal 05 Maret 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Panasonic 1 PK sebesar Rp. 7,200,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000/1091/Sekret/Diskelkan tanggal 14 Maret 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Panasonic 1,5 PK sebesar Rp. 8,600,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000/1091/Sekret/Diskelkan tanggal 14 Maret 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Panasonic 2 PK sebesar Rp. 21,000,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000/1091/Sekret/Diskelkan tanggal 14 Maret 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Papan Nama Instansi sebesar Rp. 14,800,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000/343/Sekret/Diskelkan tanggal 11 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Papan Nama Instansi sebesar Rp. 44,250,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000/891/Sekret/Diskelkan tanggal 11 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Meja Kerja Kayu sebesar Rp. 6,000,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000/883/Sekret/Diskelkan tanggal 17 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Kursi Rapat sebesar Rp. 38,500,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000/883/Sekret/Diskelkan tanggal 17 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Meja 1/2 Biro sebesar Rp. 15,300,000.00 sesuai BAST Nomor: B.26.000/883/Sekret/Diskelkan tanggal 17 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Camera Conference sebesar Rp. 77,000,000.00 sesuai BAST Nomor : 07.1/BAST-DP/I/2025 tanggal 05 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Camera Digital sebesar Rp. 41,300,000.00 sesuai BAST Nomor

: B.26.000.3/348/Sekret/Diskelkan tanggal 31 Januari 2025

- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Oven Laboratorium sebesar Rp. 50,505,000.00 sesuai BAST Nomor : 00023/GSI/PPK/2025 tanggal 15 Mei 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Freezer sebesar Rp. 9,000,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000/417/UPTD.PPMHP/DISKELKAN tanggal 26 Juni 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Termometer Digital sebesar Rp. 2,136,750.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3/839/UPTD.PPMHP/DISKELKAN tanggal 29 Oktober 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Drone sebesar Rp. 6,100,000.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3/350/Sekret/ Diskelkan tanggal 31 Januari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Lap Top sebesar Rp. 93,750,000.00 sesuai BAST Nomor : 0041/II/CIP/25 tanggal 11 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa PC Unit sebesar Rp. 76,800,000.00 sesuai BAST Nomor : 0043/II/CIP/25 tanggal 11 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa PC Unit sebesar Rp. 196,000,000.00 sesuai BAST Nomor : 0039.3/II/CIP/25 tanggal 11 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Laptop sebesar Rp. 18,750,000.00 sesuai BAST Nomor : 0228/II/CIP/2025 tanggal 28 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa PC Unit sebesar Rp. 19,600,000.00 sesuai BAST Nomor : 105/CIP/II/2025 tanggal 17 Pebruari 2025
- Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Printer sebesar Rp. 14,900,000.00 sesuai BAST Nomor : 104/CIP/II/2025 tanggal 17 Pebruari 2025
-

5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	2.255.000.000,00	2.126.305.533,00	94,29	0,00
Jumlah	2.255.000.000,00	2.126.305.533,00	94,29	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.126.305.533,00. berikut penjelasannya:

- 1) Peningkatan yang signifikan disebabkan oleh anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung di TA 2025 yang

sebelumnya tidak dianggarkan pada TA 2024.

- 2) Belanja Modal Bangunan Gedung tersebut termasuk di dalamnya Belanja Konstruksi, Perencanaan, dan Pengawasan yang masuk nilai kapitalisasi belanja modal, terdiri atas rincian berikut:
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Utama) sebesar Rp. 151,786,466.10 sesuai BA Nomor : B.26.000.2.3.2/13273/Sekret/Diskelkan tanggal 31 Desember 2025
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Tengah) sebesar Rp. 671,093,215.76 sesuai BA Nomor : B.26.000.2.3.2/13273/Sekret/Diskelkan tanggal 31 Desember 2025
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Blakang) sebesar Rp. 360,858,709.05 sesuai BA Nomor : B.26.000.2.3.2/13273/Sekret/Diskelkan tanggal 31 Desember 2025
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Gedung Pos Jaga Permanen sebesar Rp. 36,596,867.00 sesuai BA Nomor : B.26.000.2.3.2/13273/Sekret/Diskelkan tanggal 31 Desember 2025
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Tempat Parkir (Parkir Mobil Blakang) sebesar Rp. 96,736,674.10 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3.2/13180/Sekret/Diskelkan tanggal 26 Desember 2025
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Tempat Parkir (Parkir Motor Barat) sebesar Rp. 29,422,334.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3.2/13180/Sekret/Diskelkan tanggal 26 Desember 2025
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Tempat Parkir (Parkir Motor Gedung Timur) sebesar Rp. 39,104,405.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3.2/13180/Sekret/Diskelkan tanggal 26 Desember 2025
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pagar Permanen (Tembok Penyengker) sebesar Rp. 489.809.656,00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3.2/13180/Sekret/Diskelkan tanggal 26 Desember 2025
- 3) Tingginya capaian Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut hampir mencapai pagu yang dianggarkan.

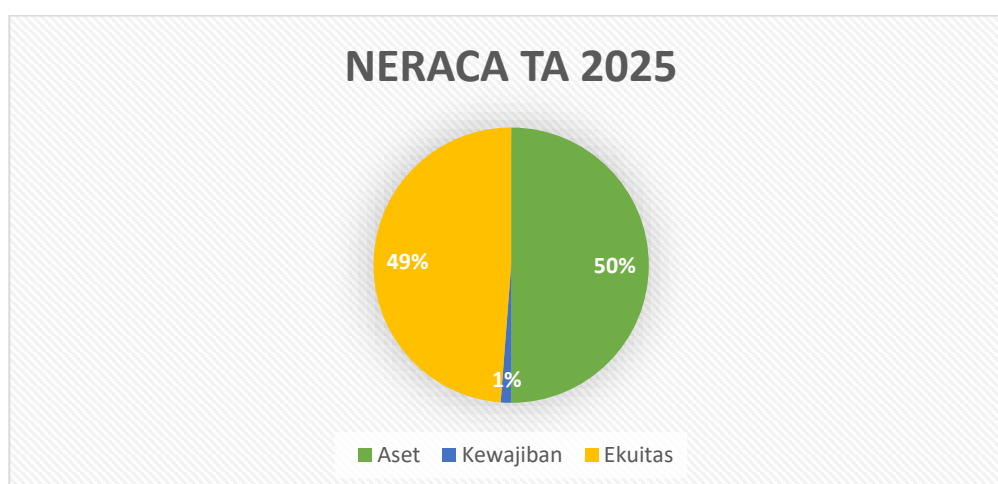
5.1.3. Surplus / Defisit LRA

Dari Pendapatan-LRA dan Beban-LRA selama periode Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengalami Defisit sebesar Rp28.425.291.205,00.

5.2. NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

ASET	43.546.550.305,59	KEWAJIBAN	1.062.340.709,74
		EKUITAS	42.484.209.595,85
TOTAL	43.546.550.305,59	TOTAL	43.546.550.305,59



5.2.1 ASET

Saldo ASET yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET LANCAR	168.902.675,00	234.640.850,00	(65.738.175,00)	(28,02)
ASET TETAP	42.734.926.358,59	41.751.461.900,59	983.464.458,00	2,36
ASET LAINNYA	642.721.272,00	368.651.700,00	274.069.572,00	74,34
Jumlah	43.546.550.305,59	42.354.754.450,59	1.191.795.855,00	2,81

Tabel tersebut menunjukkan ASET per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.191.795.855,00 atau 2,81%.

Komponen ASET LAINNYA mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp274.069.572,00 atau 74,34% yang disebabkan terdapat sejumlah aset tetap yang direklasifikasikan menjadi aset lainnya karena dalam keadaan rusak berat.

5.2.1.1 ASET LANCAR

Saldo ASET LANCAR yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Daerah	0,00	7.525.000,00	(7.525.000,00)	(100,00)
Penyisihan Piutang	0,00	(7.525.000,00)	7.525.000,00	(100,00)
Persediaan	168.902.675,00	234.640.850,00	(65.738.175,00)	(28,02)
Jumlah	168.902.675,00	234.640.850,00	(65.738.175,00)	(28,02)

Tabel tersebut menunjukkan ASET LANCAR per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp65.738.175,00) atau (28,02%).

Komponen Piutang Retribusi Daerah dan Penyisihan Piutang mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%) karena adanya penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu secara bersyarat.

5.2.1.1.1 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	7.525.000,00	(7.525.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	7.525.000,00	(7.525.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%).

Komponen Piutang Retribusi Perizinan Tertentu mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%) karena adanya penghapusan Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan secara bersyarat.

5.2.1.1.1.1 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	7.525.000,00	(7.525.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	7.525.000,00	(7.525.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%).

Penjelasan saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Saldo Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang ada pada TA 2024 tergolong sebagai piutang macet dan tak tertagih, karena debitur yang berjumlah delapan orang wajib retribusi seluruhnya dalam keadaan pailit, dan ada yang sudah meninggal dunia.

- 2) Saldo Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dihapuskan secara bersyarat pada TA 2025 melalui SK Gubernur Nomor 1026/04-E/HK/2025 tanggal 29 Desember 2025.

5.2.1.1.2 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	(7.525.000,00)	7.525.000,00	(100,00)
Jumlah	0,00	(7.525.000,00)	7.525.000,00	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%) karena adanya penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu secara bersyarat.

5.2.1.1.2.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(7.525.000,00)	7.525.000,00	(100,00)
Jumlah	0,00	(7.525.000,00)	7.525.000,00	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%). Dengan dihapuskannya Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan secara bersyarat seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka saldo Penyisihan Piutang Retribusi yang telah dicadangkan mengikuti juga berkurang sejumlah saldo piutang yang dihapuskan tersebut sehingga menjadi 0 di akhir TA 2025.

5.2.1.1.3 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	168.902.675,00	234.640.850,00	(65.738.175,00)	(28,02)
Jumlah	168.902.675,00	234.640.850,00	(65.738.175,00)	(28,02)

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp65.738.175,00) atau (28,02%). Rincian daftar saldo masing-masing persediaan dapat dilihat dalam Lampiran III Persediaan.

5.2.1.1.3.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan	137.332.150,00	184.971.250,00	(47.639.100,00)	(25,75)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	22.526.535,00	3.722.700,00	18.803.835,00	505,11
Obat-obatan	4.188.800,00	0,00	4.188.800,00	0,00
Natura dan Pakan	4.855.190,00	45.946.900,00	(41.091.710,00)	(89,43)
Jumlah	168.902.675,00	234.640.850,00	(65.738.175,00)	(28,02)

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp65.738.175,00) atau (28,02%) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp18.803.835,00 atau 505,11%. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor terdiri dari Alat Tulis Kantor, Ketas dan Cover, Bahan Cetak untuk fotocopy dan spanduk Gemarikan, Benda Pos, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Alat Listrik, dan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya. Terdapat sisa pemakaian dari pengadaan belanja alat/bahan tersebut sehingga membuat saldo Barang Pakai Habis meningkat.
- 2) Komponen Obat-obatan mengalami saldo baru sebesar Rp4.188.800,00 atau 0,00% karena terdapat realisasi Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya beserta pemakaiannya di TA 2025 yang tidak terdapat pada TA 2024.
- 3) Komponen Natura dan Pakan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp41.091.710,00) atau (89,43%) karena pemakaian dan pada TA 2025 tidak ada realisasi belanja Belanja Natura dan Pakan-Natura seperti pada TA 2024.

5.2.1.2 ASET TETAP

Saldo ASET TETAP yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	5.479.783.250,00	5.479.783.250,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	17.946.699.154,51	22.349.724.779,51	(4.403.025.625,00)	(19,70)
Gedung dan Bangunan	24.658.329.149,08	22.950.748.326,08	1.707.580.823,00	7,44
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.078.311.164,69	39.324.062.164,69	2.754.249.000,00	7,00
Akumulasi Penyusutan	(47.428.196.359,69)	(48.352.856.619,69)	924.660.260,00	(1,91)
Jumlah	42.734.926.358,59	41.751.461.900,59	983.464.458,00	2,36

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp983.464.458,00 atau 2,36%. Penjelasan saldo ASET TETAP beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peralatan dan Mesin

- Terdapat mutasi tambah senilai Rp1.143.577.589,00 dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta

Koreksi Pencatatan Saldo Awal Alat Laboratorium senilai Rp 20.916.485,00 dengan Berita Acara Nomor B.22.000/655/PPMHP/Diskelkan tanggal 3 September 2025.

- Terdapat mutasi kurang senilai Rp 5.567.519.699,00 akibat adanya Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya karena dalam keadaan rusak berat. Berita Acara reklasifikasinya dapat diamati pada Lampiran.

2) Gedung dan Bangunan

- Terdapat mutasi tambah senilai Rp 2.126.305.533,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sesuai Berita Acara Kapitalisasi Nomor : B.26.000.2.3.2/13273/Sekret/Diskelkan tanggal 31 Desember 2025.
- Terdapat mutasi kurang senilai Rp 418.724.710,00 akibat adanya Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya karena dalam keadaan rusak berat. Berita acara reklasifikasinya dapat diamati pada Lampiran.

3) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- Terdapat mutasi tambah karena adanya Hibah Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Dermaga Tanjung Benoa dari Pemerintah Kabupaten Badung senilai Rp2.754.249.000,00 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor B.31.000.2.3.2/1568/PBMD/BPKAD tanggal 05 Maret 2025.

4) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2025, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD. Nilai Saldo Awal Akumulasi Penyusutan adalah Rp48.352.856.619,69. Beban penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp4.787.514.577,00 dan dikurangi mutasi kurang akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke aset lainnya sejumlah Rp5.712.174.837,00 berdasarkan Berita Acara Reklas terlampir. Sehingga saldo akhir penyusutan sebesar Rp47,428,196,359.69 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Saldo ASET LAINNYA yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	261.551.700,00	261.551.700,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	6.451.953.324,00	465.708.915,00	5.986.244.409,00	1.285,40
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(6.070.783.752,00)	(358.608.915,00)	(5.712.174.837,00)	1.592,87
Jumlah	642.721.272,00	368.651.700,00	274.069.572,00	74,34

Tabel di atas menunjukkan ASET LAINNYA per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp274.069.572,00 atau 74,34%. Komponen Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp5.986.244.409,00 atau 1.285,40% dan 1.592,87% karena di

dalamnya terdapat aset yang direklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan beserta penyusutannya.

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	261.551.700,00	261.551.700,00	0,00	0,00
Jumlah	261.551.700,00	261.551.700,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami mutasi penambahan dan pengurangan pada tahun 2025 sehingga saldo di akhir TA 2024 dan TA 2025 tetap sama.

5.2.1.3.1.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Software	261.551.700,00	261.551.700,00	0,00	0,00
Jumlah	261.551.700,00	261.551.700,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 berupa Software tidak mengalami mutasi penambahan dan pengurangan pada tahun 2025 sehingga saldo di akhir TA 2024 dan TA 2025 tetap sama.

5.2.1.3.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lain-lain	6.451.953.324,00	465.708.915,00	5.986.244.409,00	1.285,40
Jumlah	6.451.953.324,00	465.708.915,00	5.986.244.409,00	1.285,40

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.986.244.409,00 atau 1.285,40%. Peningkatan signifikan ini terjadi akibat adanya reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan menjadi Aset Lainnya karena dalam keadaan rusak berat.

5.2.1.3.2.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Rusak Berat/Usang	6.344.853.324,00	358.608.915,00	5.986.244.409,00	1.669,30
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	107.100.000,00	107.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.451.953.324,00	465.708.915,00	5.986.244.409,00	1.285,40

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.986.244.409,00 atau 1.285,40%. Dari tabel dapat dilihat lebih rinci bahwa reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya seperti yang telah dijabarkan sebelumnya menambah saldo pos Aset Rusak Berat/Usang secara signifikan. Berita Acara Reklasifikasi aset-aset tersebut terlampir.

5.2.1.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(6.070.783.752,00)	(358.608.915,00)	(5.712.174.837,00)	1.592,87
Jumlah	(6.070.783.752,00)	(358.608.915,00)	(5.712.174.837,00)	1.592,87

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.712.174.837,00 atau 1.592,87%. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya yaitu Aset Rusak Berat/Usang, membawa juga akumulasi Penyusutannya sehingga menambah saldo pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya secara signifikan, karena aset yang direklasifikasikan dalam keadaan rusak berat dan hampir tidak memiliki nilai buku

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo KEWAJIBAN yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.062.340.709,74	853.926.352,86	208.414.356,88	24,41
Jumlah	1.062.340.709,74	853.926.352,86	208.414.356,88	24,41

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp208.414.356,88 atau 24,41%. Penjelasan saldo KEWAJIBAN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo KEWAJIBAN JANGKA PENDEK yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka	113.944.112,74	118.200.961,86	(4.256.849,12)	(3,60)
Utang Belanja	948.396.597,00	735.725.391,00	212.671.206,00	28,91
Jumlah	1.062.340.709,74	853.926.352,86	208.414.356,88	24,41

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp208.414.356,88 atau 24,41%. Penjelasan saldo KEWAJIBAN JANGKA PENDEK beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	113.944.112,74	118.200.961,86	(4.256.849,12)	(3,60)
Jumlah	113.944.112,74	118.200.961,86	(4.256.849,12)	(3,60)

Tabel tersebut menunjukkan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp4.256.849,12) atau (3,60%). Penurunan saldo ini dikarenakan terdapat bagian Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III yang diakui sebagai pendapatan yaitu Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan sejumlah 4.256.849,12 pada TA 2025. Rinciannya dapat diamati pada Lampiran V: Rekap Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025.

5.2.2.1.2 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	948.273.541,00	730.780.248,00	217.493.293,00	29,76
Utang Belanja Barang dan Jasa	123.056,00	4.945.143,00	(4.822.087,00)	(97,51)
Jumlah	948.396.597,00	735.725.391,00	212.671.206,00	28,91

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp212.671.206,00 atau 28,91%. Penjelasan saldo Utang Belanja beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1.2.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	88.522.153,00	20.127.789,00	68.394.364,00	339,80
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	859.751.388,00	710.652.459,00	149.098.929,00	20,98
Jumlah	948.273.541,00	730.780.248,00	217.493.293,00	29,76

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp217.493.293,00 atau 29,76%. Penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Komponen Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp68.394.364,00 atau 339,80% karena jumlah saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp88.522.153,00 terdiri dari utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS yang merupakan utang BPJS 4% PNS TPP Desember 2025 sebesar Rp20.924.255,00, utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp 5.351.092,00, utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp 61.521.206,00 yang

merupakan besaran atas TPP PNS Bulan Desember 2025. Selain itu adapun Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp 725.600,00.

- 2) Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2025 terdiri dari utang tambahan penghasilan atas bulan Desember 2025 yang telah dianggarkan pada tahun berikutnya. Utang tersebut terdiri dari utang Belanja Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS dan PPPK, utang Belanja Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja PNS, dan utang Belanja Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS dan PPPK. Rinciannya adalah sebagai berikut.

- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp451.353.894,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp9.3932.992,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebesar Rp74.313.499,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp200.306.700,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebesar Rp39.844.303,00

5.2.2.1.2.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa	123.056,00	4.945.143,00	(4.822.087,00)	(97,51)
Jumlah	123.056,00	4.945.143,00	(4.822.087,00)	(97,51)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp4.822.087,00) atau (97,51%). Penjelasan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 senilai Rp123.056,00 terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor Pengolahan Air Limbah pada Dinas sebesar Rp70.000,00 dan Belanja Jasa Kantor Tagihan Air pada UPTD Kawasan Konservasi Provinsi sebesar Rp53.056,00.

5.2.3 EKUITAS

Saldo EKUITAS yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
EKUITAS	42.484.209.595,85	41.500.828.097,73	983.381.498,12	2,37
Jumlah	42.484.209.595,85	41.500.828.097,73	983.381.498,12	2,37

Tabel di atas menunjukkan saldo EKUITAS per 31 Desember 2025 yang merupakan saldo ekuitas atau kekayaan bersih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang merupakan selisih antara asset dan

kewajiban pemerintah per tanggal neraca. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Catatan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 PENDAPATAN

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang. Jumlah Pendapatan-LO Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.850.028.643,12	3.213.405.164,45	(363.376.521,33)	(11,31)
Jumlah	2.850.028.643,12	3.213.405.164,45	(363.376.521,33)	(11,31)

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp363.376.521,33) atau (11,31%). Penjelasan saldo PENDAPATAN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Daerah-LO	2.850.028.643,12	3.213.335.132,45	(363.306.489,33)	(11,31)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	70.032,00	(70.032,00)	(100,00)
Jumlah	2.850.028.643,12	3.213.405.164,45	(363.376.521,33)	(11,31)

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp363.376.521,33) atau (11,31%) karena menurunnya realisasi Pendapayam Retribusi Daerah-LO akibat beberapa faktor eksternal. Sementara komponen Lain-lain PAD yang Sah-LO mengalami penurunan signifikan (100,00%) karena pada TA 2025 tidak terdapat realisasi PAD lain selain Retribusi Daerah, seperti pendapatan denda di TA sebelumnya.

5.3.1.1.1 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Jasa Usaha-LO	2.845.771.794,00	3.157.582.660,00	(311.810.866,00)	(9,87)
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	4.256.849,12	55.752.472,45	(51.495.623,33)	(92,36)
Jumlah	2.850.028.643,12	3.213.335.132,45	(363.306.489,33)	(11,31)

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp363.306.489,33) atau (11,31%). Selain Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dari aktivitas operasional Dinas Kelautan dan Perikanan yang menghasilkan pendapatan, terdapat PAD dari pengakuan bagian Pendapatan Diterima Dimuka pada TA 2025 sebagai Pendapatan Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan sejumlah Rp4.256.849,12.

5.3.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha-LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Jasa Usaha-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	65.651.500,00	28.049.000,00	37.602.500,00	134,06
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	1.777.215.000,00	2.397.010.000,00	(619.795.000,00)	(25,86)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	148.224.000,00	110.367.000,00	37.857.000,00	34,30
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	854.681.294,00	622.156.660,00	232.524.634,00	37,37
Jumlah	2.845.771.794,00	3.157.582.660,00	(311.810.866,00)	(9,87)

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp311.810.866,00) atau (9,87%). Penjelasan saldo Retribusi Jasa Usaha-LO beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Komponen Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO mengalami penurunan sebesar Rp619.795.000,00 karena beberapa faktor eksternal, khususnya perubahan cuaca ekstrim di tengah dan selama akhir tahun 2025. Hal ini menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan domestik maupun internasional. Meningkatnya popularitas destinasi di provinsi lain seperti Banyuwangi, Lombok, dan Nusa Tenggara juga mendorong persaingan yang turut memengaruhi minat wisatawan terhadap aktivitas *snorkeling* dan kegiatan wisata lainnya di Nusa Penida. Akibatnya penjualan tiket Kawasan Konservasi menurun, sehingga pendapatan retribusi TA 2025 pun berkurang.
- 2) Komponen Pemanfaatan Aset Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp232.524.634,00 karena pada tahun 2025 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali ditunjuk sebagai salah satu Laboratorium Official Control oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pelaksanaan survailence sample untuk logam berat, histamin dan E.coli diarahkan ke UPTD PPMHP dan menambah pendapatan retribusi secara signifikan dibandingkan TA sebelumnya.

5.3.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari Pos Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	70.032,00	(70.032,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	70.032,00	(70.032,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp70.032,00) atau (100,00%). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saldo Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 tersebut berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha yaitu denda keterlambatan pembayaran Retribusi Sewa Kantin. Sementara itu di tahun 2025 tidak terdapat lagi pendapatan serupa.

5.2.2 BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
BEBAN OPERASI	28.279.589.258,00	27.784.418.146,00	495.171.112,00	1,78
Jumlah	28.279.589.258,00	27.784.418.146,00	495.171.112,00	1,78

Tabel di atas menunjukkan BEBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp495.171.112,00 atau 1,78%. Seluruh Beban yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada tahun 2025 berasal dari kegiatan operasional.

5.3.2.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN OPERASI Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN OPERASI yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pegawai	21.759.219.902,00	18.845.492.114,00	2.913.727.788,00	15,46
Beban Barang dan Jasa	6.170.369.356,00	8.533.926.032,00	(2.363.556.676,00)	(27,70)
Beban Hibah	350.000.000,00	405.000.000,00	(55.000.000,00)	(13,58)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.012.349.092,00	2.952.943.556,00	(940.594.464,00)	(31,85)
Jumlah	30.291.938.350,00	30.737.361.702,00	(445.423.352,00)	(1,45)

Tabel di atas menunjukkan BEBAN OPERASI per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp445.423.352,00) atau (1,45%). Penjelasan saldo BEBAN OPERASI beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	10.204.923.658,00	7.995.250.576,00	2.209.673.082,00	27,64
Beban Tambahan Penghasilan ASN	11.554.296.244,00	10.765.341.538,00	788.954.706,00	7,33
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	84.900.000,00	(84.900.000,00)	(100,00)
Jumlah	21.759.219.902,00	18.845.492.114,00	2.913.727.788,00	15,46

- 1) Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih tinggi dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp217.493.293,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa- peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 (Neraca)	948.273.541,00
--	----------------

Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 (Neraca)	(730.780.248,00)
--	------------------

Jumlah Selisih **Rp217.493.293,00**

- 2) Penurunan signifikan Komponen Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN disebabkan karena perubahan klasifikasi pada Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dan Honorarium Penanggungjawab Keuangan yang awalnya bagian beban pegawai menjadi beban barang dan jasa sehingga mempengaruhi besaran beban pegawai.

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Barang	2.275.709.539,00	2.695.158.950,00	(419.449.411,00)	(15,56)
Beban Jasa	3.024.515.842,00	3.227.396.225,00	(202.880.383,00)	(6,29)
Beban Pemeliharaan	530.242.675,00	2.073.432.712,00	(1.543.190.037,00)	(74,43)
Beban Perjalanan Dinas	289.799.650,00	537.938.145,00	(248.138.495,00)	(46,13)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.101.650,00	0,00	50.101.650,00	0,00
Jumlah	6.170.369.356,00	8.533.926.032,00	(2.363.556.676,00)	(27,70)

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.363.556.676,00) atau (27,70%). Penjelasan saldo Beban Barang dan Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Komponen Beban Pemeliharaan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp1.543.190.037,00) atau (74,43%) karena tidak dianggarkannya kembali sejumlah pos-pos belanja pemeliharaan sehingga pembebanannya juga berkurang secara signifikan.
- 2) Komponen Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan signifikan sebesar 46,13% karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan arahan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% sehingga besaran anggaran perjalanan dinas dikurangi. Ini juga mempengaruhi realisasinya yang lebih rendah dibandingkan TA 2024 sehingga mempengaruhi besar bebannya.
- 3) Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini lebih tinggi dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp60.916.088,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO

-	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 (Neraca)	123.056,00	
-	Persediaan Awal Barang Tahun 2025 (Neraca)	234.640.850,00	

Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO

-	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 (Neraca)	(4.945.143,00)	
-	Persediaan Barang Tahun 2024 (Neraca)	(168.902.675,00)	
	Jumlah Selisih		Rp60.916.088

5.3.2.1.3 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000,00	405.000.000,00	(55.000.000,00)	(13,58)
Jumlah	350.000.000,00	405.000.000,00	(55.000.000,00)	(13,58)

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp55.000.000,00) atau (13,58%) karena penurunan besar anggaran belanja hibah di tahun 2025. Beban hibah tersebut yang rinciannya berupa Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan diserahkan dalam bentuk Uang ditujukan kepada sejumlah kelompok nelayan, yaitu:

- Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Bali di Kabupaten Badung sejumlah Rp300.000.000,00 dengan berdasarkan SK Gubernur Nomor 116/03-R/HK/2025 tanggal 29 April 2025 dan Nomor NPHD 164.U/03-R/2025 tanggal 23 Mei 2025.
- Kelompok Nelayan Banyu Mas di Kabupaten Jembrana sejumlah Rp50.000.000,00 dengan berdasarkan SK Gubernur Nomor 193/03-R/HK/2025 tanggal 3 Oktober 2025 dan Nomor NPHD 330.U/03-R/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

5.3.2.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.087.859.067,00	763.967.268,00	323.891.799,00	42,40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	433.045.613,00	443.613.045,00	(10.567.432,00)	(2,38)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	491.444.412,00	1.745.363.243,00	(1.253.918.831,00)	(71,84)
Jumlah	2.012.349.092,00	2.952.943.556,00	(940.594.464,00)	(31,85)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp940.594.464,00) atau (31,85%). Komponen Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp1.253.918.831,00) atau (71,84%).

5.2.4. Surplus (Defisit) LO

Dari Pendapatan-LO kegiatan Operasional maupun Beban-LO kegiatan Operasional selama periode Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Balimengalami Defisit sebesar Rp27.441.909.706,88.

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

Uraian	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Ekuitas Awal	41.500.828.097,73	41.516.484.191,14
Surplus (Defisit-LO)	(27.441.909.706,88)	(27.523.956.537,55)
RK-PPKD	28.425.291.205,00	26.677.645.391,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
- Lain-lain	0,00	830.655.053,14
Ekuitas Akhir	42.484.209.595,85	41.500.828.097,73

- Ekuitas Awal pada LPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 Rp41.500.828.097,73.
- Defisit LO Tahun 2025 yang mengurangi ekuitas sebesar Rp27.441.909.706,88.
- RK-PPKD menambah ekuitas yang merupakan Defisit LRA OPD TA 2025 sebesar Rp 28.425.291.205,00.
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan sebesar Rp0,00
- Ekuitas Akhir pada LPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 Rp42.484.209.595,85.

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali beralamat di Jalan Patimura Nomor 77, Denpasar Utara.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi;
 - c. Penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
4. Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga harian lepas adalah :
 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan :

No.	Jabatan	Jumlah	Golongan (PNS)	Jumlah
1	Eselon II	1	IV	19
2	Eselon III	9	III	65
3	Eselon IV	13	II	10
4	Fungsional Madya	9	I	-
5	Fungsional Muda	5	Jumlah	94
6	Fungsional Pratama	4	Golongan (PPPK)	Jumlah
7	Staf PNS	67	XI	1
	PPPK	44	IX	28
	Jumlah		VII	8
			V	5
			I	2

	Jumlah	44
--	--------	----

2. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Setrata 3 (S3)	2
2	Setrata 2 (S2)	22
3	Setrata 1 (S1)	27
4	Sarjana Muda (D3)	3
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP)	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		61

3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat untuk PNS :

No.	Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	5
4	Pembina (IV/a)	13
5	Penata Tingkat I (III/d)	11
6	Penata (III/c)	4
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
8	Penata Muda (III/a)	10
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
10	Pengatur (II/c)	5
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
12	Pengatur Muda (II/a)	-
13	Juru Tingkat I (I/d)	-
14	Juru (I/c)	-
15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
16	Juru Muda (I/a)	-
	PPPK Gol XI	1
	PPPK Gol IX	28
17	PPPK Gol VII	8
18	PPPK Gol V	5
	PPPK Gol I	2
Jumlah		61

5. Jumlah pegawai Tenaga Kontrak :

No.	Pendidikan	Kontrak
1	Setrata 2 (S2)	3
2	Setrata 1 (S1)	31
3	Diploma 3 (D3)	-
4	SLTA	18
5	SLTP	-
Jumlah		52

6. Jenis kelamin pegawai :

PNS dan PPPK

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	31
2	Perempuan	30
Jumlah		61

Tenaga Kontrak

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	31
2	Perempuan	21
Jumlah		52



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3,162,272,000.00	2,845,771,794.00	89.99	3,157,652,692.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,162,272,000.00	2,845,771,794.00	89.99	3,157,652,692.00
4.1.02	Retribusi Daerah	3,162,272,000.00	2,845,771,794.00	89.99	3,157,582,660.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3,162,272,000.00	2,845,771,794.00	89.99	3,157,582,660.00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	43,272,000.00	65,651,500.00	151.72	28,049,000.00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	43,272,000.00	65,651,500.00	151.72	28,049,000.00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2,594,000,000.00	1,777,215,000.00	68.51	2,397,010,000.00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2,594,000,000.00	1,777,215,000.00	68.51	2,397,010,000.00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	125,000,000.00	148,224,000.00	118.58	110,367,000.00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	125,000,000.00	148,224,000.00	118.58	110,367,000.00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	400,000,000.00	854,681,294.00	213.67	622,156,660.00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	400,000,000.00	854,681,294.00	213.67	622,156,660.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	70,032.00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	70,032.00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	70,032.00
4.1.04.13.02.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	0.00	0.00	0.00	70,032.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,162,272,000.00	2,845,771,794.00	89.99	3,157,652,692.00
	JUMLAH PENDAPATAN	3,162,272,000.00	2,845,771,794.00	89.99	3,157,652,692.00
5	BELANJA DAERAH	36,095,008,934.20	31,271,062,999.00	86.64	29,848,908,083.00
5.1	BELANJA OPERASI	32,647,153,934.20	28,001,179,877.00	85.77	28,321,473,173.00
5.1.01	Belanja Pegawai	25,619,548,375.20	21,541,726,609.00	84.08	18,966,480,223.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12,500,503,604.20	10,136,529,294.00	81.09	7,999,460,323.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok ASN	7,969,086,619.03	6,806,975,867.00	85.42	5,979,559,442.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,710,418,182.00	1,422,261,132.00	83.15	214,637,700.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	653,061,906.79	553,825,964.00	84.80	502,533,292.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	545,940,750.79	465,994,810.00	85.36	492,067,878.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	107,121,156.00	87,831,154.00	81.99	10,465,414.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	309,300,000.00	264,540,000.00	85.53	219,340,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	309,300,000.00	264,540,000.00	85.53	219,340,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	257,570,164.00	226,700,164.00	88.01	210,530,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	201,066,000.00	177,296,000.00	88.18	199,880,000.00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	56,504,164.00	49,404,164.00	87.43	10,650,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	234,209,795.78	197,940,000.00	84.51	173,595,522.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	176,254,795.78	153,515,000.00	87.10	173,595,522.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	57,955,000.00	44,425,000.00	76.65	0.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	362,347,377.00	309,553,208.00	85.43	272,154,360.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	81,719,937.00	67,960,135.00	83.16	8,762,820.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1,330,337,445.95	1,155,522,600.00	86.86	83,541,220.00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,273,883,253.00	1,119,441,363.00	87.88	83,541,220.00
5.1.01.01.07.0003	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	56,454,192.95	36,081,237.00	63.91	0.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	101,838.00	87,686.00	86.10	67,909.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	66,824.00	58,438.00	87.45	63,957.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	35,014.00	29,248.00	83.53	3,952.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1,285,472,884.34	564,750,265.00	43.93	508,831,120.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1,082,153,481.71	463,908,446.00	42.87	499,401,002.00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	203,319,402.63	100,841,819.00	49.60	9,430,118.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	19,003,860.00	14,158,363.00	74.50	12,326,776.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14,796,202.40	11,073,949.00	74.84	11,811,631.00
5.1.01.01.10.0003	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	4,207,657.60	3,084,414.00	73.30	515,149.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	57,011,662.06	42,475,177.00	74.50	36,980,682.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	44,388,833.21	33,222,239.00	74.84	35,435,296.00
5.1.01.01.11.0003	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	12,622,828.85	9,252,938.00	73.30	1,545,387.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	22,999,991.25	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	17,347,640.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	5,652,351.25	0.00	0.00	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13,119,044,771.00	11,405,197,315.00	86.94	10,882,119,900.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8,053,177,591.00	7,232,311,854.00	89.81	7,006,968,224.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7,146,363,072.00	6,388,433,495.00	89.39	7,006,968,224.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	906,814,519.00	843,878,359.00	93.06	0.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1,201,722,015.00	1,038,284,459.00	86.40	1,044,572,980.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1,201,722,015.00	1,038,284,459.00	86.40	1,044,572,980.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3,614,636,950.00	3,134,601,002.00	86.72	2,830,578,696.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3,216,351,833.00	2,776,646,413.00	86.33	2,830,578,696.00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	398,285,117.00	357,954,589.00	89.87	0.00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	249,508,215.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	249,508,215.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00	84,900,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00	53,100,000.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0.00	53,100,000.00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0.00	0.00	0.00	31,800,000.00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0.00	0.00	0.00	31,800,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,677,605,559.00	5,109,453,268.00	91.49	8,949,992,950.00
5.1.02.01	Belanja Barang	2,432,074,800.00	2,209,971,364.00	90.87	2,970,040,700.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,421,774,800.00	2,201,535,364.00	90.91	2,869,090,700.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	203,051,600.00	169,347,750.00	83.40	171,867,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	617,056,000.00	592,357,100.00	96.00	639,296,050.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	18,000,000.00	12,625,001.00	70.14	0.00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	237,680,000.00	226,260,000.00	95.20	300,000,000.00

5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0.00	0.00	0.00	439,393,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25,216,600.00	19,532,065.00	77.46	24,441,550.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39,429,600.00	31,635,612.00	80.23	24,317,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	58,932,400.00	40,640,137.00	68.96	14,700,000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,446,600.00	5,380,000.00	63.69	7,380,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	80,247,100.00	47,529,000.00	59.23	35,595,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13,686,300.00	11,927,500.00	87.15	44,287,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	34,328,900.00	15,949,667.00	46.46	39,056,500.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	234,422,900.00	213,475,497.00	91.06	540,188,300.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	26,421,800.00	26,218,000.00	99.23	0.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	360,910,000.00	344,328,635.00	95.41	286,707,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	367,790,000.00	361,113,800.00	98.18	227,959,700.00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	17,900,000.00	15,800,000.00	88.27	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72,630,000.00	61,790,600.00	85.08	57,987,600.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5,625,000.00	5,625,000.00	100.00	14,250,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	10,300,000.00	8,436,000.00	81.90	100,950,000.00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
5.1.02.01.04.0248	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	10,300,000.00	8,436,000.00	81.90	0.00
5.1.02.01.04.0293	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0.00	0.00	0.00	98,600,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3,238,849,839.00	3,029,337,929.00	93.53	3,222,728,582.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,917,686,458.00	2,720,706,693.00	93.25	3,041,466,273.00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46,800,000.00	45,200,000.00	96.58	0.00
5.1.02.02.01.0003	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	12,400,000.00	10,500,000.00	84.68	2,700,000.00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	41,158,732.00	40,858,732.00	99.27	34,764,064.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0.00	0.00	0.00	278,112,512.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,090,796,350.00	1,037,854,813.00	95.15	1,225,555,912.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	47,000,000.00	47,000,000.00	100.00	33,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	462,260,000.00	458,498,376.00	99.19	453,502,585.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	295,669,856.00	295,669,856.00	100.00	278,112,512.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	369,587,320.00	369,587,320.00	100.00	312,875,576.00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00	26,000,000.00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	13,000,000.00	11,350,000.00	87.31	1,500,000.00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0.00	0.00	0.00	12,220,000.00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0.00	0.00	0.00	18,870,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	31,050,000.00	19,212,449.00	61.88	24,334,137.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	24,000,000.00	11,438,540.00	47.66	15,447,975.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	377,099,200.00	283,932,107.00	75.29	268,063,700.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24,965,000.00	16,254,500.00	65.11	15,406,300.00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	59,400,000.00	50,850,000.00	85.61	0.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	149,705,881.00	145,287,780.00	97.05	178,245,809.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	76,252,650.00	74,009,925.00	97.06	90,798,909.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4,156,976.00	4,034,712.00	97.06	4,949,949.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5,211,661.00	5,043,390.00	96.77	6,187,253.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	64,084,594.00	62,199,753.00	97.06	76,309,698.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,457,500.00	1,440,410.00	98.83	3,016,500.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1,457,500.00	1,440,410.00	98.83	3,016,500.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	170,000,000.00	161,903,046.00	95.24	0.00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	170,000,000.00	161,903,046.00	95.24	0.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	619,155,920.00	530,242,675.00	85.64	2,219,285,523.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	606,510,000.00	523,604,875.00	86.33	364,638,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	324,000,000.00	295,514,845.00	91.21	240,806,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33,600,000.00	23,567,000.00	70.14	0.00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0.00	0.00	0.00	14,705,000.00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	20,240,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0.00	0.00	0.00	57,292,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18,910,000.00	18,453,750.00	97.59	11,555,000.00
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	84,360,000.00	77,700,000.00	92.11	0.00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	50,000,000.00	49,811,250.00	99.62	0.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	44,530,000.00	43,292,790.00	97.22	28,690,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	30,870,000.00	15,265,240.00	49.45	0.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,645,920.00	6,637,800.00	52.48	1,678,882,212.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12,645,920.00	6,637,800.00	52.48	473,802,994.00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat ibadah	0.00	0.00	0.00	93,191,918.00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0.00	0.00	0.00	1,111,882,300.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	179,765,311.00
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0.00	0.00	0.00	145,852,811.00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0.00	0.00	0.00	29,912,500.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	333,525,000.00	289,799,650.00	86.89	537,938,145.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	333,525,000.00	289,799,650.00	86.89	537,938,145.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	321,625,000.00	280,599,650.00	87.24	537,938,145.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,400,000.00	7,700,000.00	74.04	0.00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00

5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54,000,000.00	50,101,650.00	92.78	0.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30,000,000.00	26,101,650.00	87.01	0.00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	30,000,000.00	26,101,650.00	87.01	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00	405,000,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00	405,000,000.00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00	405,000,000.00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00	405,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	32,647,153,934.20	28,001,179,877.00	85.77	28,321,473,173.00
5.2	BELANJA MODAL	3,447,855,000.00	3,269,883,122.00	94.84	1,527,434,910.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,192,855,000.00	1,143,577,589.00	95.87	1,527,434,910.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0.00	0.00	0.00	179,250,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0.00	0.00	0.00	179,250,000.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0.00	0.00	0.00	41,850,000.00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	0.00	0.00	0.00	137,400,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4,400,000.00	2,136,750.00	48.56	0.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	4,400,000.00	2,136,750.00	48.56	0.00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	4,400,000.00	2,136,750.00	48.56	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	525,429,300.00	509,180,000.00	96.91	677,965,900.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	97,718,700.00	96,450,000.00	98.70	364,850,900.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	33,660,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	97,718,700.00	96,450,000.00	98.70	331,190,900.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	427,710,600.00	412,730,000.00	96.50	291,275,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	67,074,400.00	59,800,000.00	89.15	58,824,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	132,619,000.00	129,700,000.00	97.80	56,551,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	228,017,200.00	223,230,000.00	97.90	95,900,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	21,840,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0.00	0.00	0.00	21,840,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	125,993,900.00	124,400,000.00	98.73	182,200,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	125,993,900.00	124,400,000.00	98.73	182,200,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	41,618,500.00	41,300,000.00	99.23	182,200,000.00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	84,375,400.00	83,100,000.00	98.49	0.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	84,660,000.00	71,060,839.00	83.94	0.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	84,660,000.00	71,060,839.00	83.94	0.00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	78,660,000.00	66,904,999.00	85.06	0.00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	6,000,000.00	4,155,840.00	69.26	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	452,371,800.00	436,800,000.00	96.56	455,319,010.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	416,215,200.00	404,900,000.00	97.28	383,839,010.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	416,215,200.00	404,900,000.00	97.28	383,839,010.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	36,156,600.00	31,900,000.00	88.23	71,480,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	36,156,600.00	31,900,000.00	88.23	71,480,000.00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	32,700,000.00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	32,700,000.00
5.2.02.14.01.0003	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Lainnya	0.00	0.00	0.00	32,700,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,255,000,000.00	2,126,305,533.00	94.29	0.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2,255,000,000.00	2,126,305,533.00	94.29	0.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2,255,000,000.00	2,126,305,533.00	94.29	0.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2,255,000,000.00	2,126,305,533.00	94.29	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3,447,855,000.00	3,269,883,122.00	94.84	1,527,434,910.00
	JUMLAH BELANJA	36,095,008,934.20	31,271,062,999.00	86.64	29,848,908,083.00
	SURPLUS/DEFISIT	(32,932,736,934.20)	(28,425,291,205.00)	86.31	(26,691,255,391.00)

Provinsi Bali, 31 Desember 2025
PENERINPAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP. [REDACTED]



Dinas Kelautan dan Perikanan
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening		Uraian	2025	2024	Dalam Rupiah	
KEGIATAN OPERASIONAL					Kenaikan / Penurunan	%
7		PENDAPATAN				
7.1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.850.028.643,12	3.213.405.164,45	(363.376.521,33)	(11,31)
7.1.02		Retribusi Daerah-LO	2.850.028.643,12	3.213.405.164,45	(363.376.521,33)	(11,31)
7.1.02.02		Retribusi Jasa Usaha-LO	2.850.028.643,12	3.213.335.132,45	(363.306.489,33)	(11,31)
7.1.02.02.16		Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	2.845.771.794,00	3.157.582.660,00	(311.810.866,00)	(9,87)
7.1.02.02.16.0001		Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	65.651.500,00	28.049.000,00	37.602.500,00	134,06
7.1.02.02.17		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	65.651.500,00	28.049.000,00	37.602.500,00	134,06
7.1.02.02.17.0001		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	1.777.215.000,00	2.397.010.000,00	(619.795.000,00)	(25,86)
7.1.02.02.19		Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	1.777.215.000,00	2.397.010.000,00	(619.795.000,00)	(25,86)
7.1.02.02.19.0001		Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	148.224.000,00	110.367.000,00	37.857.000,00	34,30
7.1.02.02.20		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	148.224.000,00	110.367.000,00	37.857.000,00	34,30
7.1.02.02.20.0001		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	854.681.294,00	622.156.660,00	232.524.634,00	37,37
7.1.02.03		Retribusi Perizinan Tertentu-LO	854.681.294,00	622.156.660,00	232.524.634,00	37,37
7.1.02.03.04		Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	4.256.849,12	55.752.472,45	(51.495.623,33)	(92,36)
7.1.02.03.04.0002		Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO	4.256.849,12	55.752.472,45	(51.495.623,33)	(92,36)
7.1.04		Lain-lain PAD yang Sali-LO	0,00	70.032,00	(70.032,00)	(100,00)
7.1.04.13		Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	70.032,00	(70.032,00)	(100,00)
7.1.04.13.02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	70.032,00	(70.032,00)	(100,00)
7.1.04.13.02.0013		Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah-LO	0,00	70.032,00	(70.032,00)	(100,00)
		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.850.028.643,12	3.213.405.164,45	(363.376.521,33)	(11,31)
		JUMLAH PENDAPATAN	2.850.028.643,12	3.213.405.164,45	(363.376.521,33)	(11,31)
8		BEBAN				
8.1		BEBAN OPERASI	30.291.938.350,00	30.737.361.702,00	(445.423.352,00)	(1,45)
8.1.01		Beban Pegawai	30.291.938.350,00	30.737.361.702,00	(445.423.352,00)	(1,45)
8.1.01.01		Beban Gaji dan Tunjangan ASN	21.759.219.902,00	18.845.492.114,00	2.913.727.788,00	15,46
8.1.01.01.01		Beban Gaji Pokok ASN	10.204.923.658,00	7.995.250.576,00	2.209.673.082,00	27,64
8.1.01.01.01.0001		Beban Gaji Pokok PNS	5.806.975.867,00	5.979.559.442,00	(827.416.425,00)	(13,84)
8.1.01.01.01.0002		Beban Gaji Pokok PPPK	5.384.714.735,00	5.764.921.742,00	(380.207.007,00)	(6,60)
8.1.01.01.02		Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.422.261.132,00	214.637.700,00	1.207.623.432,00	562,63
8.1.01.01.02.0001		Beban Tunjangan Keluarga PNS	553.825.964,00	502.533.292,00	51.292.672,00	10,21
8.1.01.01.02.0002		Beban Tunjangan Keluarga PPPK	465.994.810,00	492.067.878,00	(26.073.068,00)	(5,30)
8.1.01.01.03		Beban Tunjangan Jabatan ASN	87.831.154,00	10.465.414,00	77.365.740,00	739,25
8.1.01.01.03.0001		Beban Tunjangan Jabatan PNS	264.540.000,00	219.340.000,00	45.200.000,00	20,61
8.1.01.01.04		Beban Tunjangan Fungsional ASN	264.540.000,00	219.340.000,00	45.200.000,00	20,61
8.1.01.01.04.0001		Beban Tunjangan Fungsional PNS	227.425.764,00	210.367.600,00	17.058.164,00	8,11
8.1.01.01.04.0002		Beban Tunjangan Fungsional PPPK	178.021.600,00	199.717.600,00	(21.696.000,00)	(10,86)
8.1.01.01.05		Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	49.404.164,00	10.650.000,00	38.754.164,00	363,89
8.1.01.01.05.0001		Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	197.940.000,00	173.595.522,00	24.344.478,00	14,02
8.1.01.01.05.0002		Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	153.515.000,00	173.595.522,00	(20.080.522,00)	(11,57)
8.1.01.01.06		Beban Tunjangan Beras ASN	44.425.000,00	0,00	44.425.000,00	100,00
8.1.01.01.06.0001		Beban Tunjangan Beras PNS	309.553.208,00	272.154.360,00	37.398.848,00	13,74
8.1.01.01.06.0002		Beban Tunjangan Beras PPPK	211.593.073,00	263.391.540,00	(21.798.467,00)	(8,28)
8.1.01.01.07		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	67.960.135,00	8.762.820,00	59.197.315,00	675,95
8.1.01.01.07.0001		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.217.043.806,00	83.541.220,00	1.133.502.586,00	1.356,82
8.1.01.01.07.0002		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.180.962.569,00	83.541.220,00	1.097.421.349,00	1.313,63
8.1.01.01.08		Beban Pembulatan Gaji ASN	36.081.237,00	0,00	36.081.237,00	100,00
8.1.01.01.08.0001		Beban Pembulatan Gaji PNS	87.686,00	67.909,00	19.777,00	29,12
8.1.01.01.08.0002		Beban Pembulatan Gaji PPPK	58.438,00	63.957,00	(5.519,00)	(8,63)
8.1.01.01.09		Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.248,00	3.952,00	25.296,00	640,08
8.1.01.01.09.0001		Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	570.897.823,00	504.783.773,00	66.114.050,00	13,10
8.1.01.01.09.0002		Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	464.704.912,00	495.353.655,00	(30.648.743,00)	(6,19)
8.1.01.01.10		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	105.192.911,00	9.430.118,00	96.762.793,00	1.026,10
8.1.01.01.10.0001		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.158.363,00	12.326.776,00	1.831.587,00	14,86
8.1.01.01.10.0002		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	11.073.949,00	11.811.631,00	(737.682,00)	(6,25)
8.1.01.01.11		Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.084.414,00	515.145,00	2.569.269,00	498,75
8.1.01.01.11.0001		Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	42.475.177,00	36.980.682,00	5.494.495,00	14,86
8.1.01.01.11.0002		Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	33.222.239,00	35.435.295,00	(2.213.056,00)	(6,25)
8.1.01.02		Beban Tambahan Penghasilan ASN	9.252.938,00	1.545.387,00	7.707.551,00	498,75
8.1.01.02.01		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.554.296.244,00	10.765.341.538,00	788.954.706,00	7,33
8.1.01.02.01.0001		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.318.258.041,00	6.934.445.217,00	383.812.824,00	5,53
8.1.01.02.01.0002		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.380.445.690,00	6.934.445.217,00	(553.999.527,00)	(7,99)
8.1.01.02.03		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	937.811.351,00	0,00	937.811.351,00	100,00
8.1.01.02.03.0001		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.045.471.693,00	1.031.391.390,00	14.080.303,00	1,37
8.1.01.02.05		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.045.471.693,00	1.031.391.390,00	14.080.303,00	1,37
8.1.01.02.05.0001		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.190.566.510,00	2.799.504.931,00	391.061.579,00	13,97
8.1.01.02.05.0002		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.792.767.618,00	2.799.504.931,00	(6.737.313,00)	(0,24)
8.1.01.03		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	397.798.892,00	0,00	397.798.892,00	100,00
8.1.01.03.07		Beban Honorarium	0,00	84.900.000,00	(84.900.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	53.100.000,00	(53.100.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08		Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	53.100.000,00	(53.100.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08.0002		Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	31.800.000,00	(31.800.000,00)	(100,00)
8.1.02		Beban Barang dan Jasa	0,00	31.800.000,00	(31.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.01		Beban Barang	6.170.369.358,00	8.533.926.032,00	(2.363.556.674,00)	(27,70)
8.1.02.01.01		Beban Bahan-Bahan Kimia	2.275.709.539,00	2.695.158.950,00	(419.449.411,00)	(15,56)
8.1.02.01.01.0002		Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.267.273.539,00	2.594.208.950,00	(326.935.411,00)	(12,50)
8.1.02.01.01.0004		Beban Bahan-Bahan Isotabung Gas	169.320.100,00	171.867.000,00	(2.546.900,00)	(1,48)
8.1.02.01.01.0010		Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	597.417.350,00	598.369.500,00	(952.150,00)	(0,16)
8.1.02.01.01.0011		Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	12.625.001,00	0,00	12.625.001,00	100,00
8.1.02.01.01.0012		Beban Bahan-Bahan Lainnya	255.420.000,00	207.930.000,00	47.490.000,00	22,84
8.1.02.01.01.0024		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.446.500,00	346.721.200,00	(333.274.700,00)	(96,12)
8.1.02.01.01.0025		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.142.695,00	24.433.550,00	(10.290.854,00)	(42,12)
8.1.02.01.01.0026		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.721.610,00	23.963.300,00	7.758.310,00	32,38
8.1.02.01.01.0027		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	39.717.729,00	14.700.000,00	25.017.729,00	178,19
8.1.02.01.01.0029		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.690.000,00	5.610.000,00	1.080.000,00	19,25
8.1.02.01.01.0030		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.958.800,00	35.365.200,00	(406.400,00)	(1,15)
8.1.02.01.01.0031		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.927.500,00	44.287.000,00	(32.359.500,00)	(73,07)
8.1.02.01.01.0036		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.121.184,00	38.241.500,00	(23.120.316,00)	(60,46)
8.1.02.01.01.0038		Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	212.986.124,00	540.188.300,00	(327.202.176,00)	(60,57)
8.1.02.01.01.0039		Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.029.200,00	0,00	22.029.200,00	100,00
8.1.02.01.01.0043		Beban Natura dan Pakan-Natura	344.328.635,00	286.707.000,00	57.621.635,00	20,10
8.1.02.01.01.0044		Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00	1.575.000,00	(1.575.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0045		Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	403.079.510,00	182.012.800,00	221.066.710,00	121,46
8.1.02.01.01.0052		Beban Makanan dan Minuman Rapat	14.926.000,00	0,00	14.926.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0058		Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	61.790.600,00	57.987.500,00	3.803.000,00	6,56
8.1.02.01.04		Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.625.000,00	14.250.000,00	(8.625.000,00)	(60,53)
8.1.02.01.04.0124		Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	8.436.000,00	100.950.000,00	(92.514.000,00)	(91,64)
8.1.02.01.04.0248		Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	2.350.000,00	(2.350.000,00)	(100,00)
			8.436.000,00	0,00	8.436.000,00	100,00

8.1.02.01.04.0293	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	98.600.000,00	[98.600.000,00]	[100,00]
8.1.02.02	Beban Jasa	3.024.515.842,00	3.227.396.225,00	(202.880.383,00)	[6,29]
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.715.884.606,00	3.046.133.916,00	(330.249.310,00)	[10,84]
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	45.200.000,00	0,00	45.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.500.000,00	2.700.000,00	7.800.000,00	288,89
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	40.858.732,00	34.764.064,00	6.094.668,00	17,53
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	278.112.512,00	(278.112.512,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.037.854.813,00	1.225.555.912,00	(187.701.099,00)	(15,32)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.000.000,00	33.000.000,00	14.000.000,00	42,42
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	458.498.376,00	453.502.385,00	4.995.991,00	1,10
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	295.669.856,00	278.112.512,00	17.557.344,00	6,31
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	369.587.320,00	312.876.576,00	56.710.744,00	18,13
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	22.500.000,00	26.000.000,00	(3.500.000,00)	(13,46)
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	11.350.000,00	1.500.000,00	9.850.000,00	656,67
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalorasi	0,00	12.220.000,00	(12.220.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	18.870.000,00	(18.870.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	19.212.449,00	24.334.137,00	(5.121.688,00)	(21,05)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	11.432.921,00	15.299.150,00	(3.866.229,00)	(25,27)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	279.115.639,00	272.880.168,00	6.235.471,00	2,29
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.254.500,00	16.406.300,00	(151.800,00)	(0,93)
8.1.02.02.01.0069	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	50.850.000,00	0,00	50.850.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	145.287.780,00	178.249.809,00	(32.958.029,00)	(18,49)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	74.009.923,00	90.798.909,00	(16.788.984,00)	(18,49)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.034.712,00	4.949.949,00	(915.237,00)	(18,49)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.043.390,00	6.187.253,00	(1.143.863,00)	(18,49)
8.1.02.02.02.0010	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	62.199.753,00	76.309.699,00	(14.109.946,00)	(18,49)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.440.410,00	3.016.500,00	(1.576.090,00)	(52,25)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.440.410,00	3.016.500,00	(1.576.090,00)	(52,25)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	161.903.046,00	0,00	161.903.046,00	100,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	161.903.046,00	0,00	161.903.046,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	530.242.675,00	2.073.432.712,00	(1.543.190.037,00)	(74,43)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	523.604.875,00	364.638.000,00	158.966.875,00	43,60
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	295.514.845,00	240.808.000,00	54.706.845,00	22,72
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.567.000,00	0,00	23.567.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	14.705.000,00	(14.705.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	57.282.000,00	(57.282.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.453.750,00	11.555.000,00	6.898.750,00	59,70
8.1.02.03.02.0250	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	77.700.000,00	0,00	77.700.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0301	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	49.811.250,00	0,00	49.811.250,00	100,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	43.292.790,00	28.590.000,00	14.702.790,00	51,43
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	11.700.000,00	(11.700.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.265.240,00	0,00	15.265.240,00	100,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.637.800,00	1.678.682.212,00	(1.672.044.412,00)	(99,60)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.637.800,00	473.602.994,00	(467.165.194,00)	(98,60)
8.1.02.03.03.0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	93.191.918,00	(93.191.918,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	1.111.887.300,00	(1.111.887.300,00)	(100,00)
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	29.912.500,00	(29.912.500,00)	(100,00)
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	29.912.500,00	(29.912.500,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	289.799.650,00	537.938.145,00	(248.138.495,00)	(46,13)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	289.799.650,00	537.938.145,00	(248.138.495,00)	(46,13)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	280.599.650,00	537.938.145,00	(257.338.495,00)	(47,84)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.101.650,00	0,00	50.101.650,00	100,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.101.650,00	0,00	26.101.650,00	100,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	26.101.650,00	0,00	26.101.650,00	100,00
8.1.05	Beban Hibah	350.000.000,00	405.000.000,00	(55.000.000,00)	(13,58)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000,00	405.000.000,00	(55.000.000,00)	(13,58)
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000,00	405.000.000,00	(55.000.000,00)	(13,58)
8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000,00	405.000.000,00	(55.000.000,00)	(13,58)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.012.349.092,00	2.952.943.556,00	(940.594.464,00)	(31,85)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.087.859.067,00	763.967.268,00	323.891.799,00	42,40
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	59.940.525,00	78.326.025,00	(18.387.500,00)	(23,47)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	18.387.500,00	(18.387.500,00)	(100,00)
8.1.08.01.02.0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	59.940.525,00	59.940.525,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.043.530,00	9.011.140,00	1.032.390,00	11,46
8.1.08.01.03.0009	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	10.043.530,00	9.011.140,00	1.032.390,00	11,46
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	5.207.986,00	582.500,00	4.625.486,00	794,07
8.1.08.01.04.0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	3.495.000,00	582.500,00	2.912.500,00	500,00
8.1.08.01.04.0008	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	1.712.986,00	0,00	1.712.986,00	100,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	262.528.189,00	141.323.222,00	121.204.967,00	85,76
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	148.500,00	(148.500,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	5.606.700,00	2.707.325,00	2.899.375,00	107,09
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	79.543.429,00	61.920.887,00	17.622.542,00	28,46
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	58.272.735,00	24.764.134,00	33.508.601,00	135,31
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.740.000,00	1.018.500,00	721.500,00	70,94
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	42.814.540,00	19.435.756,00	23.378.784,00	119,72
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	63.761.333,00	1.643.334,00	62.117.999,00	3.780,00
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	17.807.000,00	(17.807.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.895.833,00	4.550.000,00	(2.654.167,00)	(58,33)
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	3.079.786,00	3.079.786,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	5.813.833,00	4.198.000,00	1.615.833,00	38,49
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	61.927.661,00	61.081.968,00	845.693,00	1,38
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	339.651,00	918.891,00	(579.240,00)	(63,04)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	56.568.010,00	54.115.577,00	2.452.433,00	4,53
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	4.010.000,00	5.047.500,00	(1.027.500,00)	(20,36)
8.1.08.01.06.0050	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	264.857.897,00	258.521.909,00	6.335.988,00	2,45
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	5.000.750,00	531.939,00	4.468.811,00	840,10
8.1.08.01.08.0018	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	0,00	115.311,00	(115.311,00)	(100,00)
8.1.08.01.08.0046	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	244.625.000,00	244.625.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0056	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	56.773,00	0,00	56.773,00	100,00
8.1.08.01.08.0066	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Instrument Probe/Sensor	1.066.667,00	1.066.667,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0070	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	10.910.134,00	10.910.134,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0107	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	2.545.716,00	1.272.858,00	1.272.858,00	100,00

8.1.08.01.08.0111	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	642.857,00	0,00	642.857,00	100,00
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	36.079.109,00	27.640.500,00	8.438.609,00	30,53
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	20.716.109,00	19.144.000,00	1.572.109,00	8,21
8.1.08.01.09.0015	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	15.363.000,00	8.496.500,00	6.866.500,00	80,82
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	241.498.242,00	79.123.746,00	162.374.496,00	205,22
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	216.868.097,00	63.737.420,00	153.130.677,00	240,25
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.530.145,00	11.711.326,00	10.818.819,00	92,38
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.100.000,00	3.675.000,00	(1.575.000,00)	(42,86)
8.1.08.01.14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	3.270.000,00	2.452.500,00	817.500,00	33,33
8.1.08.01.14.0003	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi Lainnya	3.270.000,00	2.452.500,00	817.500,00	33,33
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	133.735.928,00	104.604.258,00	29.131.670,00	27,85
8.1.08.01.15.0010	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	0,00	8.708.330,00	(8.708.330,00)	(100,00)
8.1.08.01.15.0012	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	133.735.928,00	95.895.928,00	37.840.000,00	39,46
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	8.770.000,00	1.297.500,00	7.472.500,00	575,92
8.1.08.01.17.0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid	8.770.000,00	1.297.500,00	7.472.500,00	575,92
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	433.045.613,00	443.613.045,00	(10.567.432,00)	(2,38)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	432.478.723,00	443.046.155,00	(10.567.432,00)	(2,39)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	249.994.479,00	257.442.123,00	(7.447.644,00)	(2,89)
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	5.208.541,00	5.208.541,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	3.704.688,00	3.704.688,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	10.009.729,00	10.009.729,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.274.170,00	3.274.170,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.667.302,00	4.667.302,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	19.209.232,00	19.209.232,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	34.922.623,00	34.880.134,00	42.489,00	0,12
8.1.08.02.01.0029	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Poliklinik/ Perikanan	82.371.917,00	82.371.917,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	12.543.622,00	15.705.899,00	(3.162.277,00)	(20,13)
8.1.08.02.01.0038	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.374.200,00	1.374.200,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.602.440,00	1.602.440,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0041	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	3.595.780,00	3.595.780,00	0,00	0,00
8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	566.890,00	566.890,00	0,00	0,00
8.1.08.02.03.0001	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	566.890,00	566.890,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	491.444.412,00	1.745.363.243,00	(1.253.918.831,00)	(71,84)
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.934.199,00	5.934.199,00	0,00	0,00
8.1.08.03.01.0010	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	5.934.199,00	5.934.199,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	475.794.357,00	1.732.549.215,00	(1.256.754.858,00)	(72,54)
8.1.08.03.02.0013	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	421.531.640,00	421.531.640,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	40.590.166,00	40.590.166,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0030	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	0,00	1.256.754.858,00	(1.256.754.858,00)	(100,00)
8.1.08.03.02.0044	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	13.672.551,00	13.672.551,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	5.902.176,00	3.198.983,00	2.703.193,00	84,50
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.902.176,00	3.198.983,00	2.703.193,00	84,50
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	3.813.680,00	3.680.846,00	132.834,00	3,61
8.1.08.03.04.0001	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	265.667,00	1.610.177,00	(1.344.510,00)	(83,50)
8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	2.954.688,00	1.477.344,00	1.477.344,00	100,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	593.325,00	593.325,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	30.291.938.350,00	30.737.361.702,00	(445.423.352,00)	(1,45)
	JUMLAH BEBAN	30.291.938.350,00	30.737.361.702,00	(445.423.352,00)	(1,45)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(27.441.909.706,88)	(27.523.956.537,55)	82.046.830,67	(0,30)

Provinsi Bali, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



In: Putu Sumardiana, MP.

NIP. [REDACTED]



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



Dinas Kelautan dan Perikanan

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	43.546.550.305,59	42.354.754.450,59
1.1	ASET LANCAR	168.902.675,00	234.640.850,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	0,00	7.525.000,00
1.1.04.03	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	7.525.000,00
1.1.04.03.04	Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	7.525.000,00
1.1.04.03.04.0001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	7.525.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	0,00	(7.525.000,00)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	(7.525.000,00)
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(7.525.000,00)
1.1.10.01.02.0061	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	(7.525.000,00)
1.1.12	Persediaan	168.902.675,00	234.640.850,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	168.902.675,00	234.640.850,00
1.1.12.01.01	Bahan	137.332.150,00	184.971.250,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	27.650,00	0,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	60.858.000,00	65.918.250,00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	63.000.000,00	92.160.000,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	13.446.500,00	26.893.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	22.526.535,00	3.722.700,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	5.418.069,00	28.700,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	643.202,00	729.200,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	922.408,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	610.000,00	1.920.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	12.800.000,00	229.800,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	1.643.483,00	815.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	489.373,00	0,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	4.188.800,00	0,00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	4.188.800,00	0,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	4.855.190,00	45.946.900,00
1.1.12.01.07.0002	Pakan	3.981.190,00	45.946.900,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	874.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	168.902.675,00	234.640.850,00
1.3	ASET TETAP	42.734.926.358,59	41.751.461.900,59
1.3.01	Tanah	5.479.783.250,00	5.479.783.250,00
1.3.01.01	Tanah	5.479.783.250,00	5.479.783.250,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	4.589.701.000,00	4.589.701.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.589.701.000,00	4.589.701.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	890.082.250,00	890.082.250,00
1.3.01.01.02.0001	Tanah Basah	887.947.250,00	887.947.250,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	2.135.000,00	2.135.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	17.946.699.154,51	22.349.724.779,51
1.3.02.02	Alat Angkutan	4.923.389.746,00	4.923.389.746,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.323.984.496,00	4.323.984.496,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.111.502.000,00	3.111.502.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	464.950.000,00	464.950.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	630.818.000,00	630.818.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	116.714.496,00	116.714.496,00
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	599.405.250,00	599.405.250,00
1.3.02.02.03.0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	599.405.250,00	599.405.250,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	267.946.675,00	265.809.925,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	203.707.800,00	203.707.800,00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.630.000,00	3.630.000,00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transoortable (Berpindah)	1.980.000,00	1.980.000,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	8.525.000,00	8.525.000,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	83.000.000,00	83.000.000,00
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	106.572.800,00	106.572.800,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	40.477.125,00	40.477.125,00
1.3.02.03.02.0002	Perkakas Bengkel Listrik	9.669.000,00	9.669.000,00
1.3.02.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service	2.090.000,00	2.090.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	4.950.000,00	4.950.000,00
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	22.888.125,00	22.888.125,00
1.3.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	880.000,00	880.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	23.761.750,00	21.625.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	18.700.000,00	18.700.000,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	1.925.000,00	1.925.000,00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Bara	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.03.03.0021	Alat Ukur Lainnya	2.136.750,00	0,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	33.680.000,00	33.680.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	33.680.000,00	33.680.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.700.000,00	1.700.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	13.980.000,00	13.980.000,00
1.3.02.04.01.0008	Alat Produksi Perikanan	18.000.000,00	18.000.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.998.307.617,50	7.028.070.867,50
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.268.807.273,50	1.175.926.273,50
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	5.485.000,00	9.054.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	426.025.500,00	426.025.500,00

1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	837.296.773,50	740.846.773,50
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	2.575.146.153,00	5.697.790.403,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	932.494.399,00	873.194.399,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	27.585.000,00	27.585.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	493.612.754,00	3.874.487.004,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	3.160.000,00	3.160.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.118.294.000,00	919.364.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	154.354.191,00	154.354.191,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	53.500.000,00	53.500.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	15.398.919,00	15.398.919,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	56.355.272,00	56.355.272,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	29.100.000,00	29.100.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	701.702.091,01	632.551.641,01
1.3.02.06.01	Alat Studio	463.912.091,00	390.761.641,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	5.975.300,00	25.361.300,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	374.836.791,00	365.400.341,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	83.100.000,00	0,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	153.045.000,01	157.045.000,01
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	88.808.000,01	92.808.000,01
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	8.893.000,00	8.893.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	55.344.000,00	55.344.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	84.745.000,00	84.745.000,00
1.3.02.06.03.0003	Peralatan Pemancar VHF/FM	74.745.000,00	74.745.000,00
1.3.02.06.03.0033	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	29.840.000,00	29.840.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	29.840.000,00	29.840.000,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	20.900.000,00	20.900.000,00
1.3.02.07.01.0002	Alat Kedokteran Gigi	4.400.000,00	4.400.000,00
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.540.000,00	1.540.000,00
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	5.439.875.192,00	7.198.492.768,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	5.242.403.192,00	6.981.020.768,00
1.3.02.08.01.0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	9.900.000,00	9.900.000,00
1.3.02.08.01.0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	80.710.000,00	89.960.000,00
1.3.02.08.01.0003	Alat Laboratorium Hidrokimia	602.000.000,00	602.000.000,00
1.3.02.08.01.0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	167.639.704,00	172.499.900,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	421.755.399,00	354.850.400,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	124.830.338,00	128.830.338,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	2.776.781,00	1.199.000.000,00
1.3.02.08.01.0014	Alat Laboratorium Patologi	0,00	11.450.000,00
1.3.02.08.01.0016	Alat Laboratorium Hematologi	23.145.950,00	23.145.950,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	103.900.000,00	103.900.000,00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	149.000.000,00	150.845.000,00
1.3.02.08.01.0019	Alat Laboratorium Farmasi	0,00	6.600.000,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	1.498.963.800,00	2.070.963.800,00
1.3.02.08.01.0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	1.957.000.000,00	1.957.000.000,00
1.3.02.08.01.0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	18.150.000,00	18.150.000,00
1.3.02.08.01.0055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	14.000.000,00	14.000.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	68.631.220,00	67.925.380,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	179.652.000,00	179.652.000,00
1.3.02.08.02.0002	Instrument Probe/Sensor	16.000.000,00	16.000.000,00
1.3.02.08.02.0006	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	163.652.000,00	163.652.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	17.820.000,00	17.820.000,00
1.3.02.08.07.0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	17.820.000,00	17.820.000,00
1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	0,00	20.000.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	137.412.000,00	137.412.000,00
1.3.02.09.01	Senjata Api	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.02.09.01.0010	Senjata Lain-Lain	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	111.852.000,00	111.852.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	56.540.000,00	56.540.000,00
1.3.02.09.02.0005	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	55.312.000,00	55.312.000,00
1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	19.560.000,00	19.560.000,00
1.3.02.09.04.0002	Alat Dalmat/Alat Dakhura	19.560.000,00	19.560.000,00
1.3.02.10	Komputer	2.026.416.193,00	1.706.348.193,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.698.204.673,00	1.376.933.673,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.698.204.673,00	1.376.933.673,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	328.211.520,00	329.414.520,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	283.211.520,00	284.414.520,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	45.000.000,00	45.000.000,00
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	32.700.000,00	32.700.000,00
1.3.02.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	32.700.000,00	32.700.000,00
1.3.02.14.01.0003	Alat Bantu Eksplorasi Lainnya	32.700.000,00	32.700.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	313.579.640,00	313.579.640,00
1.3.02.15.03	Alat SAR	313.579.640,00	313.579.640,00
1.3.02.15.03.0001	Alat Penolong	19.000.000,00	19.000.000,00
1.3.02.15.03.0003	Alat Kerja Bawah Air	294.579.640,00	294.579.640,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	41.850.000,00	47.849.999,00
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	41.850.000,00	47.849.999,00
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid	41.850.000,00	47.849.999,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	24.658.329.149,08	22.950.748.326,08
1.3.03.01	Bangunan Gedung	24.635.653.549,08	22.928.072.726,08
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.193.645.549,08	22.486.064.726,08
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	14.953.103.244,20	13.073.034.589,20
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	276.152.244,57	276.152.244,57
1.3.03.01.01.0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	185.234.385,00	185.234.385,00
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	539.952.714,00	539.952.714,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	163.708.517,01	163.708.517,01
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	253.322.158,00	253.322.158,00

1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	960.461.577,00	960.461.577,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.744.006.709,15	1.744.006.709,15
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Peternakan/Perikanan	4.504.896.930,15	4.504.896.930,15
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	612.807.070,00	785.294.902,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	442.008.000,00	442.008.000,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	68.710.000,00	68.710.000,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	193.509.000,00	193.509.000,00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	179.789.000,00	179.789.000,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	22.675.600,00	22.675.600,00
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	22.675.600,00	22.675.600,00
1.3.03.03.01.0001	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	22.675.600,00	22.675.600,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.078.311.164,69	39.324.062.164,69
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1.799.869.839,00	1.799.869.839,00
1.3.04.01.01	Jalan	1.799.869.839,00	1.799.869.839,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	1.740.527.850,00	1.740.527.850,00
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	59.341.989,00	59.341.989,00
1.3.04.02	Bangunan Air	39.951.485.514,69	37.197.236.514,69
1.3.04.02.02	Bangunan Pengaliran Pasang Surut	20.029.161.000,00	20.029.161.000,00
1.3.04.02.02.0005	Bangunan Pengaman Pasang Surut	20.029.161.000,00	20.029.161.000,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	19.694.173.805,82	16.939.924.805,82
1.3.04.02.04.0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	125.717.500,00	125.717.500,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	533.238.670,64	533.238.670,64
1.3.04.02.04.0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	19.035.217.635,18	16.280.958.635,18
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	228.150.708,87	228.150.708,87
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	228.150.708,87	228.150.708,87
1.3.04.03	Instalasi	177.065.311,00	177.065.311,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	177.065.311,00	177.065.311,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	177.065.311,00	177.065.311,00
1.3.04.04	Jaringan	149.890.500,00	149.890.500,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	7.970.000,00	7.970.000,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	7.970.000,00	7.970.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	141.920.500,00	141.920.500,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	118.187.500,00	118.187.500,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	23.733.000,00	23.733.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(47.428.196.359,69)	(48.352.856.619,69)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.921.845.109,51)	(18.378.047.412,51)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(4.508.801.115,00)	(4.448.860.590,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(3.111.502.000,00)	(3.111.502.000,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(464.950.000,00)	(464.950.000,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(630.818.000,00)	(630.818.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(116.714.496,00)	(116.714.496,00)
1.3.07.01.02.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(184.816.619,00)	(124.876.094,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(237.825.545,00)	(227.782.015,00)
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(3.630.000,00)	(3.630.000,00)
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(1.980.000,00)	(1.980.000,00)
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(8.525.000,00)	(8.525.000,00)
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(83.000.000,00)	(83.000.000,00)
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(78.588.420,00)	(68.544.890,00)
1.3.07.01.03.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(9.669.000,00)	(9.669.000,00)
1.3.07.01.03.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(2.090.000,00)	(2.090.000,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(4.950.000,00)	(4.950.000,00)
1.3.07.01.03.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(22.888.125,00)	(22.888.125,00)
1.3.07.01.03.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	(880.000,00)	(880.000,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(18.700.000,00)	(18.700.000,00)
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(1.925.000,00)	(1.925.000,00)
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(25.490.486,00)	(20.282.500,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(1.700.000,00)	(1.700.000,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(4.077.500,00)	(582.500,00)
1.3.07.01.04.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	(19.712.986,00)	(18.000.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(3.036.803.654,50)	(6.313.218.715,50)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(5.485.000,00)	(9.054.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyiripan Perlengkapan Kantor	(407.566.159,00)	(401.959.459,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(565.744.770,50)	(486.201.341,50)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(789.064.478,00)	(731.291.743,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(21.495.000,00)	(19.755.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(312.161.843,00)	(3.779.921.553,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(3.360.000,00)	(3.160.000,00)

1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(802.215.667,00)	(762.754.334,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(53.500.000,00)	(51.604.167,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(7.699.465,00)	(4.619.679,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(39.611.272,00)	(33.797.439,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(29.100.000,00)	(29.100.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(515.295.601,01)	(508.375.645,01)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(5.975.300,00)	(24.779.804,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(286.608.633,00)	(261.904.173,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(80.646.335,01)	(80.626.335,01)
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(8.893.000,00)	(8.893.000,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(55.344.000,00)	(55.344.000,00)
1.3.07.01.06.0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	(74.745.000,00)	(74.745.000,00)
1.3.07.01.06.0050	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	(3.083.333,00)	(2.083.333,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(29.840.000,00)	(29.840.000,00)
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(20.900.000,00)	(20.900.000,00)
1.3.07.01.07.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
1.3.07.01.07.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(1.540.000,00)	(1.540.000,00)
1.3.07.01.07.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(3.846.791.457,00)	(5.411.611.975,00)
1.3.07.01.08.0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(9.900.000,00)	(9.900.000,00)
1.3.07.01.08.0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(80.710.000,00)	(89.960.000,00)
1.3.07.01.08.0003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	(602.000.000,00)	(602.000.000,00)
1.3.07.01.08.0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(167.639.704,00)	(172.499.900,00)
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(353.911.150,00)	(348.910.400,00)
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(124.830.338,00)	(128.830.338,00)
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(2.776.781,00)	(1.199.000.000,00)
1.3.07.01.08.0014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	0,00	(11.450.000,00)
1.3.07.01.08.0016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	(23.145.950,00)	(23.145.950,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(103.900.000,00)	(103.900.000,00)
1.3.07.01.08.0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(149.000.000,00)	(150.845.000,00)
1.3.07.01.08.0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	0,00	(6.600.000,00)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(1.498.963.800,00)	(2.070.963.800,00)
1.3.07.01.08.0046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	(591.177.083,00)	(346.552.083,00)
1.3.07.01.08.0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	(18.150.000,00)	(18.150.000,00)
1.3.07.01.08.0055	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	(14.000.000,00)	(14.000.000,00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(64.542.153,00)	(67.925.380,00)
1.3.07.01.08.0066	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	(14.044.444,00)	(12.977.777,00)
1.3.07.01.08.0070	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	(23.638.623,00)	(12.728.489,00)
1.3.07.01.08.0107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	(3.818.574,00)	(1.272.858,00)
1.3.07.01.08.0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(642.857,00)	(20.000.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(102.250.415,00)	(66.171.306,00)
1.3.07.01.09.0010	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(36.066.665,00)	(15.350.556,00)
1.3.07.01.09.0015	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	(60.183.750,00)	(44.820.750,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.334.841.148,00)	(1.210.074.906,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.086.215.660,00)	(952.976.563,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(206.250.488,00)	(216.823.343,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(42.375.000,00)	(40.275.000,00)

1.3.07.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	(5.722.500,00)	(2.452.500,00)
1.3.07.01.14.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	(5.722.500,00)	(2.452.500,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(264.930.688,00)	(131.194.760,00)
1.3.07.01.15.0010	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	(19.000.000,00)	(19.000.000,00)
1.3.07.01.15.0012	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	(245.930.688,00)	(112.194.760,00)
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(13.252.500,00)	(8.182.500,00)
1.3.07.01.17.0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	(13.252.500,00)	(8.182.500,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.889.581.720,00)	(6.603.733.089,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(6.878.196.679,00)	(6.592.914.938,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(3.562.273.314,00)	(3.401.077.309,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(63.177.980,00)	(57.969.439,00)
1.3.07.02.01.0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	(70.697.793,00)	(66.993.105,00)
1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(253.206.864,00)	(243.197.135,00)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(53.061.582,00)	(49.787.412,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(90.355.561,00)	(85.688.259,00)
1.3.07.02.01.0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(417.476.195,00)	(398.266.963,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(224.539.819,00)	(189.617.196,00)
1.3.07.02.01.0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	(1.662.085.217,00)	(1.579.713.300,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(194.815.092,00)	(240.669.978,00)
1.3.07.02.01.0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(55.082.517,00)	(53.708.317,00)
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(166.401.057,00)	(164.798.617,00)
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(65.023.688,00)	(61.427.908,00)
1.3.07.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(11.385.041,00)	(10.818.151,00)
1.3.07.02.03.0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	(11.385.041,00)	(10.818.151,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(26.616.769.530,18)	(23.371.076.118,18)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.794.430.157,00)	(1.788.495.958,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(1.740.527.850,00)	(1.740.527.850,00)
1.3.07.03.01.0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(53.902.307,00)	(47.968.108,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(24.740.926.092,18)	(21.510.882.735,18)
1.3.07.03.02.0013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	(4.970.672.797,00)	(4.549.141.157,00)
1.3.07.03.02.0027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	(125.717.500,00)	(125.717.500,00)
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(475.735.935,00)	(435.145.769,00)
1.3.07.03.02.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	(19.035.217.635,18)	(16.280.968.635,18)
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(133.582.225,00)	(119.909.674,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(17.898.563,00)	(11.996.387,00)
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(17.898.563,00)	(11.996.387,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(63.514.718,00)	(59.701.038,00)
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(5.069.802,00)	(4.804.135,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(53.006.103,00)	(50.051.415,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(5.438.813,00)	(4.845.488,00)
	JUMLAH ASET TETAP	42.734.926.358,59	41.751.461.900,59
1.5	ASET LAINNYA	642.721.272,00	368.651.700,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	261.551.700,00	261.551.700,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	261.551.700,00	261.551.700,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	261.551.700,00	261.551.700,00
1.5.03.01.01.0005	Software	261.551.700,00	261.551.700,00
1.5.04	Aset Lain-lain	6.451.953.324,00	465.708.915,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	6.451.953.324,00	465.708.915,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	6.451.953.324,00	465.708.915,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	6.344.853.324,00	358.608.915,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	107.100.000,00	107.100.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(6.070.783.752,00)	(358.608.915,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(6.070.783.752,00)	(358.608.915,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(6.070.783.752,00)	(358.608.915,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(6.070.783.752,00)	(358.608.915,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	642.721.272,00	368.651.700,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	43.546.550.305,59	42.354.754.450,59

2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.062.340.709,74	853.926.352,86
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	1.062.340.709,74	853.926.352,86
2.1.05.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	113.944.112,74	118.200.961,86
2.1.05.01.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	113.944.112,74	118.200.961,86
2.1.05.01.01.0001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	113.944.112,74	118.200.961,86
2.1.06	Utang Belanja	113.944.112,74	118.200.961,86
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	948.396.597,00	735.725.391,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	948.273.541,00	730.780.248,00
		88.522.153,00	20.127.789,00
2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	725.600,00	0,00
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.521.206,00	0,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.924.255,00	20.127.789,00
2.1.06.01.01.0018	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.351.092,00	0,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	859.751.388,00	710.652.459,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	451.353.894,00	459.340.699,00
2.1.06.01.02.0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	93.932.992,00	0,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	74.313.499,00	67.126.265,00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	200.306.700,00	184.185.495,00
2.1.06.01.02.0010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	39.844.303,00	0,00
2.1.05.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	123.056,00	4.945.143,00
2.1.05.02.02	Utang Belanja Jasa	123.056,00	4.945.143,00
2.1.05.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	53.056,00	58.675,00
2.1.05.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	4.816.468,00
2.1.05.02.02.0069	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	70.000,00	70.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.062.340.709,74	853.926.352,86
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.062.340.709,74	853.926.352,86
3	EKUITAS	42.484.209.595,85	41.500.828.097,73
3.1	EKUITAS	42.484.209.595,85	41.500.828.097,73
3.1.01	Ekuitas	14.058.918.390,85	14.823.182.706,73
3.1.01.01	Ekuitas	41.500.828.097,73	42.347.139.244,28
3.1.01.01.01	Ekuitas	41.500.828.097,73	42.347.139.244,28
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	41.500.828.097,73	42.347.139.244,28
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(27.441.909.706,88)	(27.523.956.537,55)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(27.441.909.706,88)	(27.523.956.537,55)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(27.441.909.706,88)	(27.523.956.537,55)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	28.425.291.205,00	26.677.645.391,00
3.1.03.01	RK PPKD	28.425.291.205,00	26.677.645.391,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	28.425.291.205,00	26.677.645.391,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	28.425.291.205,00	26.677.645.391,00
	JUMLAH EKUITAS	42.484.209.595,85	41.500.828.097,73
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	43.546.550.305,59	42.354.754.450,59





PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	41.500.828.097,73	41.516.484.191,14
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(27.441.909.706,88)	(27.523.956.537,55)
RK PPKD	28.425.291.205,00	26.677.645.391,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	830.655.053,14
EKUITAS AKHIR	42.484.209.595,85	41.500.828.097,73

Provinsi Bali, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Dr. T. Pute Sumardiana, MP.
NIP. [REDACTED]





LAPORAN PERTANGGUNGAJAWABAN SKPD
(SPJ FUNGSIONAL)
Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5	BELANJA DAERAH	Rp36.095.008.934,20	Rp20.027.863.985,00	Rp1.588.112.624,00	Rp21.615.976.609,00	Rp6.303.946.589,00	Rp2.348.411.293,00	Rp8.652.357.882,00	Rp874.610.646,00	Rp128.117.862,00	Rp1.002.728.508,00	Rp31.271.062.999,00	Rp4.823.945.935,20			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp32.647.153.934,20	Rp20.027.863.985,00	Rp1.588.112.624,00	Rp21.615.976.609,00	Rp4.597.746.502,00	Rp784.728.258,00	Rp5.382.474.760,00	Rp874.610.646,00	Rp128.117.862,00	Rp1.002.728.508,00	Rp28.001.179.877,00	Rp4.645.974.057,20			
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp25.619.548.375,20	Rp19.967.838.985,00	Rp1.573.887.624,00	Rp21.541.726.609,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.541.726.609,00	Rp4.077.821.766,20			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.677.605.559,00	Rp60.025.000,00	Rp14.225.000,00	Rp74.250.000,00	Rp4.247.746.502,00	Rp784.728.258,00	Rp5.032.474.760,00	Rp874.610.646,00	Rp128.117.862,00	Rp1.002.728.508,00	Rp6.109.453.268,00	Rp668.152.291,00			
5.1.05	Belanja Hibah	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00			
5.2	BELANJA MODAL	Rp3.447.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.706.200.087,00	Rp1.563.683.035,00	Rp3.269.883.122,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.269.883.122,00	Rp177.971.878,00			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.192.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.143.577.589,00	Rp0,00	Rp1.143.577.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.143.577.589,00	Rp49.277.411,00			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp2.255.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.622.498,00	Rp1.563.683.035,00	Rp2.126.305.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.126.305.533,00	Rp128.694.467,00			
Dinas Kelautan dan Perikanan																
		Rp32.316.466.445,20	Rp20.027.863.985,00	Rp1.588.112.624,00	Rp21.615.976.609,00	Rp3.762.305.874,00	Rp1.999.555.866,00	Rp5.761.861.740,00	Rp454.150.805,00	Rp58.034.650,00	Rp512.185.455,00	Rp27.890.023.804,00	Rp4.426.442.641,20			
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp30.984.536.575,20	Rp20.027.863.985,00	Rp1.588.112.624,00	Rp21.615.976.609,00	Rp2.905.661.254,00	Rp1.788.822.035,00	Rp4.694.483.289,00	Rp239.500.795,00	Rp47.184.400,00	Rp286.685.195,00	Rp26.597.145.093,00	Rp4.387.391.482,20			
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp36.018.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.415.600,00	Rp15.481.504,00	Rp32.897.104,00	Rp32.897.104,00	Rp3.120.896,00			
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp36.018.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.415.600,00	Rp15.481.504,00	Rp32.897.104,00	Rp32.897.104,00	Rp3.120.896,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp36.018.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.415.600,00	Rp15.481.504,00	Rp32.897.104,00	Rp32.897.104,00	Rp3.120.896,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp36.018.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.415.600,00	Rp15.481.504,00	Rp32.897.104,00	Rp32.897.104,00	Rp3.120.896,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.858.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.815.600,00	Rp4.415.000,00	Rp12.230.600,00	Rp12.230.600,00	Rp1.627.400,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp13.858.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.815.600,00	Rp4.415.000,00	Rp12.230.600,00	Rp12.230.600,00	Rp1.627.400,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp4.858.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.400.600,00	Rp0,00	Rp3.400.600,00	Rp3.400.600,00	Rp1.457.400,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)		7	8	9 = (7+8)		10	11				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp4.415.000,00	Rp4.415.000,00	Rp8.830.000,00		Rp8.830.000,00	Rp170.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp22.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp9.600.000,00	Rp11.066.504,00	Rp20.666.504,00		Rp20.666.504,00	Rp1.493.496,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp22.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp9.600.000,00	Rp11.066.504,00	Rp20.666.504,00		Rp20.666.504,00	Rp1.493.496,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp22.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp9.600.000,00	Rp11.066.504,00	Rp20.666.504,00		Rp20.666.504,00	Rp1.493.496,00
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp25.702.348.375,20	Rp20.027.863.985,00	Rp1.588.112.624,00	Rp21.615.976.609,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp21.615.976.609,00	Rp4.086.371.766,20
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp25.702.348.375,20	Rp20.027.863.985,00	Rp1.588.112.624,00	Rp21.615.976.609,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp21.615.976.609,00	Rp4.086.371.766,20
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.702.348.375,20	Rp20.027.863.985,00	Rp1.588.112.624,00	Rp21.615.976.609,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp21.615.976.609,00	Rp4.086.371.766,20
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp25.619.548.375,20	Rp19.967.838.985,00	Rp1.573.887.624,00	Rp21.541.726.609,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp21.541.726.609,00	Rp4.077.821.766,20
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12.500.503.604,20	Rp9.430.424.582,00	Rp706.104.712,00	Rp10.136.529.294,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp10.136.529.294,00	Rp2.363.974.310,20
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp7.969.086.619,03	Rp6.289.491.367,00	Rp517.484.500,00	Rp6.806.975.867,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp6.806.975.867,00	Rp1.162.110.752,03
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp6.258.668.437,03	Rp4.999.716.235,00	Rp384.998.500,00	Rp5.384.714.735,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp5.384.714.735,00	Rp873.953.702,03
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp1.710.418.182,00	Rp1.289.775.132,00	Rp132.486.000,00	Rp1.422.261.132,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp1.422.261.132,00	Rp288.157,050,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp653.061.906,79	Rp512.290.534,00	Rp41.535.430,00	Rp53.825.964,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp53.825.964,00	Rp99.235.942,79
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp545.940.750,79	Rp432.973.554,00	Rp33.021.256,00	Rp465.994.810,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp465.994.810,00	Rp79.945.940,79
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp107.121.156,00	Rp79.316.980,00	Rp8.514.174,00	Rp87.831.154,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp87.831.154,00	Rp19.290.002,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp309.300.000,00	Rp244.050.000,00	Rp20.490.000,00	Rp264.540.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp264.540.000,00	Rp44.760.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp309.300.000,00	Rp244.050.000,00	Rp20.490.000,00	Rp264.540.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp264.540.000,00	Rp44.760.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp257.570.164,00	Rp211.260.164,00	Rp15.440.000,00	Rp226.700.164,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp226.700.164,00	Rp30.870.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp201.066.000,00	Rp165.406.000,00	Rp11.890.000,00	Rp177.296.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp177.296.000,00	Rp23.770.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp56.504.164,00	Rp45.854.164,00	Rp3.550.000,00	Rp49.404.164,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp49.404.164,00	Rp7.100.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp234.209.795,78	Rp180.480.000,00	Rp17.460.000,00	Rp197.940.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp197.940.000,00	Rp36.268.795,78
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp176.254.795,78	Rp142.820.000,00	Rp10.695.000,00	Rp153.515.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp153.515.000,00	Rp22.739.795,78
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp57.955.000,00	Rp37.660.000,00	Rp6.765.000,00	Rp44.425.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp44.425.000,00	Rp15.530.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp362.347.437,00	Rp285.944.288,00	Rp23.608.920,00	Rp309.553.208,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp309.553.208,00	Rp52.794.229,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp280.627.500,00	Rp224.646.793,00	Rp16.946.280,00	Rp241.593.073,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp241.593.073,00	Rp39.034.427,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp81.719.937,00	Rp61.297.495,00	Rp6.662.640,00	Rp67.960.135,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp67.960.135,00	Rp13.759.802,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	Rp1.330.337.445,95	Rp1.140.374.856,00	Rp15.147.744,00	Rp1.155.522.600,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp1.155.522.600,00	Rp174.814.845,95

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6 = (4+5)		7	8	9 = (7+8)		10	11	12 = (10+11)		13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp1.273.883.253.00	Rp1.104.293.619.00	Rp15.147.744.00	Rp1.119.441.363.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp1.119.441.363.00	Rp154.441.890.00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp56.454.132.95	Rp36.081.237.00	Rp0.00	Rp36.081.237.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp36.081.237.00	Rp20.372.955.95
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp101.838.00	Rp80.546.00	Rp7.140.00	Rp87.686.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp87.686.00	Rp14.152.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp66.824.00	Rp54.243.00	Rp4.155.00	Rp58.438.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp58.438.00	Rp8.386.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp35.014.00	Rp26.303.00	Rp2.945.00	Rp29.248.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp29.248.00	Rp5.660.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp1.285.472.884.34	Rp514.787.135.00	Rp49.963.130.00	Rp564.750.265.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp564.750.265.00	Rp720.722.619.34
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp1.082.153.481.71	Rp425.350.080.00	Rp38.558.366.00	Rp463.908.446.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp463.908.446.00	Rp618.245.035.71
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp203.319.402.63	Rp89.437.055.00	Rp11.404.764.00	Rp100.841.819.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp100.841.819.00	Rp102.477.583.63
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp19.003.860.00	Rp12.916.401.00	Rp1.241.962.00	Rp14.158.363.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp14.158.363.00	Rp4.845.497.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp14.796.202.40	Rp10.149.964.00	Rp923.985.00	Rp11.073.949.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp11.073.949.00	Rp3.722.253.40
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp4.207.657.60	Rp2.766.437.00	Rp317.977.00	Rp3.084.414.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp3.084.414.00	Rp1.123.243.60
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp57.011.662.06	Rp38.749.291.00	Rp3.725.886.00	Rp42.475.177.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp42.475.177.00	Rp14.536.485.06
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp44.388.833.21	Rp30.450.252.00	Rp2.771.987.00	Rp33.222.239.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp33.222.239.00	Rp11.166.594.21
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp12.622.828.85	Rp8.299.039.00	Rp93.899.00	Rp9.252.938.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp9.252.938.00	Rp3.369.890.85
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp22.999.991.25	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp22.999.991.25
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp17.347.640.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp17.347.640.00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp5.652.351.25	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp5.652.351.25
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp13.119.044.771.00	Rp10.537.414.403.00	Rp867.782.912.00	Rp11.405.197.315.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp11.405.197.315.00	Rp1.713.847.456.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp8.053.177.591.00	Rp6.684.121.431.00	Rp548.190.423.00	Rp7.232.311.854.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp7.232.311.854.00	Rp820.865.737.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp7.146.363.072.00	Rp5.934.134.833.00	Rp454.238.662.00	Rp6.388.433.495.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp6.388.433.495.00	Rp57.925.577.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp906.814.519.00	Rp7.49.926.598.00	Rp93.951.761.00	Rp843.878.359.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp843.878.359.00	Rp62.936.160.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp1.201.722.015.00	Rp961.446.455.00	Rp76.838.004.00	Rp1.038.284.459.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp1.038.284.459.00	Rp163.437.556.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp1.201.722.015.00	Rp961.446.455.00	Rp76.838.004.00	Rp1.038.284.459.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp1.038.284.459.00	Rp163.437.556.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp3.614.636.950.00	Rp2.891.846.517.00	Rp242.754.485.00	Rp3.134.601.002.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp3.134.601.002.00	Rp480.035.948.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp3.216.351.833.00	Rp2.573.744.193.00	Rp202.902.220.00	Rp2.776.646.413.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp2.776.646.413.00	Rp439.705.420.00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp398.285.117.00	Rp318.102.324.00	Rp39.852.265.00	Rp357.954.589.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp357.954.589.00	Rp40.330.528.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)		7	8	9 = (7+8)		10	11		12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp249.508.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00		Rp249.508.215,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi/ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp249.508.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00		Rp249.508.215,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp82.800.000,00	Rp60.025.000,00	Rp14.225.000,00	Rp74.250.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp74.250.000,00	Rp8.550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp82.800.000,00	Rp60.025.000,00	Rp14.225.000,00	Rp74.250.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp74.250.000,00	Rp8.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp82.800.000,00	Rp60.025.000,00	Rp14.225.000,00	Rp74.250.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp74.250.000,00	Rp8.550.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengkanaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp23.400.000,00	Rp23.400.000,00	Rp0,00	Rp23.400.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp23.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	Rp59.400.000,00	Rp36.625.000,00	Rp14.225.000,00	Rp50.850.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp50.850.000,00	Rp8.550.000,00
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.038.933.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp849.861.853,00	Rp0,00	Rp849.861.853,00		Rp83.536.311,00	Rp15.521.932,00		Rp9.056.243,00	Rp948.920.096,00	Rp90.013.204,00
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp7.459.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp4.871.790,00		Rp4.871.790,00	Rp4.871.790,00	Rp2.587.710,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp7.459.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp4.871.790,00		Rp4.871.790,00	Rp4.871.790,00	Rp2.587.710,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.459.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp4.871.790,00		Rp4.871.790,00	Rp4.871.790,00	Rp2.587.710,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.459.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp4.871.790,00		Rp4.871.790,00	Rp4.871.790,00	Rp2.587.710,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.459.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp4.871.790,00		Rp4.871.790,00	Rp4.871.790,00	Rp2.587.710,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp7.459.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp4.871.790,00		Rp4.871.790,00	Rp4.871.790,00	Rp2.587.710,00
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp728.957.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp707.600.000,00	Rp0,00	Rp707.600.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp707.600.000,00	Rp21.357.900,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp728.957.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp707.600.000,00	Rp0,00	Rp707.600.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp707.600.000,00	Rp21.357.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp728.957.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp707.600.000,00	Rp0,00	Rp707.600.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp707.600.000,00	Rp21.357.900,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp209.591.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp199.650.000,00	Rp0,00	Rp199.650.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp199.650.000,00	Rp9.941.600,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp59.050.000,00	Rp0,00	Rp59.050.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp59.050.000,00	Rp950.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp59.050.000,00	Rp0,00	Rp59.050.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp59.050.000,00	Rp950.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp149.591.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp140.600.000,00	Rp0,00	Rp140.600.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp140.600.000,00	Rp8.991.600,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp67.074.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp59.800.000,00	Rp0,00	Rp59.800.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp59.800.000,00	Rp7.274.400,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp82.517.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp80.800.000,00	Rp0,00	Rp80.800.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp80.800.000,00	Rp1.711.200,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Peneracar	Rp125.993.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp124.400.000,00	Rp0,00	Rp124.400.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp124.400.000,00	Rp1.593.900,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp125.993.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp124.400.000.00	Rp0.00	Rp124.400.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp124.400.000.00	Rp1.593.900.00	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp41.618.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp41.300.000.00	Rp0.00	Rp41.300.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp41.300.000.00	Rp318.500.00	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp84.375.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp83.100.000.00	Rp0.00	Rp83.100.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp83.100.000.00	Rp1.275.400.00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp393.372.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp383.550.000.00	Rp0.00	Rp383.550.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp383.550.000.00	Rp8.822.400.00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp376.092.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp366.550.000.00	Rp0.00	Rp366.550.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp366.550.000.00	Rp5.542.400.00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp376.092.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp366.550.000.00	Rp0.00	Rp366.550.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp366.550.000.00	Rp5.542.400.00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp17.280.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.000.000.00	Rp0.00	Rp17.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.000.000.00	Rp280.000.00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp17.280.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.000.000.00	Rp0.00	Rp17.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.000.000.00	Rp280.000.00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp189.642.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp142.261.853.00	Rp0.00	Rp142.261.853.00	Rp5.220.000.00	Rp859.140.00	Rp6.079.140.00	Rp148.340.993.00	Rp41.301.407.00	Rp148.340.993.00	Rp41.301.407.00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp189.642.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp142.261.853.00	Rp0.00	Rp142.261.853.00	Rp5.220.000.00	Rp859.140.00	Rp6.079.140.00	Rp148.340.993.00	Rp41.301.407.00	Rp148.340.993.00	Rp41.301.407.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp189.642.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp142.261.853.00	Rp0.00	Rp142.261.853.00	Rp5.220.000.00	Rp859.140.00	Rp6.079.140.00	Rp148.340.993.00	Rp41.301.407.00	Rp148.340.993.00	Rp41.301.407.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp189.642.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp142.261.853.00	Rp0.00	Rp142.261.853.00	Rp5.220.000.00	Rp859.140.00	Rp6.079.140.00	Rp148.340.993.00	Rp41.301.407.00	Rp148.340.993.00	Rp41.301.407.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp189.642.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp142.261.853.00	Rp0.00	Rp142.261.853.00	Rp5.220.000.00	Rp859.140.00	Rp6.079.140.00	Rp148.340.993.00	Rp41.301.407.00	Rp148.340.993.00	Rp41.301.407.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.251.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.821.058.00	Rp0.00	Rp7.821.058.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.821.058.00	Rp1.429.942.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp25.557.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp19.564.095.00	Rp0.00	Rp19.564.095.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp19.564.095.00	Rp5.992.905.00	Rp19.564.095.00	Rp5.992.905.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp1.463.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp859.140.00	Rp859.140.00	Rp859.140.00	Rp859.140.00	Rp859.140.00	Rp859.140.00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp73.371.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp42.624.000.00	Rp0.00	Rp42.624.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp42.624.000.00	Rp30.747.000.00	Rp42.624.000.00	Rp30.747.000.00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya	Rp80.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp72.252.700.00	Rp0.00	Rp72.252.700.00	Rp5.220.000.00	Rp0.00	Rp5.220.000.00	Rp77.472.700.00	Rp2.527.300.00	Rp5.220.000.00	Rp2.527.300.00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp18.923.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp18.923.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.923.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp18.923.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp18.923.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp18.923.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp0.00	Rp10.445.211.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	Rp10.445.211.00	Rp8.478.289.00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp93.950.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp67.871.100.00	Rp9.791.002.00	Rp77.662.102.00	Rp77.662.102.00	Rp16.287.898.00	Rp67.871.100.00	Rp16.287.898.00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp93.950.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp67.871.100.00	Rp9.791.002.00	Rp77.662.102.00	Rp77.662.102.00	Rp16.287.898.00	Rp67.871.100.00	Rp16.287.898.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp93.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.871.100,00	Rp9.791.002,00	Rp77.662.102,00	Rp77.662.102,00	Rp16.287.898,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.111.400,00	Rp2.797.000,00	Rp21.908.400,00	Rp21.908.400,00	Rp591.600,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.111.400,00	Rp2.797.000,00	Rp21.908.400,00	Rp21.908.400,00	Rp591.600,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.111.400,00	Rp2.797.000,00	Rp21.908.400,00	Rp21.908.400,00	Rp591.600,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp71.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.759.700,00	Rp6.994.002,00	Rp55.753.702,00	Rp55.753.702,00	Rp15.696.298,00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp71.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.759.700,00	Rp6.994.002,00	Rp55.753.702,00	Rp55.753.702,00	Rp15.696.298,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp71.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.759.700,00	Rp6.994.002,00	Rp55.753.702,00	Rp55.753.702,00	Rp15.696.298,00			
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp267.565.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00			
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp267.565.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00			
5.2	BELANJA MODAL	Rp267.565.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp267.565.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp267.565.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.730.000,00			
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp37.718.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.400.000,00	Rp0,00	Rp37.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.400.000,00			
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp37.718.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.400.000,00	Rp0,00	Rp37.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.400.000,00			
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp229.846.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.330.000,00	Rp0,00	Rp226.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.330.000,00			
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp84.346.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.900.000,00	Rp0,00	Rp83.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.900.000,00			
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use)	Rp145.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.430.000,00	Rp0,00	Rp142.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.430.000,00			
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp161.661.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.695.704,00	Rp7.979.714,00	Rp135.675.418,00	Rp135.675.418,00	Rp25.985.582,00			
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.611.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp2.300.000,00	Rp1.311.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.611.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp2.300.000,00	Rp1.311.000,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.611.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp2.300.000,00	Rp1.311.000,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.611.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp2.300.000,00	Rp1.311.000,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.611.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp2.300.000,00	Rp1.311.000,00			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp3.611.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp2.300.000,00	Rp1.311.000,00			
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp158.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.395.704,00	Rp7.979.714,00	Rp133.375.418,00	Rp133.375.418,00	Rp24.674.582,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp158.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.395.704,00	Rp7.979.714,00	Rp133.375.418,00	Rp133.375.418,00	Rp24.674.582,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1		3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp158.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.395.704,00	Rp7.979.714,00	Rp133.375.418,00	Rp133.375.418,00	Rp24.674.582,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp158.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.395.704,00	Rp7.979.714,00	Rp133.375.418,00	Rp133.375.418,00	Rp24.674.582,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp158.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.395.704,00	Rp7.979.714,00	Rp133.375.418,00	Rp133.375.418,00	Rp24.674.582,00			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp29.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.548.474,00	Rp805.307,00	Rp18.353.781,00	Rp18.353.781,00	Rp10.696.219,00			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.000,00	Rp70.000,00	Rp840.000,00	Rp840.000,00	Rp160.000,00			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp128.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.077.230,00	Rp7.104.407,00	Rp114.181.637,00	Rp114.181.637,00	Rp13.818.363,00			
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.778.010.280,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp1.792.069.401,00	Rp1.788.822.035,00	Rp3.580.891.436,00	Rp10.853.180,00	Rp8.201.250,00	Rp19.054.430,00	Rp3.599.945.866,00	Rp178.064.414,00			
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp964.364.936,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp797.967.280,00	Rp127.200.656,00	Rp925.167.936,00	Rp3.829.100,00	Rp3.966.600,00	Rp7.795.700,00	Rp932.963.636,00	Rp31.401.300,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp964.364.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp797.967.280,00	Rp127.200.656,00	Rp925.167.936,00	Rp3.829.100,00	Rp3.966.600,00	Rp7.795.700,00	Rp932.963.636,00	Rp31.401.300,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp964.364.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp797.967.280,00	Rp127.200.656,00	Rp925.167.936,00	Rp3.829.100,00	Rp3.966.600,00	Rp7.795.700,00	Rp932.963.636,00	Rp31.401.300,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp372.233.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.984.000,00	Rp0,00	Rp357.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.984.000,00	Rp14.249.000,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp372.233.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.984.000,00	Rp0,00	Rp357.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.984.000,00	Rp14.249.000,00			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp357.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.984.000,00	Rp0,00	Rp357.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.984.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp14.249.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.249.000,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp378.531.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp306.443.280,00	Rp61.088.656,00	Rp367.531.936,00	Rp3.829.100,00	Rp3.966.600,00	Rp7.795.700,00	Rp375.327.636,00	Rp3.204.300,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp353.669.856,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.724.880,00	Rp56.944.976,00	Rp342.669.856,00	Rp3.829.100,00	Rp3.966.600,00	Rp7.795.700,00	Rp350.465.556,00	Rp3.204.300,00			
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp47.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp47.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp295.669.856,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.724.880,00	Rp47.944.976,00	Rp295.669.856,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.669.856,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.829.100,00	Rp3.966.600,00	Rp7.795.700,00	Rp7.795.700,00	Rp3.204.300,00			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp24.862.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.718.400,00	Rp4.143.680,00	Rp24.862.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.862.080,00	Rp0,00			
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp12.664.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.554.000,00	Rp2.110.800,00	Rp12.664.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.664.800,00	Rp0,00			
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp690.432,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.360,00	Rp115.072,00	Rp690.432,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp690.432,00	Rp0,00			
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp863.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp719.200,00	Rp143.840,00	Rp863.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp863.040,00	Rp0,00			
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp10.643.808,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.869.840,00	Rp1.773.968,00	Rp10.643.808,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.643.808,00	Rp0,00			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp213.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.540.000,00	Rp66.112.000,00	Rp199.652.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.652.000,00	Rp13.948.000,00			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp213.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.540.000,00	Rp66.112.000,00	Rp199.652.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.652.000,00	Rp13.948.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor- Kenderaan Dinas Bermotor Perorangan	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.540.000,00	Rp42.545.000,00	Rp176.085.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.085.000,00	Rp3.915.000,00	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor- Kenderaan Bermotor Beroda Dua	Rp33.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.567.000,00	Rp23.567.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.567.000,00	Rp10.033.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp2.738.415.344,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp958.259.821,00	Rp1.642.751.279,00	Rp2.601.011.100,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp2.608.035.180,00	Rp130.380.164,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp483.415.344,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp395.637.323,00	Rp79.068.244,00	Rp474.705.567,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp481.729.647,00	Rp1.685.697,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp483.415.344,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp395.637.323,00	Rp79.068.244,00	Rp474.705.567,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp481.729.647,00	Rp1.685.697,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp483.415.344,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp395.637.323,00	Rp79.068.244,00	Rp474.705.567,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp481.729.647,00	Rp1.685.697,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp461.904.563,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp376.213.823,00	Rp76.996.404,00	Rp453.210.227,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp460.234.307,00	Rp1.670.256,00	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp23.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.700.000,00	Rp10.100.000,00	Rp21.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.800.000,00	Rp1.600.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp148.838.367,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.845.245,00	Rp5.993.122,00	Rp148.838.367,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.838.367,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp178.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.771.748,00	Rp42.923.916,00	Rp171.695.664,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp0,00	Rp7.024.080,00	Rp178.719.744,00	Rp70.256,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp110.876.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.896.830,00	Rp17.979.366,00	Rp110.876.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.876.196,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Suransi	Rp21.510.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.423.500,00	Rp2.071.840,00	Rp21.495.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.495.340,00	Rp15.441,00	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp10.949.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.894.375,00	Rp1.055.400,00	Rp10.949.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.949.775,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp596.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp539.400,00	Rp57.536,00	Rp596.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp596.936,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp761.611,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.250,00	Rp71.920,00	Rp746.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp746.170,00	Rp15.441,00	
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp9.202.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.315.475,00	Rp886.984,00	Rp9.202.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.202.459,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL	Rp2.255.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.622.498,00	Rp1.563.683.035,00	Rp2.126.305.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.126.305.533,00	Rp128.694.467,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp2.255.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.622.498,00	Rp1.563.683.035,00	Rp2.126.305.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.126.305.533,00	Rp128.694.467,00	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp2.255.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.622.498,00	Rp1.563.683.035,00	Rp2.126.305.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.126.305.533,00	Rp128.694.467,00	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempa Kerja	Rp2.255.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.622.498,00	Rp1.563.683.035,00	Rp2.126.305.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.126.305.533,00	Rp128.694.467,00	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp2.255.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.622.498,00	Rp1.563.683.035,00	Rp2.126.305.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.126.305.533,00	Rp128.694.467,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp75.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.842.300,00	Rp18.870.100,00	Rp54.712.400,00	Rp0,00	Rp4.234.650,00	Rp4.234.650,00	Rp0,00	Rp4.234.650,00	Rp58.947.050,00	Rp16.282.950,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp75.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.842.300,00	Rp18.870.100,00	Rp54.712.400,00	Rp0,00	Rp4.234.650,00	Rp4.234.650,00	Rp0,00	Rp4.234.650,00	Rp58.947.050,00	Rp16.282.950,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp75.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.842.300,00	Rp18.870.100,00	Rp54.712.400,00	Rp0,00	Rp4.234.650,00	Rp4.234.650,00	Rp0,00	Rp4.234.650,00	Rp58.947.050,00	Rp16.282.950,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp75.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.842.300,00	Rp18.870.100,00	Rp54.712.400,00	Rp0,00	Rp4.234.650,00	Rp4.234.650,00	Rp58.947.050,00	Rp16.282.950,00			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp75.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.842.300,00	Rp18.870.100,00	Rp54.712.400,00	Rp0,00	Rp4.234.650,00	Rp4.234.650,00	Rp58.947.050,00	Rp16.282.950,00			
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp12.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.469.300,00	Rp0,00	Rp8.469.300,00	Rp0,00	Rp4.234.650,00	Rp4.234.650,00	Rp12.703.950,00	Rp106.050,00			
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp34.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.687.750,00	Rp18.870.100,00	Rp33.557.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.557.850,00	Rp752.150,00			
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp28.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.685.250,00	Rp0,00	Rp12.685.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.685.250,00	Rp15.424.750,00			
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Rp243.271.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.555.410,00	Rp168.414.128,00	Rp201.969.538,00	Rp23.765.450,00	Rp0,00	Rp23.765.450,00	Rp225.734.988,00	Rp17.536.504,00			
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp187.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp161.903.046,00	Rp9.475.450,00	Rp0,00	Rp9.475.450,00	Rp171.378.496,00	Rp16.096.504,00			
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Rp17.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.475.450,00	Rp0,00	Rp9.475.450,00	Rp9.475.450,00	Rp7.999.550,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp17.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.475.450,00	Rp0,00	Rp9.475.450,00	Rp9.475.450,00	Rp7.999.550,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp17.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.475.450,00	Rp0,00	Rp9.475.450,00	Rp9.475.450,00	Rp7.999.550,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.015.450,00	Rp0,00	Rp1.015.450,00	Rp1.015.450,00	Rp19.550,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.015.450,00	Rp0,00	Rp1.015.450,00	Rp1.015.450,00	Rp19.550,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.015.450,00	Rp0,00	Rp1.015.450,00	Rp1.015.450,00	Rp19.550,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp14.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.660.000,00	Rp0,00	Rp6.660.000,00	Rp6.660.000,00	Rp7.980.000,00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp14.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.660.000,00	Rp0,00	Rp6.660.000,00	Rp6.660.000,00	Rp7.980.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)		7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp5.760.000,00	Rp7.680.000,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp300.000,00		
3.25.02.1.01.0013	Pengintegrasian Materi Teknis Peraikan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp161.903.046,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp8.096.954,00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp161.903.046,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp8.096.954,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp161.903.046,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp8.096.954,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp161.903.046,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp8.096.954,00		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp161.903.046,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp8.096.954,00		
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp161.903.046,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.903.046,00	Rp8.096.954,00		
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp55.796.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp33.555.410,00	Rp6.511.082,00	Rp40.066.492,00	Rp14.290.000,00	Rp0,00	Rp14.290.000,00	Rp54.356.492,00	Rp1.440.000,00		
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp55.796.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp33.555.410,00	Rp6.511.082,00	Rp40.066.492,00	Rp14.290.000,00	Rp0,00	Rp14.290.000,00	Rp54.356.492,00	Rp1.440.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp55.796.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp33.555.410,00	Rp6.511.082,00	Rp40.066.492,00	Rp14.290.000,00	Rp0,00	Rp14.290.000,00	Rp54.356.492,00	Rp1.440.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp55.796.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp33.555.410,00	Rp6.511.082,00	Rp40.066.492,00	Rp14.290.000,00	Rp0,00	Rp14.290.000,00	Rp54.356.492,00	Rp1.440.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp41.866.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp33.555.410,00	Rp6.511.082,00	Rp40.066.492,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp41.866.492,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp38.758.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp30.965.610,00	Rp5.993.122,00	Rp36.958.732,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp38.758.732,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp36.958.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp30.965.610,00	Rp5.993.122,00	Rp36.958.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.958.732,00	Rp0,00		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Suransi	Rp3.107.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp2.589.800,00	Rp517.960,00	Rp3.107.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.107.760,00	Rp0,00		
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.583.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp1.319.250,00	Rp263.850,00	Rp1.583.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.583.100,00	Rp0,00		
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp86.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp71.920,00	Rp14.384,00	Rp86.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.304,00	Rp0,00		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp107.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp89.900,00	Rp17.980,00	Rp107.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.880,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini				
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp1.330.476.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.108.730.00	Rp221.746.00	Rp1.330.476.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.330.476.00	Rp0.00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp11.680.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10.240.000.00	Rp0.00	Rp10.240.000.00	Rp10.240.000.00	Rp1.440.000.00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp11.680.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10.240.000.00	Rp0.00	Rp10.240.000.00	Rp10.240.000.00	Rp1.440.000.00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.680.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.240.000.00	Rp0.00	Rp6.240.000.00	Rp6.240.000.00	Rp1.440.000.00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.000.000.00	Rp0.00	Rp4.000.000.00	Rp4.000.000.00	Rp0.00			
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Rp432.885.697.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400.833.115.00	Rp6.511.082.00	Rp407.344.197.00	Rp25.079.050.00	Rp0.00	Rp25.079.050.00	Rp432.423.247.00	Rp462.450.00			
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 MI	Rp416.024.197.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400.833.115.00	Rp6.511.082.00	Rp407.344.197.00	Rp8.380.000.00	Rp0.00	Rp8.380.000.00	Rp415.724.197.00	Rp300.000.00			
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp416.024.197.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400.833.115.00	Rp6.511.082.00	Rp407.344.197.00	Rp8.380.000.00	Rp0.00	Rp8.380.000.00	Rp415.724.197.00	Rp300.000.00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp416.024.197.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400.833.115.00	Rp6.511.082.00	Rp407.344.197.00	Rp8.380.000.00	Rp0.00	Rp8.380.000.00	Rp415.724.197.00	Rp300.000.00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp66.024.197.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp50.833.115.00	Rp6.511.082.00	Rp57.344.197.00	Rp8.380.000.00	Rp0.00	Rp8.380.000.00	Rp65.724.197.00	Rp300.000.00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp700.000.00	Rp300.000.00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp700.000.00	Rp300.000.00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp1.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp700.000.00	Rp300.000.00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp57.344.197.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp50.833.115.00	Rp6.511.082.00	Rp57.344.197.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp57.344.197.00	Rp0.00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp52.941.537.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp46.948.415.00	Rp5.993.122.00	Rp52.941.537.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp52.941.537.00	Rp0.00			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp52.941.537.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp46.948.415.00	Rp5.993.122.00	Rp52.941.537.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp52.941.537.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp4.402.660.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.884.700.00	Rp517.960.00	Rp4.402.660.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.402.660.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.242.725.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.978.875.00	Rp263.850.00	Rp2.242.725.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.242.725.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp122.264.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp107.890.00	Rp14.384.00	Rp122.264.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp122.264.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp152.830.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp134.850.00	Rp17.980.00	Rp152.830.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp152.830.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp1.884.841.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.663.095.00	Rp221.746.00	Rp1.884.841.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.884.841.00	Rp0.00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp7.680.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.680.000.00	Rp0.00	Rp7.680.000.00	Rp7.680.000.00	Rp0.00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp7.680.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.680.000.00	Rp0.00	Rp7.680.000.00	Rp7.680.000.00	Rp0.00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.680.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.680.000.00	Rp0.00	Rp7.680.000.00	Rp7.680.000.00	Rp0.00			
5.1.05	Belanja Hibah	Rp350.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp350.000.000.00	Rp0.00	Rp350.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp350.000.000.00	Rp0.00			
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp350.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp350.000.000.00	Rp0.00	Rp350.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp350.000.000.00	Rp0.00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00
3.25.03.1.09	Pendataran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp16.861.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.699.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp162.450,00
3.25.03.1.09.0001	Pemetaan Peryairatan dan Prosedur Pendataran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp16.861.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.699.050,00	Rp0,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp162.450,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp16.861.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.699.050,00	Rp0,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp162.450,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.861.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.699.050,00	Rp0,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp16.699.050,00	Rp162.450,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp541.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.050,00	Rp0,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp162.450,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp541.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.050,00	Rp0,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp162.450,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp541.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.050,00	Rp0,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp379.050,00	Rp162.450,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp16.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.320.000,00	Rp0,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp16.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.320.000,00	Rp0,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp16.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.320.000,00	Rp0,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp175.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp27.556.000,00	Rp0,00	Rp27.556.000,00	Rp27.556.000,00	Rp27.556.000,00	Rp27.556.000,00	Rp170.721.000,00	Rp5.099.000,00
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp175.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp27.556.000,00	Rp0,00	Rp27.556.000,00	Rp27.556.000,00	Rp27.556.000,00	Rp27.556.000,00	Rp170.721.000,00	Rp5.099.000,00
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp159.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp11.870.000,00	Rp0,00	Rp11.870.000,00	Rp11.870.000,00	Rp11.870.000,00	Rp11.870.000,00	Rp155.035.000,00	Rp4.685.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp159.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp11.870.000,00	Rp0,00	Rp11.870.000,00	Rp11.870.000,00	Rp11.870.000,00	Rp11.870.000,00	Rp155.035.000,00	Rp4.685.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp159.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp11.870.000,00	Rp0,00	Rp11.870.000,00	Rp11.870.000,00	Rp11.870.000,00	Rp11.870.000,00	Rp155.035.000,00	Rp4.685.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp148.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp143.515.000,00	Rp4.685.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp148.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp143.515.000,00	Rp4.685.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp150.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp147.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp143.165.000,00	Rp4.535.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.686.000,00	Rp0,00	Rp15.686.000,00	Rp15.686.000,00	Rp14.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp16.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.686.000,00	Rp0,00	Rp15.686.000,00	Rp15.686.000,00	Rp14.000,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.686.000,00	Rp0,00	Rp15.686.000,00	Rp15.686.000,00	Rp14.000,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.000,00	Rp0,00	Rp266.000,00	Rp266.000,00	Rp14.000,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.000,00	Rp0,00	Rp266.000,00	Rp266.000,00	Rp14.000,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.000,00	Rp0,00	Rp266.000,00	Rp266.000,00	Rp14.000,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp3.900.000,00	Rp300.000,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp3.900.000,00	Rp300.000,00			
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp3.900.000,00	Rp300.000,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00			
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp150.791.884,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.110.820,00	Rp13.022.164,00	Rp104.132.984,00	Rp43.248.750,00	Rp0,00	Rp43.248.750,00	Rp147.381.734,00	Rp3.410.150,00			
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Rp150.791.884,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.110.820,00	Rp13.022.164,00	Rp104.132.984,00	Rp43.248.750,00	Rp0,00	Rp43.248.750,00	Rp147.381.734,00	Rp3.410.150,00			
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Rp20.708.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.298.750,00	Rp0,00	Rp17.298.750,00	Rp17.298.750,00	Rp3.410.150,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.708.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.298.750,00	Rp0,00	Rp17.298.750,00	Rp17.298.750,00	Rp3.410.150,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.708.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.298.750,00	Rp0,00	Rp17.298.750,00	Rp17.298.750,00	Rp3.410.150,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.408.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.298.750,00	Rp0,00	Rp6.298.750,00	Rp6.298.750,00	Rp110.150,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp6.408.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.298.750,00	Rp0,00	Rp6.298.750,00	Rp6.298.750,00	Rp110.150,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp783.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp780.000,00	Rp3.900,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.518.750,00	Rp0,00	Rp5.518.750,00	Rp5.518.750,00	Rp106.250,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp3.400.000,00	Rp900.000,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp3.400.000,00	Rp900.000,00			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp3.400.000,00	Rp900.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.600.000,00	Rp0,00	Rp7.600.000,00	Rp7.600.000,00	Rp2.400.000,00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.600.000,00	Rp0,00	Rp7.600.000,00	Rp7.600.000,00	Rp2.400.000,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00	Rp2.400.000,00			
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (PKMASWAS)	Rp130.082.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.110.820,00	Rp13.022.164,00	Rp104.132.984,00	Rp25.950.000,00	Rp0,00	Rp25.950.000,00	Rp130.082.984,00	Rp0,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp130.082.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.110.820,00	Rp13.022.164,00	Rp104.132.984,00	Rp25.950.000,00	Rp0,00	Rp25.950.000,00	Rp130.082.984,00	Rp0,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp130.082.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.110.820,00	Rp13.022.164,00	Rp104.132.984,00	Rp25.950.000,00	Rp0,00	Rp25.950.000,00	Rp130.082.984,00	Rp0,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp80.132.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.110.820,00	Rp13.022.164,00	Rp80.132.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.132.984,00	Rp80.132.984,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp73.917.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.931.220,00	Rp11.986.244,00	Rp73.917.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.917.464,00	Rp73.917.464,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp73.917.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.931.220,00	Rp11.986.244,00	Rp73.917.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.917.464,00	Rp73.917.464,00	Rp0,00			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp6.215.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.179.600,00	Rp1.035.920,00	Rp6.215.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.215.520,00	Rp6.215.520,00	Rp0,00			
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp3.166.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.638.500,00	Rp527.700,00	Rp3.166.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.166.200,00	Rp3.166.200,00	Rp0,00			
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp172.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.840,00	Rp28.768,00	Rp172.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.608,00	Rp172.608,00	Rp0,00			
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp215.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.800,00	Rp35.960,00	Rp215.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.760,00	Rp215.760,00	Rp0,00			
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp2.660.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.217.460,00	Rp443.492,00	Rp2.660.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.660.952,00	Rp2.660.952,00	Rp0,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp19.200.000,00	Rp19.200.000,00	Rp0,00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp19.200.000,00	Rp19.200.000,00	Rp0,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp19.200.000,00	Rp19.200.000,00	Rp0,00			
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Kelaga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombean	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00			
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp329.160.797,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.980.275,00	Rp22.786.457,00	Rp210.766.732,00	Rp95.000.760,00	Rp10.850.250,00	Rp105.851.010,00	Rp316.617.742,00	Rp12.543.055,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp329.160.797.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp187.980.275.00	Rp22.786.457.00	Rp210.766.732.00	Rp95.000.760.00	Rp10.850.250.00	Rp105.851.010.00	Rp316.617.742.00	Rp12.543.055.00			
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Perysatan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp329.160.797.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp187.980.275.00	Rp22.786.457.00	Rp210.766.732.00	Rp95.000.760.00	Rp10.850.250.00	Rp105.851.010.00	Rp316.617.742.00	Rp12.543.055.00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp329.160.797.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp187.980.275.00	Rp22.786.457.00	Rp210.766.732.00	Rp95.000.760.00	Rp10.850.250.00	Rp105.851.010.00	Rp316.617.742.00	Rp12.543.055.00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp329.160.797.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp187.980.275.00	Rp22.786.457.00	Rp210.766.732.00	Rp95.000.760.00	Rp10.850.250.00	Rp105.851.010.00	Rp316.617.742.00	Rp12.543.055.00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp222.359.100.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp137.147.160.00	Rp16.275.375.00	Rp153.422.535.00	Rp45.560.350.00	Rp10.850.250.00	Rp56.410.600.00	Rp209.833.135.00	Rp12.525.965.00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp222.359.100.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp137.147.160.00	Rp16.275.375.00	Rp153.422.535.00	Rp45.560.350.00	Rp10.850.250.00	Rp56.410.600.00	Rp209.833.135.00	Rp12.525.965.00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp3.524.100.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.044.500.00	Rp0.00	Rp3.044.500.00	Rp3.044.500.00	Rp479.600.00			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp213.210.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp137.147.160.00	Rp16.275.375.00	Rp153.422.535.00	Rp36.890.850.00	Rp10.850.250.00	Rp47.741.100.00	Rp201.163.635.00	Rp12.046.365.00			
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp5.625.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.625.000.00	Rp0.00	Rp5.625.000.00	Rp5.625.000.00	Rp0.00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp58.801.697.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp50.833.115.00	Rp6.511.082.00	Rp57.344.197.00	Rp1.440.410.00	Rp0.00	Rp1.440.410.00	Rp58.784.607.00	Rp17.090.00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp52.941.537.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp46.948.415.00	Rp5.993.122.00	Rp52.941.537.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp52.941.537.00	Rp0.00			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp52.941.537.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp46.948.415.00	Rp5.993.122.00	Rp52.941.537.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp52.941.537.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Suransi	Rp4.402.660.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.884.700.00	Rp517.960.00	Rp4.402.660.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.402.660.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.242.725.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.978.875.00	Rp263.850.00	Rp2.242.725.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.242.725.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp122.264.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp107.880.00	Rp14.384.00	Rp122.264.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp122.264.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp152.830.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp134.850.00	Rp17.980.00	Rp152.830.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp152.830.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp1.884.841.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.663.095.00	Rp221.746.00	Rp1.884.841.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.884.841.00	Rp0.00			
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp1.457.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.440.410.00	Rp0.00	Rp1.440.410.00	Rp1.440.410.00	Rp17.090.00			
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp1.457.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.440.410.00	Rp0.00	Rp1.440.410.00	Rp1.440.410.00	Rp17.090.00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp48.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp48.000.000.00	Rp0.00	Rp48.000.000.00	Rp48.000.000.00	Rp0.00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp48.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp48.000.000.00	Rp0.00	Rp48.000.000.00	Rp48.000.000.00	Rp0.00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp48.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp48.000.000.00	Rp0.00	Rp48.000.000.00	Rp48.000.000.00	Rp0.00			
UP/D Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut		Rp1.438.061.254.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.110.713.646.00	Rp73.908.896.00	Rp1.184.622.542.00	Rp154.322.039.00	Rp11.277.953.00	Rp165.599.992.00	Rp1.350.222.534.00	Rp87.838.720.00			
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp645.746.060.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp354.957.616.00	Rp60.886.732.00	Rp415.844.348.00	Rp154.322.039.00	Rp11.277.953.00	Rp165.599.992.00	Rp581.444.340.00	Rp64.301.720.00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)		
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp46.277.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp33.908.560,00	Rp1.130.000,00	Rp35.038.560,00	Rp41.914.560,00	Rp4.362.640,00		
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.664.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp4.400.000,00	Rp264.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.664.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp4.400.000,00	Rp264.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.664.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp4.400.000,00	Rp264.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.664.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp4.400.000,00	Rp264.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.664.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp4.400.000,00	Rp264.000,00		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp4.664.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp4.400.000,00	Rp264.000,00		
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	Rp7.117.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.970.500,00	Rp0,00	Rp5.970.500,00	Rp5.970.500,00	Rp1.146.700,00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp7.117.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.970.500,00	Rp0,00	Rp5.970.500,00	Rp5.970.500,00	Rp1.146.700,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.117.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.970.500,00	Rp0,00	Rp5.970.500,00	Rp5.970.500,00	Rp1.146.700,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.117.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.970.500,00	Rp0,00	Rp5.970.500,00	Rp5.970.500,00	Rp1.146.700,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.117.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.970.500,00	Rp0,00	Rp5.970.500,00	Rp5.970.500,00	Rp1.146.700,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.864.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.009.000,00	Rp0,00	Rp4.009.000,00	Rp4.009.000,00	Rp855.800,00		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp2.252.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.961.500,00	Rp0,00	Rp1.961.500,00	Rp1.961.500,00	Rp290.900,00		
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp22.300.540,00	Rp1.130.000,00	Rp23.430.540,00	Rp30.306.540,00	Rp2.193.460,00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp22.300.540,00	Rp1.130.000,00	Rp23.430.540,00	Rp30.306.540,00	Rp2.193.460,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp22.300.540,00	Rp1.130.000,00	Rp23.430.540,00	Rp30.306.540,00	Rp2.193.460,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp22.300.540,00	Rp1.130.000,00	Rp23.430.540,00	Rp30.306.540,00	Rp2.193.460,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp22.300.540,00	Rp1.130.000,00	Rp23.430.540,00	Rp30.306.540,00	Rp2.193.460,00		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp0,00	Rp6.876.000,00	Rp22.300.540,00	Rp1.130.000,00	Rp23.430.540,00	Rp30.306.540,00	Rp2.193.460,00		
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Rp1.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp1.237.520,00	Rp758.480,00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp1.237.520,00	Rp758.480,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp1.237.520,00	Rp758.480,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp1.237.520,00	Rp758.480,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp1.237.520,00	Rp758.480,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp1.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp0,00	Rp1.237.520,00	Rp1.237.520,00	Rp758.480,00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1		3	4	5	6 = (4+5)		7	8	9 = (7+8)	10	11		12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp38.554.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp4.054.200,00	Rp4.054.200,00
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp38.554.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp4.054.200,00	Rp4.054.200,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp38.554.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp4.054.200,00	Rp4.054.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp38.554.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp4.054.200,00	Rp4.054.200,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp38.554.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp4.054.200,00	Rp4.054.200,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp19.677.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp19.600.000,00	Rp0,00	Rp19.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.600.000,00	Rp77.600,00	Rp77.600,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp19.677.600,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp19.600.000,00	Rp0,00	Rp19.600.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp19.600.000,00	Rp77.600,00	Rp77.600,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp18.876.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp14.900.000,00	Rp0,00	Rp14.900.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp14.900.000,00	Rp3.976.600,00	Rp3.976.600,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp18.876.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp14.900.000,00	Rp0,00	Rp14.900.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp14.900.000,00	Rp3.976.600,00	Rp3.976.600,00
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp129.070.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.838.549,00	Rp6.692.453,00	Rp0,00	Rp89.531.002,00	Rp88.531.002,00	Rp89.531.198,00	Rp89.531.198,00
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp471.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00		Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp171.000,00	Rp171.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp471.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00		Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp171.000,00	Rp171.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp471.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00		Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp171.000,00	Rp171.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp471.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00		Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp171.000,00	Rp171.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp471.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00		Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp171.000,00	Rp171.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp471.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00		Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp171.000,00	Rp171.000,00
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp128.599.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.538.549,00	Rp6.692.453,00	Rp0,00	Rp89.231.002,00	Rp88.231.002,00	Rp89.368.198,00	Rp89.368.198,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp128.599.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.538.549,00	Rp6.692.453,00	Rp0,00	Rp89.231.002,00	Rp88.231.002,00	Rp89.368.198,00	Rp89.368.198,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp128.599.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.538.549,00	Rp6.692.453,00	Rp0,00	Rp89.231.002,00	Rp88.231.002,00	Rp89.368.198,00	Rp89.368.198,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp128.599.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.538.549,00	Rp6.692.453,00	Rp0,00	Rp89.231.002,00	Rp88.231.002,00	Rp89.368.198,00	Rp89.368.198,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp128.599.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.538.549,00	Rp6.692.453,00	Rp0,00	Rp89.231.002,00	Rp88.231.002,00	Rp89.368.198,00	Rp89.368.198,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00		Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp122.599.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.538.549,00	Rp6.692.453,00	Rp0,00	Rp83.231.002,00	Rp83.231.002,00	Rp39.368.198,00	Rp39.368.198,00
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp431.844.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp313.581.616,00	Rp60.886.732,00	Rp374.468.348,00	Rp37.574.930,00	Rp3.455.500,00		Rp41.030.430,00	Rp415.498.778,00	Rp16.345.682,00	Rp16.345.682,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp166.497.984.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp112.110.820.00	Rp13.022.164.00	Rp125.132.984.00	Rp28.815.900.00	Rp1.351.800.00	Rp30.167.700.00	Rp155.300.684.00	Rp11.197.300.00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp166.497.984.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp112.110.820.00	Rp13.022.164.00	Rp125.132.984.00	Rp28.815.900.00	Rp1.351.800.00	Rp30.167.700.00	Rp155.300.684.00	Rp11.197.300.00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp166.497.984.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp112.110.820.00	Rp13.022.164.00	Rp125.132.984.00	Rp28.815.900.00	Rp1.351.800.00	Rp30.167.700.00	Rp155.300.684.00	Rp11.197.300.00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp85.497.984.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp67.110.820.00	Rp13.022.164.00	Rp80.132.984.00	Rp1.589.900.00	Rp1.351.800.00	Rp2.941.700.00	Rp83.074.684.00	Rp2.423.300.00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp79.282.464.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp61.931.220.00	Rp11.986.244.00	Rp73.917.464.00	Rp1.589.900.00	Rp1.351.800.00	Rp2.941.700.00	Rp76.859.164.00	Rp2.423.300.00			
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp73.917.464.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp61.931.220.00	Rp11.986.244.00	Rp73.917.464.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp73.917.464.00	Rp0.00			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp5.365.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.589.900.00	Rp1.351.800.00	Rp2.941.700.00	Rp2.941.700.00	Rp2.423.300.00			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp6.215.520.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.179.600.00	Rp1.035.920.00	Rp6.215.520.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.215.520.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp3.166.200.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.638.500.00	Rp527.700.00	Rp3.166.200.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.166.200.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp172.608.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp143.840.00	Rp28.768.00	Rp172.608.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp172.608.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp215.760.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp179.800.00	Rp35.960.00	Rp215.760.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp215.760.00	Rp0.00			
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp2.660.952.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.217.460.00	Rp443.492.00	Rp2.660.952.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.660.952.00	Rp0.00			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp36.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp27.226.000.00	Rp0.00	Rp27.226.000.00	Rp27.226.000.00	Rp8.774.000.00			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp36.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp27.226.000.00	Rp0.00	Rp27.226.000.00	Rp27.226.000.00	Rp8.774.000.00			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp36.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp27.226.000.00	Rp0.00	Rp27.226.000.00	Rp27.226.000.00	Rp8.774.000.00			
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp265.346.476.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp201.470.796.00	Rp47.864.568.00	Rp249.335.364.00	Rp8.759.030.00	Rp2.103.700.00	Rp10.862.730.00	Rp260.198.094.00	Rp5.148.382.00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp265.346.476.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp201.470.796.00	Rp47.864.568.00	Rp249.335.364.00	Rp8.759.030.00	Rp2.103.700.00	Rp10.862.730.00	Rp260.198.094.00	Rp5.148.382.00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp265.346.476.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp201.470.796.00	Rp47.864.568.00	Rp249.335.364.00	Rp8.759.030.00	Rp2.103.700.00	Rp10.862.730.00	Rp260.198.094.00	Rp5.148.382.00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp20.577.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15.810.600.00	Rp0.00	Rp15.810.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15.810.600.00	Rp4.766.400.00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp20.577.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15.810.600.00	Rp0.00	Rp15.810.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15.810.600.00	Rp4.766.400.00			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp8.936.200.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.835.000.00	Rp0.00	Rp7.835.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.835.000.00	Rp1.101.200.00			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp11.640.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.975.600.00	Rp0.00	Rp7.975.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.975.600.00	Rp3.665.200.00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp233.669.476,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.660.196,00	Rp47.864.568,00	Rp233.524.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.524.764,00	Rp144.712,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp224.346.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.890.796,00	Rp46.310.688,00	Rp224.201.484,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.201.484,00	Rp144.712,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp113.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.993.966,00	Rp28.331.322,00	Rp113.325.288,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.325.288,00	Rp144.712,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp110.876.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.896.830,00	Rp17.979.366,00	Rp110.876.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.876.196,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp9.323.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.769.400,00	Rp1.553.890,00	Rp9.323.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.323.280,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.749.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.957.750,00	Rp791.550,00	Rp4.749.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.749.300,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp258.912,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.760,00	Rp43.152,00	Rp258.912,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.912,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp323.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp269.700,00	Rp53.940,00	Rp323.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.640,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp3.991.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.326.190,00	Rp665.238,00	Rp3.991.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.991.428,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp11.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.759.030,00	Rp2.103.700,00	Rp10.862.730,00	Rp10.862.730,00	Rp237.270,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.121.230,00	Rp2.103.700,00	Rp4.224.930,00	Rp4.224.930,00	Rp75070,00	
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp2.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.461.240,00	Rp1.423.700,00	Rp2.884.940,00	Rp2.884.940,00	Rp2.884.940,00	Rp2.884.940,00	Rp35.060,00	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp1.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.990,00	Rp680.000,00	Rp1.339.990,00	Rp1.339.990,00	Rp1.339.990,00	Rp1.339.990,00	Rp40.010,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp6.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.637.800,00	Rp0,00	Rp6.637.800,00	Rp0,00	Rp6.637.800,00	Rp6.637.800,00	Rp162.200,00	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp6.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.637.800,00	Rp0,00	Rp6.637.800,00	Rp0,00	Rp6.637.800,00	Rp6.637.800,00	Rp162.200,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN BUDIDAYA	Rp792.315.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp755.756.030,00	Rp13.022.164,00	Rp768.778.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp768.778.194,00	Rp23.537.000,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Rp792.315.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp755.756.030,00	Rp13.022.164,00	Rp768.778.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp768.778.194,00	Rp23.537.000,00	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp792.315.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp755.756.030,00	Rp13.022.164,00	Rp768.778.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp768.778.194,00	Rp23.537.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp792.315.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp755.756.030,00	Rp13.022.164,00	Rp768.778.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp768.778.194,00	Rp23.537.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp792.315.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp755.756.030,00	Rp13.022.164,00	Rp768.778.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp768.778.194,00	Rp23.537.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp677.626.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.089.800,00	Rp0,00	Rp654.089.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.089.800,00	Rp23.537.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp677.626.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.089.800,00	Rp0,00	Rp654.089.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.089.800,00	Rp23.537.000,00	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp27.835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.698.000,00	Rp0,00	Rp24.698.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.698.000,00	Rp3.137.000,00	
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibi Temak/Bibi Ikan	Rp237.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.260.000,00	Rp0,00	Rp226.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.260.000,00	Rp11.420.000,00	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp26.421.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.218.000,00	Rp0,00	Rp26.218.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.218.000,00	Rp203.800,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	Rp367.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.113.800,00	Rp0,00	Rp361.113.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.113.800,00	Rp6.676.200,00	
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Rp17.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.800.000,00	Rp0,00	Rp15.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.800.000,00	Rp2.100.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp114.688.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.666.230,00	Rp13.022.164,00	Rp114.688.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.688.394,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp105.883.074,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.896.830,00	Rp11.968.244,00	Rp105.883.074,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.883.074,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp105.883.074,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.896.830,00	Rp11.968.244,00	Rp105.883.074,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.883.074,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp8.805.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.769.400,00	Rp1.035.920,00	Rp8.805.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.805.320,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.485.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.957.750,00	Rp527.700,00	Rp4.485.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.485.450,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp244.528,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.760,00	Rp28.768,00	Rp244.528,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp244.528,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp305.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp269.700,00	Rp35.960,00	Rp305.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp305.660,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp3.769.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.326.190,00	Rp443.492,00	Rp3.769.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.769.682,00	Rp0,00	
UP/ID Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan			Rp1.157.605.758,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp669.823.551,00	Rp163.762.022,00	Rp833.585.573,00	Rp161.467.285,00	Rp16.508.884,00	Rp177.976.169,00	Rp1.011.561.742,00	Rp146.044.016,00			
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp620.939.358,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp368.436.062,00	Rp65.277.272,00	Rp433.773.334,00	Rp109.732.784,00	Rp13.983.884,00	Rp123.716.668,00	Rp557.490.002,00	Rp63.443.356,00			
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp41.933.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp12.760.000,00	Rp568.000,00	Rp13.328.000,00	Rp37.231.180,00	Rp4.701.820,00			
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp8.433.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.810.000,00	Rp0,00	Rp5.810.000,00	Rp5.810.000,00	Rp2.623.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.433.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.810.000,00	Rp0,00	Rp5.810.000,00	Rp5.810.000,00	Rp2.623.000,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.433.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.810.000,00	Rp0,00	Rp5.810.000,00	Rp5.810.000,00	Rp2.623.000,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.433.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.810.000,00	Rp0,00	Rp5.810.000,00	Rp5.810.000,00	Rp2.623.000,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.433.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.810.000,00	Rp0,00	Rp5.810.000,00	Rp5.810.000,00	Rp2.623.000,00			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.293.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.930.000,00	Rp0,00	Rp3.930.000,00	Rp3.930.000,00	Rp2.363.100,00			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.139.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.880.000,00	Rp0,00	Rp1.880.000,00	Rp1.880.000,00	Rp253.900,00			
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp6.250.000,00	Rp568.000,00	Rp6.818.000,00	Rp30.721.180,00	Rp1.778.820,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp6.250.000,00	Rp568.000,00	Rp6.818.000,00	Rp30.721.180,00	Rp1.778.820,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp6.250.000,00	Rp568.000,00	Rp6.818.000,00	Rp30.721.180,00	Rp1.778.820,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp6.250.000,00	Rp568.000,00	Rp6.818.000,00	Rp30.721.180,00	Rp1.778.820,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp6.250.000,00	Rp568.000,00	Rp6.818.000,00	Rp30.721.180,00	Rp1.778.820,00			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp0,00	Rp23.903.180,00	Rp6.250.000,00	Rp568.000,00	Rp6.818.000,00	Rp30.721.180,00	Rp1.778.820,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)		7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp1.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp700.000.00	Rp300.000.00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp700.000.00	Rp300.000.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp700.000.00	Rp300.000.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp700.000.00	Rp300.000.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp1.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp700.000.00	Rp300.000.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp1.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp0.00	Rp700.000.00	Rp700.000.00	Rp300.000.00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp37.072.080.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp36.800.000.00	Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp272.080.00	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp37.072.080.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp36.800.000.00	Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp272.080.00	
5.2	BELANJA MODAL	Rp37.072.080.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp36.800.000.00	Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp272.080.00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp37.072.080.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp36.800.000.00	Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp272.080.00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp37.072.080.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp36.800.000.00	Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp272.080.00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp37.072.080.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp36.800.000.00	Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp272.080.00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp37.072.080.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp36.800.000.00	Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp36.800.000.00	Rp272.080.00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp118.020.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp78.245.884.00	Rp6.565.884.00	Rp84.161.868.00	Rp84.811.868.00	Rp33.208.632.00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.020.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp650.000.00	Rp370.500.00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.020.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp650.000.00	Rp370.500.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.020.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp650.000.00	Rp370.500.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.020.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp650.000.00	Rp370.500.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp1.020.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp650.000.00	Rp370.500.00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.020.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp650.000.00	Rp370.500.00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp117.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp77.595.884.00	Rp6.565.884.00	Rp84.161.868.00	Rp84.161.868.00	Rp32.838.132.00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp117.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp77.595.884.00	Rp6.565.884.00	Rp84.161.868.00	Rp84.161.868.00	Rp32.838.132.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp117.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp77.595.884.00	Rp6.565.884.00	Rp84.161.868.00	Rp84.161.868.00	Rp32.838.132.00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp117.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp77.595.884.00	Rp6.565.884.00	Rp84.161.868.00	Rp84.161.868.00	Rp32.838.132.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp117.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp77.595.884.00	Rp6.565.884.00	Rp84.161.868.00	Rp84.161.868.00	Rp32.838.132.00	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp2.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp803.277.00	Rp55.391.00	Rp856.668.00	Rp856.668.00	Rp1.141.332.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1		3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.189.625,00	Rp417.075,00	Rp3.606.700,00	Rp3.606.700,00	Rp6.393.300,00			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.603.082,00	Rp6.093.418,00	Rp79.696.500,00	Rp79.696.500,00	Rp25.303.500,00			
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp423.913.778,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp307.792.882,00	Rp65.277.272,00	Rp373.070.154,00	Rp18.726.800,00	Rp6.850.000,00	Rp25.576.800,00	Rp398.646.954,00	Rp25.266.824,00			
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp92.232.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.188.000,00	Rp10.617.000,00	Rp63.785.000,00	Rp5.945.500,00	Rp0,00	Rp5.945.500,00	Rp69.730.500,00	Rp22.501.500,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp92.232.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.188.000,00	Rp10.617.000,00	Rp63.785.000,00	Rp5.945.500,00	Rp0,00	Rp5.945.500,00	Rp69.730.500,00	Rp22.501.500,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp92.232.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.188.000,00	Rp10.617.000,00	Rp63.785.000,00	Rp5.945.500,00	Rp0,00	Rp5.945.500,00	Rp69.730.500,00	Rp22.501.500,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp53.632.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.963.000,00	Rp0,00	Rp42.963.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.963.000,00	Rp42.963.000,00	Rp10.669.000,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai habis	Rp53.632.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.963.000,00	Rp0,00	Rp42.963.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.963.000,00	Rp42.963.000,00	Rp10.669.000,00			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp53.632.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.963.000,00	Rp0,00	Rp42.963.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.963.000,00	Rp42.963.000,00	Rp10.669.000,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.596.500,00	Rp0,00	Rp1.596.500,00	Rp1.596.500,00	Rp1.003.500,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.596.500,00	Rp0,00	Rp1.596.500,00	Rp1.596.500,00	Rp1.003.500,00			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp2.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.596.500,00	Rp0,00	Rp1.596.500,00	Rp1.596.500,00	Rp1.003.500,00			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.205.000,00	Rp10.617.000,00	Rp20.822.000,00	Rp4.349.000,00	Rp0,00	Rp4.349.000,00	Rp25.171.000,00	Rp10.829.000,00			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.205.000,00	Rp10.617.000,00	Rp20.822.000,00	Rp4.349.000,00	Rp0,00	Rp4.349.000,00	Rp25.171.000,00	Rp10.829.000,00			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.205.000,00	Rp10.617.000,00	Rp20.822.000,00	Rp4.349.000,00	Rp0,00	Rp4.349.000,00	Rp25.171.000,00	Rp10.829.000,00			
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp316.901.778,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.624.882,00	Rp54.660.272,00	Rp309.285.154,00	Rp5.791.500,00	Rp0,00	Rp5.791.500,00	Rp315.076.654,00	Rp1.825.124,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp316.901.778,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.624.882,00	Rp54.660.272,00	Rp309.285.154,00	Rp5.791.500,00	Rp0,00	Rp5.791.500,00	Rp315.076.654,00	Rp1.825.124,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp316.901.778,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.624.882,00	Rp54.660.272,00	Rp309.285.154,00	Rp5.791.500,00	Rp0,00	Rp5.791.500,00	Rp315.076.654,00	Rp1.825.124,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.080.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.791.500,00	Rp0,00	Rp5.791.500,00	Rp5.791.500,00	Rp1.288.900,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.080.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.791.500,00	Rp0,00	Rp5.791.500,00	Rp5.791.500,00	Rp1.288.900,00			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp3.992.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.456.500,00	Rp0,00	Rp3.456.500,00	Rp3.456.500,00	Rp536.400,00			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya	Rp3.087.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.335.000,00	Rp0,00	Rp2.335.000,00	Rp2.335.000,00	Rp752.500,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp309.821.378,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.624.882,00	Rp54.660.272,00	Rp309.285.154,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp309.285.154,00	Rp309.285.154,00	Rp536.224,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp294.800.538,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.675.882,00	Rp52.588.432,00	Rp294.264.314,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp294.264.314,00	Rp294.264.314,00	Rp536.224,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Rp36.958.732.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp30.965.610.00	Rp5.993.122.00	Rp36.958.732.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp36.958.732.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp68.924.342.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp62.931.220.00	Rp5.993.122.00	Rp68.924.342.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp68.924.342.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp115.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp85.847.832.00	Rp28.615.944.00	Rp114.463.776.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp114.463.776.00	Rp536.224.00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp73.917.464.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp61.931.220.00	Rp11.986.244.00	Rp73.917.464.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp73.917.464.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp15.020.840.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp12.949.000.00	Rp2.071.840.00	Rp15.020.840.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15.020.840.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp7.651.650.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.596.250.00	Rp1.055.400.00	Rp7.651.650.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.651.650.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp417.136.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp359.600.00	Rp57.536.00	Rp417.136.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp417.136.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp521.420.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp449.500.00	Rp71.920.00	Rp521.420.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp521.420.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp6.430.634.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.543.650.00	Rp886.984.00	Rp6.430.634.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.430.634.00	Rp0.00	Rp0.00
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp14.780.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.989.800.00	Rp6.850.000.00	Rp13.839.800.00	Rp13.839.800.00	Rp940.200.00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp14.780.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.989.800.00	Rp6.850.000.00	Rp13.839.800.00	Rp13.839.800.00	Rp940.200.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.780.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.989.800.00	Rp6.850.000.00	Rp13.839.800.00	Rp13.839.800.00	Rp940.200.00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp14.780.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.989.800.00	Rp6.850.000.00	Rp13.839.800.00	Rp13.839.800.00	Rp940.200.00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp14.780.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.989.800.00	Rp6.850.000.00	Rp13.839.800.00	Rp13.839.800.00	Rp940.200.00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp6.100.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.749.800.00	Rp0.00	Rp5.749.800.00	Rp5.749.800.00	Rp350.200.00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp7.300.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.850.000.00	Rp0.00	Rp6.850.000.00	Rp6.850.000.00	Rp450.000.00	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp1.380.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.240.000.00	Rp0.00	Rp1.240.000.00	Rp1.240.000.00	Rp140.000.00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp536.666.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp301.327.489.00	Rp98.484.750.00	Rp399.812.239.00	Rp51.734.501.00	Rp2.525.000.00	Rp54.259.501.00	Rp454.071.740.00	Rp282.594.660.00			
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp536.666.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp301.327.489.00	Rp98.484.750.00	Rp399.812.239.00	Rp51.734.501.00	Rp2.525.000.00	Rp54.259.501.00	Rp454.071.740.00	Rp282.594.660.00			
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi, dan Berdaya Sang	Rp46.041.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp35.748.500.00	Rp0.00	Rp35.748.500.00	Rp10.292.500.00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp46.041.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp35.748.500.00	Rp0.00	Rp35.748.500.00	Rp10.292.500.00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp46.041.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp35.748.500.00	Rp0.00	Rp35.748.500.00	Rp10.292.500.00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp1.760.000,00	Rp40.000,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp1.760.000,00	Rp40.000,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp1.760.000,00	Rp40.000,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp20.241.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.988.500,00	Rp0,00	Rp9.988.500,00	Rp9.988.500,00	Rp10.252.500,00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp20.241.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.988.500,00	Rp0,00	Rp9.988.500,00	Rp9.988.500,00	Rp10.252.500,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp20.241.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.988.500,00	Rp0,00	Rp9.988.500,00	Rp9.988.500,00	Rp10.252.500,00			
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaan Skala Menengah dan Besar	Rp490.625.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp301.327.489,00	Rp98.484.750,00	Rp399.812.239,00	Rp15.986.001,00	Rp2.525.000,00	Rp18.511.001,00	Rp418.323.240,00	Rp72.302.160,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp390.365.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.129.900,00	Rp98.484.750,00	Rp317.614.650,00	Rp15.986.001,00	Rp2.525.000,00	Rp18.511.001,00	Rp336.125.651,00	Rp54.239.749,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp390.365.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.129.900,00	Rp98.484.750,00	Rp317.614.650,00	Rp15.986.001,00	Rp2.525.000,00	Rp18.511.001,00	Rp336.125.651,00	Rp54.239.749,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp214.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.217.000,00	Rp20.784.750,00	Rp164.001.750,00	Rp6.136.001,00	Rp2.525.000,00	Rp8.661.001,00	Rp172.662.751,00	Rp41.842.649,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp204.205.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.781.000,00	Rp20.784.750,00	Rp155.565.750,00	Rp6.136.001,00	Rp2.525.000,00	Rp8.661.001,00	Rp164.226.751,00	Rp39.978.649,00			
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp175.216.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.865.000,00	Rp20.784.750,00	Rp144.649.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.575.001,00	Rp144.649.750,00	Rp30.566.850,00			
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-hsi Tabung Gas	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.050.000,00	Rp0,00	Rp5.050.000,00	Rp5.050.001,00	Rp2.525.000,00	Rp7.575.001,00	Rp12.625.001,00	Rp5.374.999,00			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp537.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp87.000,00			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralat Kantor	Rp757.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp636.000,00	Rp0,00	Rp636.000,00	Rp636.000,00	Rp121.200,00			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp9.694.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.866.000,00	Rp0,00	Rp5.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.866.000,00	Rp3.828.600,00			
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp10.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.436.000,00	Rp0,00	Rp8.436.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.436.000,00	Rp1.864.000,00			
5.1.02.01.04.0248	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	Rp10.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.436.000,00	Rp0,00	Rp8.436.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.436.000,00	Rp1.864.000,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.850.000,00	Rp0,00	Rp9.850.000,00	Rp9.850.000,00	Rp1.650.000,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.850.000,00	Rp0,00	Rp9.850.000,00	Rp9.850.000,00	Rp1.650.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp11.500.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.850.000.00	Rp0.00	Rp9.850.000.00	Rp9.850.000.00	Rp1.650.000.00			
5.1.02.03	Belanja Pemeeliharaan	Rp134.360.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp49.811.250.00	Rp77.700.000.00	Rp127.511.250.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp127.511.250.00	Rp127.511.250.00	Rp6.848.750.00			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeeliharaan Perlatan dan Mesin	Rp134.360.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp49.811.250.00	Rp77.700.000.00	Rp127.511.250.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp127.511.250.00	Rp127.511.250.00	Rp6.848.750.00			
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeiharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	Rp84.360.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp77.700.000.00	Rp77.700.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp77.700.000.00	Rp77.700.000.00	Rp6.660.000.00			
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeiharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	Rp50.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp49.811.250.00	Rp0.00	Rp49.811.250.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp49.811.250.00	Rp49.811.250.00	Rp188.750.00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00			
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp30.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp26.101.650.00	Rp0.00	Rp26.101.650.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp26.101.650.00	Rp26.101.650.00	Rp3.898.350.00			
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp30.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp26.101.650.00	Rp0.00	Rp26.101.650.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp26.101.650.00	Rp26.101.650.00	Rp3.898.350.00			
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp30.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp26.101.650.00	Rp0.00	Rp26.101.650.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp26.101.650.00	Rp26.101.650.00	Rp3.898.350.00			
5.2	BELANJA MODAL	Rp100.260.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp82.197.589.00	Rp0.00	Rp82.197.589.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp82.197.589.00	Rp82.197.589.00	Rp18.062.411.00			
5.2.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	Rp100.260.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp82.197.589.00	Rp0.00	Rp82.197.589.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp82.197.589.00	Rp82.197.589.00	Rp18.062.411.00			
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp4.400.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.136.750.00	Rp0.00	Rp2.136.750.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.136.750.00	Rp2.136.750.00	Rp2.263.250.00			
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	Rp4.400.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.136.750.00	Rp0.00	Rp2.136.750.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.136.750.00	Rp2.136.750.00	Rp2.263.250.00			
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	Rp4.400.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.136.750.00	Rp0.00	Rp2.136.750.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.136.750.00	Rp2.136.750.00	Rp2.263.250.00			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp11.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp9.000.000.00	Rp2.200.000.00			
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp11.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp9.000.000.00	Rp2.200.000.00			
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp11.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp9.000.000.00	Rp2.200.000.00			
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp84.660.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp71.060.839.00	Rp0.00	Rp71.060.839.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp71.060.839.00	Rp71.060.839.00	Rp13.599.161.00			
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	Rp84.660.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp71.060.839.00	Rp0.00	Rp71.060.839.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp71.060.839.00	Rp71.060.839.00	Rp13.599.161.00			
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	Rp78.660.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp66.904.999.00	Rp0.00	Rp66.904.999.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp66.904.999.00	Rp66.904.999.00	Rp11.755.001.00			
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	Rp6.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.155.840.00	Rp0.00	Rp4.155.840.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.155.840.00	Rp4.155.840.00	Rp11.844.160.00			
UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali		Rp899.566.752.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp578.113.561.00	Rp111.184.509.00	Rp689.298.070.00	Rp57.517.522.00	Rp23.268.137.00	Rp80.785.659.00	Rp770.083.729.00	Rp129.483.023.00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp854.606.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp578.113.561,00	Rp111.184.509,00	Rp689.298.070,00	Rp32.798.522,00	Rp9.293.137,00	Rp42.091.659,00	Rp731.389.729,00	Rp123.217.023,00			
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp69.957.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.076.297,00	Rp33.076.297,00	Rp24.755.624,00	Rp1.868.000,00	Rp26.623.624,00	Rp59.699.921,00	Rp10.257.179,00			
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.366.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp3.227.880,00	Rp1.139.020,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.366.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp3.227.880,00	Rp1.139.020,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.366.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp3.227.880,00	Rp1.139.020,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.366.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp3.227.880,00	Rp1.139.020,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.366.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp3.227.880,00	Rp1.139.020,00			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp4.366.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp0,00	Rp3.227.880,00	Rp3.227.880,00	Rp1.139.020,00			
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp8.286.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.412.021,00	Rp0,00	Rp7.412.021,00	Rp7.412.021,00	Rp873.979,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.286.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.412.021,00	Rp0,00	Rp7.412.021,00	Rp7.412.021,00	Rp873.979,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.286.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.412.021,00	Rp0,00	Rp7.412.021,00	Rp7.412.021,00	Rp873.979,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.286.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.412.021,00	Rp0,00	Rp7.412.021,00	Rp7.412.021,00	Rp873.979,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.286.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.412.021,00	Rp0,00	Rp7.412.021,00	Rp7.412.021,00	Rp873.979,00			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp637.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp567.009,00	Rp0,00	Rp567.009,00	Rp567.009,00	Rp70.691,00			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp6.703.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.990.011,00	Rp0,00	Rp5.990.011,00	Rp5.990.011,00	Rp713.289,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp855.001,00	Rp0,00	Rp855.001,00	Rp855.001,00	Rp89.999,00			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp41.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.631.225,00	Rp22.631.225,00	Rp11.936.000,00	Rp1.868.000,00	Rp13.804.000,00	Rp36.435.225,00	Rp5.064.775,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp41.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.631.225,00	Rp22.631.225,00	Rp11.936.000,00	Rp1.868.000,00	Rp13.804.000,00	Rp36.435.225,00	Rp5.064.775,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp41.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.631.225,00	Rp22.631.225,00	Rp11.936.000,00	Rp1.868.000,00	Rp13.804.000,00	Rp36.435.225,00	Rp5.064.775,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp41.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.631.225,00	Rp22.631.225,00	Rp11.936.000,00	Rp1.868.000,00	Rp13.804.000,00	Rp36.435.225,00	Rp5.064.775,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp41.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.631.225,00	Rp22.631.225,00	Rp11.936.000,00	Rp1.868.000,00	Rp13.804.000,00	Rp36.435.225,00	Rp5.064.775,00			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.631.225,00	Rp22.631.225,00	Rp5.056.000,00	Rp1.008.000,00	Rp6.064.000,00	Rp28.695.225,00	Rp3.804.775,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.880.000,00	Rp860.000,00	Rp7.740.000,00	Rp7.740.000,00	Rp1.260.000,00			
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp15.804.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.445.072,00	Rp10.445.072,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp12.624.795,00	Rp12.624.795,00	Rp3.179.405,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp15.804.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.445.072,00	Rp10.445.072,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp12.624.795,00	Rp12.624.795,00	Rp3.179.405,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp15.804.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.445.072,00	Rp10.445.072,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp12.624.795,00	Rp12.624.795,00	Rp3.179.405,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp15.804.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.445.072,00	Rp10.445.072,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp12.624.795,00	Rp12.624.795,00	Rp3.179.405,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp15.804.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.445.072,00	Rp10.445.072,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp12.624.795,00	Rp12.624.795,00	Rp3.179.405,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp15.804.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.445.072,00	Rp10.445.072,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp0,00	Rp2.179.723,00	Rp12.624.795,00	Rp12.624.795,00	Rp3.179.405,00
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp17.096.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp2.602.840,00	Rp2.982.840,00	Rp2.982.840,00	Rp14.113.760,00			
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp596.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp216.600,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp596.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp216.600,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp596.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp216.600,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp596.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp216.600,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp596.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp216.600,00			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp596.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp216.600,00			
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.602.840,00	Rp2.602.840,00	Rp2.602.840,00	Rp13.897.160,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.602.840,00	Rp2.602.840,00	Rp2.602.840,00	Rp13.897.160,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.602.840,00	Rp2.602.840,00	Rp2.602.840,00	Rp13.897.160,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.602.840,00	Rp2.602.840,00	Rp2.602.840,00	Rp13.897.160,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.602.840,00	Rp2.602.840,00	Rp2.602.840,00	Rp13.897.160,00			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp597.840,00	Rp597.840,00	Rp597.840,00	Rp4.402.160,00			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.005.000,00	Rp2.005.000,00	Rp2.005.000,00	Rp9.495.000,00			
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp767.553.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp578.113.561,00	Rp78.108.212,00	Rp556.221.773,00	Rp7.662.898,00	Rp4.822.297,00	Rp12.485.195,00	Rp668.706.968,00	Rp98.846.084,00			
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp133.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.623.350,00	Rp0,00	Rp82.623.350,00	Rp7.662.898,00	Rp4.822.297,00	Rp12.485.195,00	Rp95.108.545,00	Rp38.491.455,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp133.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.623.350,00	Rp0,00	Rp82.623.350,00	Rp7.662.898,00	Rp4.822.297,00	Rp12.485.195,00	Rp95.108.545,00	Rp38.491.455,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp133.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.623.350,00	Rp0,00	Rp82.623.350,00	Rp7.662.898,00	Rp4.822.297,00	Rp12.485.195,00	Rp95.108.545,00	Rp38.491.455,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp71.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.658.100,00	Rp0,00	Rp57.658.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.658.100,00	Rp13.981.900,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/G/UTU				Jumlah SPJ (LS + UP/G/UTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp71.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.658.100,00	Rp0,00	Rp57.658.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.658.100,00	Rp13.981.900,00			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp71.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.658.100,00	Rp0,00	Rp57.658.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.658.100,00	Rp13.981.900,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp767.900,00	Rp2.052.700,00	Rp2.820.600,00	Rp2.820.600,00	Rp179.400,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp767.900,00	Rp2.052.700,00	Rp2.820.600,00	Rp2.820.600,00	Rp179.400,00			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp767.900,00	Rp2.052.700,00	Rp2.820.600,00	Rp2.820.600,00	Rp179.400,00			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp56.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.965.250,00	Rp0,00	Rp24.965.250,00	Rp4.374.998,00	Rp2.769.597,00	Rp7.144.595,00	Rp32.109.845,00	Rp24.130.155,00			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp56.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.965.250,00	Rp0,00	Rp24.965.250,00	Rp4.374.998,00	Rp2.769.597,00	Rp7.144.595,00	Rp32.109.845,00	Rp24.130.155,00			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.965.250,00	Rp0,00	Rp24.965.250,00	Rp4.374.998,00	Rp2.769.597,00	Rp7.144.595,00	Rp32.109.845,00	Rp3.890.155,00			
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Rp20.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.240.000,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp2.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp2.520.000,00	Rp200.000,00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp2.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp2.520.000,00	Rp200.000,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp2.520.000,00	Rp200.000,00			
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp633.953.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp495.490.211,00	Rp78.108.212,00	Rp573.598.423,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp573.598.423,00	Rp60.354.629,00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp633.953.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp495.490.211,00	Rp78.108.212,00	Rp573.598.423,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp573.598.423,00	Rp60.354.629,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp633.953.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp495.490.211,00	Rp78.108.212,00	Rp573.598.423,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp573.598.423,00	Rp60.354.629,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp633.953.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp495.490.211,00	Rp78.108.212,00	Rp573.598.423,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp573.598.423,00	Rp60.354.629,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp589.408.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp460.527.911,00	Rp72.928.612,00	Rp533.456.523,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp533.456.523,00	Rp55.951.969,00		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp534.408.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp421.535.735,00	Rp59.931.220,00	Rp481.466.955,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.466.955,00	Rp52.941.537,00		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.992.176,00	Rp12.997.392,00	Rp51.989.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.989.568,00	Rp3.010.432,00		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp44.544.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.962.300,00	Rp5.179.600,00	Rp40.141.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.141.900,00	Rp4.402.660,00		

Kode Rekening	Urutan	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp22.691.100.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.809.875.00	Rp2.638.500.00	Rp20.448.375.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20.448.375.00	Rp2.242.725.00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.237.024.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp970.920.00	Rp143.840.00	Rp1.114.760.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.114.760.00	Rp122.264.00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.546.280.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.213.650.00	Rp179.800.00	Rp1.393.450.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.393.450.00	Rp152.830.00	
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp19.070.156.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14.967.855.00	Rp2.217.460.00	Rp17.185.315.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.185.315.00	Rp1.884.841.00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Rp44.960.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp24.719.000.00	Rp13.975.000.00	Rp38.694.000.00	Rp38.694.000.00	Rp6.266.000.00			
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp44.960.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp24.719.000.00	Rp13.975.000.00	Rp38.694.000.00	Rp38.694.000.00	Rp6.266.000.00			
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rp44.960.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp24.719.000.00	Rp13.975.000.00	Rp38.694.000.00	Rp38.694.000.00	Rp6.266.000.00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp44.960.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp24.719.000.00	Rp13.975.000.00	Rp38.694.000.00	Rp38.694.000.00	Rp6.266.000.00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp44.960.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp24.719.000.00	Rp13.975.000.00	Rp38.694.000.00	Rp38.694.000.00	Rp6.266.000.00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.920.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.279.000.00	Rp1.075.000.00	Rp3.354.000.00	Rp3.354.000.00	Rp4.566.000.00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp7.920.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.279.000.00	Rp1.075.000.00	Rp3.354.000.00	Rp3.354.000.00	Rp4.566.000.00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.920.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.279.000.00	Rp1.075.000.00	Rp3.354.000.00	Rp3.354.000.00	Rp4.566.000.00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp37.040.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp22.440.000.00	Rp12.900.000.00	Rp35.340.000.00	Rp35.340.000.00	Rp1.700.000.00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp37.040.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp22.440.000.00	Rp12.900.000.00	Rp35.340.000.00	Rp35.340.000.00	Rp1.700.000.00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp37.040.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp22.440.000.00	Rp12.900.000.00	Rp35.340.000.00	Rp35.340.000.00	Rp1.700.000.00			
UP1D Pelembutan Periklanan		Rp283.308.725.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp182.989.957.00	Rp0.00	Rp182.989.957.00	Rp47.152.995.00	Rp19.028.238.00	Rp66.181.233.00	Rp249.171.190.00	Rp34.137.535.00			
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp259.454.725.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp182.989.957.00	Rp0.00	Rp182.989.957.00	Rp40.232.995.00	Rp5.257.294.00	Rp45.490.289.00	Rp228.480.246.00	Rp30.974.479.00			
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp76.085.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp23.287.252.00	Rp0.00	Rp23.287.252.00	Rp34.738.321.00	Rp4.440.000.00	Rp39.178.321.00	Rp62.485.573.00	Rp13.620.327.00			
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp26.835.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20.098.321.00	Rp0.00	Rp20.098.321.00	Rp20.098.321.00	Rp6.737.579.00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp26.835.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20.098.321.00	Rp0.00	Rp20.098.321.00	Rp20.098.321.00	Rp6.737.579.00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp26.835.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20.098.321.00	Rp0.00	Rp20.098.321.00	Rp20.098.321.00	Rp6.737.579.00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp26.835.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20.098.321.00	Rp0.00	Rp20.098.321.00	Rp20.098.321.00	Rp6.737.579.00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp26.835.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20.098.321.00	Rp0.00	Rp20.098.321.00	Rp20.098.321.00	Rp6.737.579.00			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.633.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.754.998.00	Rp0.00	Rp2.754.998.00	Rp2.754.998.00	Rp876.002.00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp2.777.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.240.006,00	Rp0,00	Rp2.240.006,00	Rp2.240.006,00	Rp536.994,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp8.157.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.853.321,00	Rp0,00	Rp5.853.321,00	Rp5.853.321,00	Rp2.304.479,00			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.747.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00	Rp997.500,00			
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer	Rp5.931.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.049.999,00	Rp0,00	Rp4.049.999,00	Rp4.049.999,00	Rp1.881.101,00			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp3.589.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.449.997,00	Rp0,00	Rp3.449.997,00	Rp3.449.997,00	Rp139.503,00			
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp6.216.000,00	Rp600.000,00	Rp6.816.000,00	Rp30.103.252,00	Rp2.396.748,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp6.216.000,00	Rp600.000,00	Rp6.816.000,00	Rp30.103.252,00	Rp2.396.748,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp6.216.000,00	Rp600.000,00	Rp6.816.000,00	Rp30.103.252,00	Rp2.396.748,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp6.216.000,00	Rp600.000,00	Rp6.816.000,00	Rp30.103.252,00	Rp2.396.748,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp6.216.000,00	Rp600.000,00	Rp6.816.000,00	Rp30.103.252,00	Rp2.396.748,00			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp0,00	Rp23.287.252,00	Rp6.216.000,00	Rp600.000,00	Rp6.816.000,00	Rp30.103.252,00	Rp2.396.748,00			
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp16.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.424.000,00	Rp3.840.000,00	Rp12.264.000,00	Rp12.264.000,00	Rp4.486.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp16.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.424.000,00	Rp3.840.000,00	Rp12.264.000,00	Rp12.264.000,00	Rp4.486.000,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.424.000,00	Rp3.840.000,00	Rp12.264.000,00	Rp12.264.000,00	Rp4.486.000,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.664.000,00	Rp0,00	Rp2.664.000,00	Rp2.664.000,00	Rp4.086.000,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.664.000,00	Rp0,00	Rp2.664.000,00	Rp2.664.000,00	Rp4.086.000,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.664.000,00	Rp0,00	Rp2.664.000,00	Rp2.664.000,00	Rp4.086.000,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp3.840.000,00	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp400.000,00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp3.840.000,00	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp400.000,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp3.840.000,00	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp400.000,00			
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp20.445.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp18.750.000,00	Rp1.695.200,00			
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp20.445.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp18.750.000,00	Rp1.695.200,00			
5.2	BELANJA MODAL	Rp20.445.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp18.750.000,00	Rp1.695.200,00			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp20.445.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp18.750.000,00	Rp1.695.200,00			
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp20.445.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp18.750.000,00	Rp1.695.200,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp20.445.200,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp18.750.000,00		Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp1.695.200,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp20.445.200,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp18.750.000,00		Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.750.000,00	Rp1.695.200,00
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp12.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp4.758.374,00	Rp453.594,00	Rp5.211.968,00	Rp5.211.968,00	Rp6.788.032,00
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp12.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp4.758.374,00	Rp453.594,00	Rp5.211.968,00	Rp5.211.968,00	Rp6.788.032,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp12.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp4.758.374,00	Rp453.594,00	Rp5.211.968,00	Rp5.211.968,00	Rp6.788.032,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp4.758.374,00	Rp453.594,00	Rp5.211.968,00	Rp5.211.968,00	Rp6.788.032,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp12.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp4.758.374,00	Rp453.594,00	Rp5.211.968,00	Rp5.211.968,00	Rp6.788.032,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp12.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp4.758.374,00	Rp453.594,00	Rp5.211.968,00	Rp5.211.968,00	Rp6.788.032,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp2.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp357.000,00	Rp37.000,00	Rp394.000,00	Rp394.000,00	Rp1.606.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp10.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp4.401.374,00	Rp416.594,00	Rp4.817.968,00	Rp4.817.968,00	Rp5.182.032,00
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp150.923.625,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp140.952.705,00		Rp140.952.705,00	Rp736.300,00	Rp363.700,00	Rp1.100.000,00	Rp142.052.705,00	Rp8.870.920,00
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp127.800.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp123.675.000,00		Rp123.675.000,00	Rp736.300,00	Rp363.700,00	Rp1.100.000,00	Rp124.775.000,00	Rp3.025.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp127.800.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp123.675.000,00		Rp123.675.000,00	Rp736.300,00	Rp363.700,00	Rp1.100.000,00	Rp124.775.000,00	Rp3.025.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp127.800.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp123.675.000,00		Rp123.675.000,00	Rp736.300,00	Rp363.700,00	Rp1.100.000,00	Rp124.775.000,00	Rp3.025.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp88.800.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp88.752.000,00		Rp88.752.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.752.000,00	Rp48.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp88.800.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp88.752.000,00		Rp88.752.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.752.000,00	Rp48.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp88.800.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp88.752.000,00		Rp88.752.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.752.000,00	Rp48.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp736.300,00	Rp363.700,00	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp1.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp736.300,00	Rp363.700,00	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp1.900.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp3.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00			Rp0,00	Rp736.300,00	Rp363.700,00	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp1.900.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp36.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp34.923.000,00		Rp34.923.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.923.000,00	Rp1.077.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp36.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp34.923.000,00		Rp34.923.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.923.000,00	Rp1.077.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp36.000.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp34.923.000,00		Rp34.923.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.923.000,00	Rp1.077.000,00
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp23.123.625,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp17.277.705,00		Rp17.277.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp5.845.920,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp23.123.625,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp17.277.705,00		Rp17.277.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp5.845.920,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
1		3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp23.123.625.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.277.705.00	Rp0.00	Rp17.277.705.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.277.705.00	Rp17.277.705.00	Rp5.845.920.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp17.277.705.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.277.705.00	Rp0.00	Rp17.277.705.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.277.705.00	Rp17.277.705.00	Rp0.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp15.982.805.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15.982.805.00	Rp0.00	Rp15.982.805.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15.982.805.00	Rp15.982.805.00	Rp0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp15.982.805.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15.982.805.00	Rp0.00	Rp15.982.805.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15.982.805.00	Rp15.982.805.00	Rp0.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp1.294.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.294.900.00	Rp0.00	Rp1.294.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.294.900.00	Rp1.294.900.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp659.625.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp659.625.00	Rp0.00	Rp659.625.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp659.625.00	Rp659.625.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp35.960.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp35.960.00	Rp0.00	Rp35.960.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp35.960.00	Rp35.960.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp44.950.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp44.950.00	Rp0.00	Rp44.950.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp44.950.00	Rp44.950.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp554.365.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp554.365.00	Rp0.00	Rp554.365.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp554.365.00	Rp554.365.00	Rp0.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp5.845.920.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.845.920.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp5.845.920.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.845.920.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp5.845.920.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.845.920.00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Rp23.854.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.920.000.00	Rp13.770.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp3.163.056.00
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Rp23.854.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.920.000.00	Rp13.770.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp3.163.056.00
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Rp23.854.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.920.000.00	Rp13.770.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp3.163.056.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp23.854.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.920.000.00	Rp13.770.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp3.163.056.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp23.854.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.920.000.00	Rp13.770.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp20.690.944.00	Rp3.163.056.00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.500.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.500.000.00	Rp0.00	Rp3.500.000.00	Rp0.00	Rp3.500.000.00	Rp3.500.000.00	Rp3.500.000.00	Rp1.000.000.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.500.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.500.000.00	Rp0.00	Rp3.500.000.00	Rp0.00	Rp3.500.000.00	Rp3.500.000.00	Rp3.500.000.00	Rp1.000.000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.500.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.500.000.00	Rp0.00	Rp3.500.000.00	Rp0.00	Rp3.500.000.00	Rp3.500.000.00	Rp3.500.000.00	Rp1.000.000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp19.354.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.420.000.00	Rp13.770.944.00	Rp17.190.944.00	Rp17.190.944.00	Rp2.163.056.00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)	
15. Taperum			Rp0,00			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	
16. Taspen			Rp0,00			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	
17. Askes			Rp0,00			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	
18. Lainnya			Rp0,00			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	
19. Sewa Rumah			Rp0,00			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	
20. Beras (BULOG)			Rp0,00			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	
21. Zakat			Rp0,00			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00			Rp53.773.405,00	Rp8.426.348,00	Rp62.199.753,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp62.199.753,00	Rp0,00	
Total Potongan			Rp1.097.563.512,00	Rp105.445.854,00	Rp1.203.009.366,00	Rp125.605.299,00	Rp19.682.480,00	Rp145.287.779,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp1.792.376.960,00	Rp0,00	

- Pajak:

1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp280.691.752.00	Rp206.427.303.00	Rp487.119.055.00	Rp4.696.031.00	Rp0.00	Rp4.696.031.00	Rp491.815.096.00	Rp0.00			
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp34.214.382.00	Rp947.790.00	Rp35.162.1172.00	Rp858.696.00	Rp39.735.00	Rp898.431.00	Rp36.060.603.00	Rp0.00			
3. PPH 21			Rp1.233.455.783.00	Rp15.663.994.00	Rp1.249.119.777.00	Rp2.555.332.00	Rp460.000.00	Rp3.015.332.00	Rp1.325.000.00	Rp0.00	Rp1.325.000.00	Rp1.253.460.109.00	Rp0.00			
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00			
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00			
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.599.804.00	Rp8.073.347.00	Rp19.673.151.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp19.673.151.00	Rp0.00			
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00			
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00			
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.870.175.00	Rp28.608.247.00	Rp37.478.422.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp37.478.422.00	Rp0.00			
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00			
Total Pajak			Rp1.233.455.783.00	Rp15.663.994.00	Rp1.249.119.777.00	Rp337.931.445.00	Rp244.516.687.00	Rp582.448.132.00	Rp6.879.727.00	Rp39.735.00	Rp6.919.462.00	Rp1.838.487.371.00	Rp0.00			
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp20.031.121.281.00	Rp1.588.112.624.00	Rp21.619.233.905.00	Rp6.303.946.599.00	Rp2.348.411.233.00	Rp8.652.257.882.00	Rp876.597.774.00	Rp158.228.146.00	Rp1.034.825.920.00	Rp31.306.417.707.00	Rp0.00			

- Pengeluaran:

- SPJ:																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UP/GU			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp874.898.643.00	Rp128.117.862.00	Rp1.003.016.505.00	Rp1.003.016.505.00	Rp0.00			
TU			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp280.691.752.00	Rp206.427.303.00	Rp487.119.055.00	Rp4.696.031.00	Rp0.00	Rp4.696.031.00	Rp491.815.086.00		Rp0.00		
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp34.214.382.00	Rp947.790.00	Rp35.162.172.00	Rp858.696.00	Rp39.735.00	Rp898.431.00	Rp38.060.603.00		Rp0.00		
3. PPH 21			Rp1.233.455.783.00	Rp15.663.994.00	Rp1.249.119.777.00	Rp2.555.332.00	Rp460.000.00	Rp3.015.332.00	Rp1.325.000.00	Rp0.00	Rp1.325.000.00	Rp1.253.460.109.00		Rp0.00		
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00		
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00		
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.599.804.00	Rp8.073.347.00	Rp19.673.151.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp19.673.151.00		Rp0.00		
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00		
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00		
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.870.175.00	Rp28.608.247.00	Rp37.478.422.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp37.478.422.00		Rp0.00		
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00		
Total Pajak			Rp1.233.455.783,00	Rp15.663.994,00	Rp1.249.119.777,00	Rp337.931.445,00	Rp244.516.687,00	Rp582.448.132,00	Rp6.879.727,00	Rp39.735,00	Rp6.919.462,00	Rp1.838.487.371,00		Rp0,00		

UP/GU	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
TU	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
LS	Rp17.700.101.986,00	Rp1.467.002.776,00	Rp19.167.104.762,00	Rp5.840.409.845,00	Rp2.084.212.126,00	Rp7.924.621.971,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.091.726.733,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
GU-KKPD	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)	Rp3.257.296,00	Rp0,00	Rp3.257.296,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.997,00	Rp31.809.415,00	Rp32.097.412,00	Rp35.354.708,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN	Rp20.031.121.281,00	Rp1.588.112.624,00	Rp21.619.233.905,00	Rp6.303.946.589,00	Rp2.348.411.293,00	Rp8.652.357.882,00	Rp874.898.643,00	Rp128.117.862,00	Rp1.003.016.505,00	Rp31.274.608.292,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas UP/GU/TU	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.699.131,00	Rp1.699.131,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.699.131,00	Rp1.699.131,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Disiapkan oleh,

BENDAHARA PENGELUARAN



I Putu Juni Suprianta, SE

NIP. [REDACTED]

Menyetujui,
PENGUNA ANGGARAN



Ir. Putu Sumardiana, MP

NIP. [REDACTED]



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(LPJ PENERIMAAN - FUNGSIONAL)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
PERIODE: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan Ini	Sisa Anggaran Yang Belum Terealisasi/Pelampauan Angagran
			Penerimaan			
			Penyetoran			
			Sisa			
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	Rp43.272.000,00	Rp64.071.000,00	Rp1.580.500,00	Rp65.651.500,00	Rp22.379.500,00
			Rp64.071.000,00	Rp1.580.500,00	Rp65.651.500,00	
			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Rp2.594.000.000,00	Rp1.698.415.000,00	Rp78.800.000,00	Rp1.777.215.000,00	Rp816.785.000,00
			Rp1.698.415.000,00	Rp78.800.000,00	Rp1.777.215.000,00	
			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Rp125.000.000,00	Rp134.744.000,00	Rp13.480.000,00	Rp148.224.000,00	Rp23.224.000,00
			Rp134.744.000,00	Rp13.480.000,00	Rp148.224.000,00	
			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp400.000.000,00	Rp801.596.294,00	Rp53.085.000,00	Rp854.681.294,00	Rp454.681.294,00
			Rp801.596.294,00	Rp53.085.000,00	Rp854.681.294,00	
			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
TOTAL		Rp3.162.272.000,00	Rp2.698.826.294,00	Rp146.945.500,00	Rp2.845.771.794,00	Rp316.500.206,00
			Rp2.698.826.294,00	Rp146.945.500,00	Rp2.845.771.794,00	
			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	

Denpasar, 08 Januari 2026

BENDAHARA PENERIMAAN


Ni Wayan Sucitawati, SE


Tahun 2025

[illegible]

Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Karmen Mlayra Wikowani, A.Md..Ak

NIP

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Ir. Putu Sumardiana, MIE

NAME: [REDACTED]



Tahun 2025

5,712,748.37.00			47,428,296,359.69
-----------------	--	--	-------------------

Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Karmen Mayra Wikowani, A.Md.Ak

NHP

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Ir. Putu Sumardiana, MP

CLIN



Tahun 2025

[illegible]

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Tahun 2025

[illegible]

TAHUN 2025

Kode/Nama Akun	UNIT OPD	Nama Perusahaan/Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Surat Ketetapan	Tanggal Penetapan Piutang	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Jumlah Setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Total Mutasi Selama 2025 (Rp)		Saldo Akhir 2025	Total Penyisihan 2025
					Bertambah	Berkurang		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.04.08.04.0001 -Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	AHMAD ROHICIN, SAKIRIN, FITRIYAH, PT DISTIKU MALA, SUSANTO HALIM, H.NURYATIM SAFIT, NYOMAN GUNAWAN HAMBAJI	5/5/2015	7.525.000,00	0,00	0,00	7.525.000,00	0,00	7.525.000,00	0,00	0,00
TOTAL				7.525.000,00	0,00	0,00	7.525.000,00	0,00	7.525.000,00	0,00	0,00

Bal. 31 Desember 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Ir. Putu Sumardiana, M.P.

Pembina Utama Muda/(I/V/c)

[REDACTED]



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
LAMPIRAN UTANG
TAHUN 2025

Kode>Nama Akun	UNIT OPD	Nama Pihak ke-3/Pernyedia Barang Jasa	Tanggal Penetapan Utang	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Jumlah Setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Total Mutasi Selama 2025 (Rp)		Saldo Akhir 2025
					Bertambah	Berkurang		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.05.01-Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak	Dinas Kelautan dan Perikanan	PIHAK III	31 Desember 2024	118.200.961,86	0,00	0,00	118.200.961,86	0,00	4.256.849,12	113.944.112,74
2.1.05.01-Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak				118.200.961,86	0,00	0,00	118.200.961,86	0,00	4.256.849,12	113.944.112,74
III Total										
2.1.06.01-Utang Belanja Pegawai	Dinas Kelautan dan Perikanan	BPS	31 Desember 2024	20.127.789,00	0,00	0,00	20.127.789,00	0,00	20.127.789,00	0,00
		TPP	31 Desember 2024	710.652.459,00	0,00	0,00	710.652.459,00	0,00	710.652.459,00	0,00
		GAI	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	725.600,00	0,00	725.600,00
		TPP	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	947.547.941,00	0,00	947.547.941,00
2.1.06.01-Utang Belanja Pegawai Total				730.780.248,00	0,00	0,00	730.780.248,00	948.273.541,00	730.780.248,00	948.273.541,00
2.1.06.02-Utang Belanja Barang dan Jasa	Provinsi Bali	PT PLN	31 Desember 2024	4.816.468,00	0,00	0,00	4.816.468,00	0,00	4.816.468,00	0,00
	Provinsi Bali	Project	31 Desember 2024	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	Perusahaan Umum Daerah Air Minum	31 Desember 2024	58.675,00	0,00	0,00	58.675,00	0,00	58.675,00	0,00
	Provinsi Bali	OSDP	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	PDAM	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	53.056,00	0,00	53.056,00
2.1.06.02-Utang Belanja Barang dan Jasa Total				4.945.143,00	0,00	0,00	4.945.143,00	123.056,00	4.945.143,00	123.056,00
TOTAL				853.926.352,86	-	-	853.926.352,9	948.396.597	739.982.240,12	1.062.340.705,74

Bali, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali
Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [REDACTED]



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG

TAHUN 2025

KODE REKENING	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Selisih
1	2	3	4	5
1.1.12	Persediaan	234.640.850,00	234.640.850,00	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	234.640.850,00	234.640.850,00	0,00
1.1.12.01.01	Bahan	184.971.250,00	184.971.250,00	0,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			0,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			0,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	65.918.250,00	65.918.250,00	0,00
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku			0,00
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir			0,00
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses			0,00
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			0,00
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran			0,00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			0,00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	92.160.000,00	92.160.000,00	0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	26.893.000,00	26.893.000,00	0,00
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			0,00
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar			0,00
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran			0,00
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium			0,00
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar			0,00
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			0,00
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			0,00
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			0,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial			0,00
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			0,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.722.700,00	3.722.700,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	28.700,00	28.700,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	729.200,00	729.200,00	0,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak			0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	229.800,00	229.800,00	0,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor			0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	815.000,00	815.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			0,00
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa			0,00
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga			0,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata			0,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			0,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0001	Obat			0,00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			0,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			0,00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			0,00
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			0,00
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya			0,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	45.946.900,00	45.946.900,00	0,00
1.1.12.01.07.0001	Natura			0,00
1.1.12.01.07.0002	Pakan	45.946.900,00	45.946.900,00	0,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya			0,00
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi			0,00
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			0,00
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi			0,00
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya			0,00
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses			0,00
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya			0,00
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01	Komponen	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja			0,00
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan			0,00
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan			0,00
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu			0,00
1.1.12.02.01.0005	Attachment			0,00
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya			0,00
1.1.12.02.02	Pipa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)			0,00
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)			0,00
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja			0,00

1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan			0,00
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass			0,00
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)			0,00
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya			0,00
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas			0,00
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas			0,00
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya			0,00

Bali, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pemimpin Muda (I/II/a)
NIP. [REDACTED]

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
DAFTAR MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN BARANG
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	Data Pejabat Penatausahaan Keuangan					Data Pejabat Penatausahaan Barang				
		Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD	Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.12	Persediaan	2.134.119.764,00	0,00	0,00	0,00	2.134.119.764,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.134.119.764,00	0,00	0,00	0,00	2.134.119.764,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.01	Bahan	1.000.589.851,00	0,00	0,00	0,00	1.000.589.851,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi										
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	169.347.750,00				169.347.750,00					
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	592.357.100,00				592.357.100,00					
1.1.12.01.01.0005	Bahan Batu										
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nulifr										
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses										
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman										
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran										
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	12.625.001,00				12.625.001,00					
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	226.260.000,00				226.260.000,00					
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya										
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan										
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar										
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran										
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium										
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar										
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi										
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian										
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel										
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dan Belanja Bantuan Sosial										
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya										
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor	386.069.478,00	0,00	0,00	0,00	386.069.478,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	19.532.065,00				19.532.065,00					
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	31.653.612,00				31.653.612,00					
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	40.640.137,00				40.640.137,00					
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	5.380.000,00				5.380.000,00					
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender										
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	47.529.000,00				47.529.000,00					
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	11.927.500,00				11.927.500,00					
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	15.949.667,00				15.949.667,00					
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Pinas										
1.1.12.01.03.0010	Kaportlap dan Perlengkapan Satwa										
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga										
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata										
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	213.475.497,00				213.475.497,00					
1.1.12.01.04	Obat-obatan	26.218.000,00	0,00	0,00	0,00	26.218.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.04.0001	Obat										
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan lainnya	26.218.000,00				26.218.000,00					
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	344.328.635,00	0,00	0,00	0,00	344.328.635,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	344.328.635,00				344.328.635,00					
1.1.12.01.05.0002	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya										
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka										
1.1.12.01.06.0002	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka										
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	376.913.800,00	0,00	0,00	0,00	376.913.800,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.07.0001	Natura										
1.1.12.01.07.0002	Pakan	361.113.800,00				361.113.800,00					
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan lainnya	15.800.000,00	0,00			15.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.08	Persediaan Perrehtian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PERIODE TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	Data PP: Keuangan						Data PP: Barang					
		Pemakaian Normal	Beri Hibah	Daluwarsa/Rusak	Koreksi/Catet Tahun Lalu	Koreksi/Catet Tahun Berjalan	Mutasi OPD	Pemakaian Normal	Beri Hibah	Daluwarsa/Rusak	Koreksi/Catet Tahun Lalu	Koreksi/Catet Tahun Berjalan	Mutasi OPD
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.12	Perediaan	2.199.857.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.857.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01	Barang Paket Habis	2.199.857.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.857.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01	Barang Bangunan dan Konstruksi	1.048.328.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.328.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0002	Barang Keras	169.320.100,00						169.320.100,00					
1.1.12.01.01.0004	Barang Baku dan Pelumas	597.417.350,00						597.417.350,00					
1.1.12.01.01.0005	Barang Kimia												
1.1.12.01.01.0006	Barang Dalam Proses												
1.1.12.01.01.0007	Barang/Bahan, Peran												
1.1.12.01.01.0008	Barang/Bahan, Peran												
1.1.12.01.01.0009	Barang/Bahan, Peran	13.635.001,00						13.635.001,00					
1.1.12.01.01.0010	Barang/Bahan, Peran/Bahan	255.420.000,00						255.420.000,00					
1.1.12.01.01.0011	Barang/Bahan, Peran/Bahan	13.446.500,00						13.446.500,00					
1.1.12.01.01.0012	Barang Lainnya												
1.1.12.01.02	Suatu Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001	Suatu Gedung												
1.1.12.01.02.0002	Suatu Gedung												
1.1.12.01.02.0003	Suatu Gedung												
1.1.12.01.02.0004	Suatu Gedung												
1.1.12.01.02.0005	Suatu Gedung												
1.1.12.01.02.0006	Suatu Gedung												
1.1.12.01.02.0007	Suatu Gedung												
1.1.12.01.02.0008	Suatu Gedung												
1.1.12.01.02.0010	Perediaan dari Belanja Bantuan Sosial												
1.1.12.01.02.0011	Suatu Gedung Lainnya												
1.1.12.01.03	Akta/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	367.265.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.265.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Akta/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	14.142.696,00						14.142.696,00					
1.1.12.01.03.0002	Akta/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	31.721.610,00						31.721.610,00					
1.1.12.01.03.0003	Akta/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	39.717.729,00						39.717.729,00					
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	6.690.000,00						6.690.000,00					
1.1.12.01.03.0005	Perediaan Dokumen/Administrasi Tender	34.956.800,00						34.956.800,00					
1.1.12.01.03.0006	Bantuan Komputer	11.927.500,00						11.927.500,00					
1.1.12.01.03.0007	Peralatan Kantor	15.121.184,00						15.121.184,00					
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik												
1.1.12.01.03.0009	Peningkatan GPRS												
1.1.12.01.03.0010	Kaporal dan Peningkatan Sarwa												
1.1.12.01.03.0011	Perengkapan Pendidikan Olahraga												
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata												
1.1.12.01.03.0013	Akta/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	212.986.124,00						212.986.124,00					
1.1.12.01.04	Obat	22.029.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.029.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0001	Obat												
1.1.12.01.04.0002	Obat												
1.1.12.01.04.0003	Obat												
1.1.12.01.04.0004	Obat												
1.1.12.01.04.0005	Obat												
1.1.12.01.04.0006	Obat												
1.1.12.01.04.0007	Obat												
1.1.12.01.04.0008	Obat												
1.1.12.01.04.0009	Obat												
1.1.12.01.04.0010	Obat												
1.1.12.01.04.0011	Obat												
1.1.12.01.04.0012	Obat												
1.1.12.01.04.0013	Obat												
1.1.12.01.04.0014	Obat												
1.1.12.01.04.0015	Obat												
1.1.12.01.04.0016	Obat												
1.1.12.01.04.0017	Obat												
1.1.12.01.04.0018	Obat												
1.1.12.01.04.0019	Obat												
1.1.12.01.04.0020	Obat												
1.1.12.01.04.0021	Obat												
1.1.12.01.04.0022	Obat												
1.1.12.01.04.0023	Obat												
1.1.12.01.04.0024	Obat												
1.1.12.01.04.0025	Obat												
1.1.12.01.04.0026	Obat												
1.1.12.01.04.0027	Obat												
1.1.12.01.04.0028	Obat												
1.1.12.01.04.0029	Obat												
1.1.12.01.04.0030	Obat												
1.1.12.01.04.0031	Obat												
1.1.12.01.04.0032	Obat												
1.1.12.01.04.0033	Obat												
1.1.12.01.04.0034	Obat												
1.1.12.01.04.0035	Obat												
1.1.12.01.04.0036	Obat												
1.1.12.01.04.0037	Obat												
1.1.12.01.04.0038	Obat												
1.1.12.01.04.0039	Obat												
1.1.12.01.04.0040	Obat												
1.1.12.01.04.0041	Obat												
1.1.12.01.04.0042	Obat												
1.1.12.01.04.0043	Obat												
1.1.12.01.04.0044	Obat												
1.1.12.01.04.0045	Obat												
1.1.12.01.04.0046	Obat												
1.1.12.01.04.0047	Obat												
1.1.12.01.04.0048	Obat												
1.1.12.01.04.0049	Obat												
1.1.12.01.04.0050	Obat												
1.1.12.01.04.0051	Obat												
1.1.12.01.04.0052	Obat												
1.1.12.01.04.0053	Obat												
1.1.12.01.04.0054	Obat												
1.1.12.01.04.0055	Obat												
1.1.12.01.04.0056	Obat												
1.1.12.01.04.0057	Obat												
1.1.12.01.04.0058	Obat												
1.1.12.01.04.0059	Obat												
1.1.12.01.04.0060	Obat												
1.1.12.01.04.0061	Obat												
1.1.12.01.04.0062	Obat												
1.1.12.01.04.0063	Obat												
1.1.12.01.04.0064	Obat												
1.1.12.01.04.0065	Obat												
1.1.12.01.04.0066	Obat												
1.1.12.01.04.0067	Obat												
1.1.12.01.04.0068	Obat												
1.1.12.01.04.0069	Obat												
1.1.12.01.04.0070	Obat												
1.1.12.01.04.0071	Obat												
1.1.12.01.04.0072	Obat												
1.1.12.01.04.0073	Obat												
1.1.12.01.04.0074	Obat												
1.1.12.01.04.0075	Obat												
1.1.12.01.04.0076	Obat												
1.1.12.01.04.0077	Obat												
1.1.12.01.04.0078	Obat												
1.1.12.01.04.0079	Obat												
1.1.12.01.04.0080	Obat												
1.1.12.01.04.0081	Obat												
1.1.12.01.04.0082	Obat												
1.1.12.01.04.0083	Obat												
1.1.12.01.04.0084	Obat												
1.1.12.01.04.0085	Obat												
1.1.12.01.04.0086	Obat												
1.1.12.01.04.0087	Obat												
1.1.12.01.04.0088	Obat												
1.1.12.01.04.0089	Obat												
1.1.12.01.04.0090	Obat												
1.1.12.01.04.0091	Obat												
1.1.12.01.04.0092	Obat												
1.1.12.01.04.0093	Obat												
1.1.12.01.04.0094	Obat												
1.1.12.01.04.0095	Obat												
1.1.12.01.04.0096	Obat												
1.1.12.01.04.0097	Obat												
1.1.12.01.04.0098	Obat												
1.1.12.01.04.0099	Obat												
1.1.12.01.04.0100													

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
DAFTAR JENIS SALDO AKHIR PERSEDIAAN BARANG
TAHUN 2025

KODE REKENING	URAIAN	DATA PP. KEUANGAN	BA. STOCK OPNAME PENGURUS BARANG	SELISIH
1	2	3	4	5
1.1.12	Persediaan	168.902.675,00	168.902.675,00	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	168.902.675,00	168.902.675,00	0,00
1.1.12.01.01	Bahan	137.332.150,00	137.332.150,00	0,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	27.650,00	27.650,00	0,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	60.858.000,00	60.858.000,00	0,00
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	13.446.500,00	13.446.500,00	0,00
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	22.526.535,00	22.526.535,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	5.418.069,00	5.418.069,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	643.202,00	643.202,00	0,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	922.408,00	922.408,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	610.000,00	610.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	1.643.483,00	1.643.483,00	0,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0010	Kaportap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	489.373,00	489.373,00	0,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	4.188.800,00	4.188.800,00	0,00
1.1.12.01.04.0001	Obat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	4.188.800,00	4.188.800,00	0,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	4.855.190,00	4.855.190,00	0,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0002	Pakan	3.981.190,00	3.981.190,00	0,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	874.000,00	874.000,00	0,00
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01	Komponen	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0005	Attachment	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02	Pipa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00	0,00

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP

Reimbina Utama Muda (IV/c)

NIR

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAMPIRAN RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN KAS
PER 31 DESEMBER 2025

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

BULAN	SP2D				SPJ	CONTRA POST (CP)			REALISASI	SISA	
	GAJI	LS	UP/GUTU	GAJI		LS	UP/GUTU	DANA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (2+3+5)-(6+7+8)	10 = 4-(5+8)		
1	Januari	1.304.059.288,00		90.000.000,00	30.020.026,00			1.334.079.314,00	59.979.974,00		
2	Pebruari	1.343.786.311,00	790.055.019,00	30.020.026,00	86.758.891,00			3.554.679.535,00	3.241.109,00		
3	Maret	1.970.248.676,00	952.111.519,00	86.758.891,00	65.305.379,00			6.542.345.109,00	24.694.621,00		
4	April	2.068.228.004,00	1.017.849.269,00	65.305.379,00	75.774.686,00			9.704.197.068,00	14.225.314,00		
5	Mei	1.466.851.926,00	578.060.910,00	75.774.686,00	64.778.308,00			11.813.888.212,00	25.221.692,00		
6	Juni	2.967.965.102,00	204.567.169,00	64.778.308,00	56.830.442,00	500.000,00	26.000,00	15.042.724.925,00	33.169.558,00		
7	Juli	1.588.542.108,00	624.158.152,00	56.830.442,00	89.619.093,00	2.757.296,00	151.997,00	17.342.134.985,00	380.907,00		
8	Agustus	1.571.159.681,00	271.916.310,00	89.619.093,00	89.574.406,00		110.000,00	19.274.675.382,00	425.594,00		
9	September	1.558.796.747,00	928.399.843,00	89.574.406,00	89.783.040,00			21.851.655.012,00	216.960,00		
10	Oktober	2.566.792.644,00	441.858.955,00	179.559.072,00	138.153.503,00			24.998.460.114,00	41.622.529,00		
11	November	1.624.690.794,00	494.969.443,00	48.377.471,00	88.300.869,00			27.206.421.220,00	1.699.131,00		
12	Desember	1.588.112.624,00	2.348.411.293,00	158.228.146,00	128.117.862,00		31.809.415,00	31.239.253.584,00	0,00		
		21.619.233.905,00	8.652.357.882,00	1.034.825.920,00	1.003.016.505,00	3.257.296,00	0,00	31.239.253.584,00	0,00		

Bali, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]
[REDACTED]



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
LAMPIRAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA
TAHUN 2025

[illegible]

NIHIL



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
LAMPIRAN PENDAPATAN HIBAH-LO
TAHUN 2025

Kode>Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Desktop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								

Bali, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Jr. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda (W/c)
NIP. [REDACTED]



TAHUN 2025

NIHL



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. Putu Sumardiana, MF

Pembina Utama Muda/(V/c)

NIP

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
DAFTAR ASET YANG DIKERJASAMAKAN
TAHUN 2025

[illegible]

NIHL

Bali, 31 Desember 2025

Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda/(V/c)
NIP. [REDACTED]

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
LAMPIRAN KAS DI BENDAHARA BOSP
TAHUN 2025

NO	KABIKOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOSP REGULER 2024	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2024	KEMBALI KE KASDA TH. 2024	KOREKSI SALDO AUDITED 2023	PENGENBALIAN BELANJA 2024	BELANJA BOSP KINERJA 2024	BELANJA BOSP REGULER 2024	BELANJA DARI SISA BOSP 2023	SISA DANA BOSP 2024	SISA DANA BOSP REKENING KORAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NIHIL														

Bali, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali
Ir. Putu Suardana, MP
Pengelola Keuangan Bendahara
NIP. [REDACTED]



TAHUN 2025

[illegible]

Ball, 31 December 2025

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali

Ir. Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda (I/V/c)
NIP: [REDACTED]



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
TAHUN 2025
AKKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN K

[illegible]

Bali, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Kelaian dan Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 

